



**Kabupaten
Pasuruan**



**LAPORAN
AKHIR**

METADATA SEKTORAL

KABUPATEN PASURUAN

2021



TIM PENYUSUN

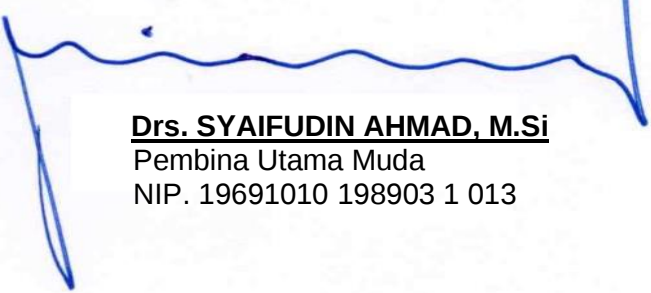
Pengarah/Director	:	Drs Syaifudin Ahmad, MSi
Kordinator Teknis	:	Juli Purwanto,SE.,MM
Naskah/Manuscript	:	Dewi Kurnia Sari, S.Si., M.Si.
Tata Letak/Layout	:	Riskhi Yulia Dwi Ichsanti, S.Pi.
Pengolah Data/Data Processor	:	Andreas Prasetia, S.Si.
Gambar Kulit/Cover Design	:	Afif Rizki Alaudin, S.M.
Infografis/Infographics	:	Sandhu Anwar Muhammad, S.E.
Penyunting/Editor	:	Teguh Yahya Syafi'i, S.E.

KATA PENGANTAR

Buku Metadata Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Publikasi ini menampilkan informasi dari indikator data statistik sektoral dengan rincian seperti konsep definisi, rumusan, kegunaan dan interpretasi.

Publikasi **Buku Metadata Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2021** merupakan publikasi yang diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan perbaikan secara bertahap. Namun demikian kekurangan selalu ada, untuk itu dimohon kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan demi terwujudnya **Buku Metadata Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2021**, kami sampaikan terima kasih, semoga kita dapat terus bekerja sama untuk meningkatkan mutu. Akhirnya kami berharap publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan data bagi para pengguna dan konsumen lain,

Pasuruan, 29 Oktober 2021
**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pasuruan**



Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691010 198903 1 013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
METADATA INDIKATOR DINAS KESEHATAN	1
METADATA INDIKATOR DINAS PENDIDIKAN	18
METADATA INDIKATOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	37
METADATA INDIKATOR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	51
METADATA INDIKATOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62
METADATA INDIKATOR DINAS TENAGA KERJA	72
METADATA INDIKATOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	80
METADATA INDIKATOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	90
METADATA INDIKATOR DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG	98
METADATA INDIKATOR DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN	105
METADATA INDIKATOR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	108
METADATA INDIKATOR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	115
METADATA INDIKATOR DINAS PERTANIAN	123
METADATA INDIKATOR DINAS PEKERJAAN UMUM BINA RAGA	131
METADATA INDIKATOR DINAS PERHUBUNGAN	136
METADATA INDIKATOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	142
METADATA INDIKATOR DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	147
METADATA INDIKATOR DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	154
METADATA INDIKATOR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	159
METADATA INDIKATOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	164
METADATA INDIKATOR DINAS SOSIAL	171
METADATA INDIKATOR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	177
METADATA INDIKATOR BADAN KEUANGAN DAERAH	181
METADATA INDIKATOR DINAS PERIKANAN	189
METADATA INDIKATOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	193



METADATA INDIKATOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	199
METADATA INDIKATOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	204
METADATA INDIKATOR INSPEKTORAT DAERAH	208
METADATA INDIKATOR SEKRETARIAT DPRD	212
METADATA INDIKATOR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	214
METADATA INDIKATOR BAGIAN HUKUM	216
METADATA INDIKATOR BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.....	218
METADATA INDIKATOR BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	220
METADATA INDIKATOR BAGIAN PEREKONOMIAN	222
METADATA INDIKATOR BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	224
METADATA INDIKATOR BAGIAN ORGANISASI	226
METADATA INDIKATOR BAGIAN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN KEUANGAN	229
METADATA INDIKATOR BAGIAN UMUM	231

METADATA INDIKATOR

DINAS KESEHATAN





Nama Indikator	:	Jumlah Balita Gizi Buruk
Konsep Definisi	:	Banyaknya balita yang malnutrisi atau kondisi berat dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata.
Rumusan	:	=Jumlah Balita Gizi Buruk
Kegunaan	:	Untuk mengetahui banyaknya balita yang gizi buruk dan untuk perhitungan persentase balita gizi buruk mendapat perawatan
Intepretasi	:	Semakin tinggi jumlah balita gizi buruk menunjukkan bahwa semakin banyak balita yang kekurangan nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vitalnya.

Nama Indikator	:	Persentase Penanganan Penderita HIV AIDS
Konsep Definisi	:	Persentase penanganan pasien yang sedang menderita HIV AIDS
Rumusan	:	$= \frac{\text{Jumlah penderita HIV AIDS yang ditangani}}{\text{Jumlah penderita HIV AIDS}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui besarnya persentase penderita HIV AIDS yang sudah ditangani
Intepretasi	:	Semakin tinggi persentase penanganan penderita HIV AIDS menunjukkan bahwa semakin banyak penderita HIV AIDS yang sudah ditangani

Nama Indikator	:	Angka Kematian Ibu
Konsep Definisi	:	Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, Utomo. 1985).
Rumusan	:	$= \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1000$



Kegunaan	:	Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.
Intepretasi	:	Berdasarkan data SDKI 2002 - 2003, Angka Kematian Ibu atau Maternal Mortality Ratio (MMR) di Indonesia untuk periode tahun 1998 - 2002, adalah sebesar 307. Artinya terdapat 307 kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup.

Nama Indikator	:	Angka Kematian Bayi
Konsep Definisi	:	Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut: ■ 70 sangat tinggi, ■ 40 – 70 tinggi, ■ 20-39 sedang, ■ dan <20 rendah.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah penduduk yang meninggal pada umur} < 1 \text{ tahun pada waktu tertentu})}{(\text{Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.



Intepretasi	:	AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi dari pada AKBa. Meskipun target program terkait khusus dengan kematian balita, AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Jumlah Desa Siaga Aktif
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.
Rumusan	:	Jumlah Desa Siaga Aktif
Kegunaan	:	Untuk mengetahui data banyaknya desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
Intepretasi	:	Berdasarkan dari Laporan Bidang Kesmas, di Kabupaten Pasuruan jumlah Desa Siaga Aktif pada tahun 2018 mencapai 365, sesuai target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan tercapainya program Desa Siaga Aktif di Kabupaten Pasuruan.

Nama Indikator	:	Persentase Rumah Tangga Yang Berprilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan PHBS adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu})}{(\text{Jumlah rumah tangga yang dipantau atau survey di wilayah dan pada kurun waktu yang sama})} \times 100\%$



Kegunaan	:	Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bermanfaat untuk mengetahui data rumah tangga yang sudah berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
Intepretasi	:	Semakin tinggi persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang paham dan menerapkan hidup bersih dan sehat.

Nama Indikator	:	Angka Prevalensi Kusta
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan angka prevalensi kusta adalah proporsi orang yang menderita kusta dari suatu populasi pada satu titik waktu atau periode waktu.
Rumusan	:	$= (\text{Jumlah orang yang menderita penyakit kusta selama satu jangka waktu tertentu}) / (\text{Jumlah populasi}) \times 1000$
Kegunaan	:	Angka prevalensi kusta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi penderita kusta pada jangka waktu dan tempat tertentu.
Intepretasi	:	Berdasarkan data Pusdatin Kemkes, angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 0,7 kasus/10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 6,08 kasus per 100.000 penduduk.

Konsep Definisi	:	Rata-Rata Tahun Hidup yang Masih Akan Dijalani Oleh Seseorang yang Telah Berhasil Mencapai Umur X, Pada Suatu Tahun Tertentu, dalam Situasi Mortalitas yang Berlaku Di Lingkungan Masyarakatnya.
Rumusan	:	Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.
Kegunaan	:	Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Intepretasi	:	Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Indonesia dari Sensus Penduduk tahun 1971 adalah 47,7 tahun, artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1971 (periode 1967-1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahn 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 52,2 tahun, meningkat lagi menjadi 59,8 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1990, dan bayi yang dilahirkan tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai 65,5 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama 30 tahun terakhir dari tahun 1970-an sampai tahun 2000.
--------------------	---	---

Nama Indikator	:	Persentase Desa siaga
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Desa Siaga yaitu desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan, kesehatan secara mandiri.
Rumusan	:	$\frac{\text{(Jumlah Desa Siaga)}}{\text{(Jumlah Desa Siaga yang dibentuk)}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Data persentase Desa Siaga bermanfaat untuk mengetahui besarnya persentase desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di di wilayahnya.
Intepretasi	:	Semakin tinggi persentase Desa Siaga menunjukkan bahwa semakin meningkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan.

Nama Indikator	:	Persentase Akreditasi Puskesmas dan RSUD Strata Madya
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Rumusan	:	$\frac{\text{(Jumlah Puskesmas atau RSUD yang terakreditasi)}}{\text{(Jumlah puskesmas atau RSUD keseluruhan)}} \times 100\%$



Kegunaan	:	Persentase akreditasi puskesmas dan RSUD Strata Madya dapat dimanfaatkan untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai Persentase Akreditasi Puskesmas dan RSUD Strata Madya menunjukkan bahwa semakin baik mutu dan kualitas pelayanan di Puskesmas dan RSUD Strata Madya.

Nama Indikator	:	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Rumusan	:	$= (\text{Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)}) / (\text{Jumlah pelayanan Kesehatan di Puskesmas})$
Kegunaan	:	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.
Intepretasi	:	Nilai rata-rata IKM ke 14 (empat belas) unsur pelayanan yang telah dinilai oleh responden terdapat tujuh unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata IKM diatas 3.000 dan Tujuh unsur pelayanan dengan nilai rata-rata dibawah 3,000.

Nama Indikator	:	Persentase Desa Siaga Aktif
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.
Rumusan	:	$(\text{Jumlah Desa Siaga Aktif}) / (\text{Jumlah Desa}) \times 100\%$

Kegunaan	:	Untuk mengetahui persentase desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
Intepretasi	:	Berdasarkan dari Laporan Bidang Kesmas, di Kabupaten Pasuruan persentase Desa Siaga Aktif pada tahun 2019 tercapai 100%, sesuai target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan tercapainya program Desa Siaga Aktif di Kabupaten Pasuruan.

Nama Indikator	:	Persentase Puskesmas Ber-Akreditasi
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Puskesmas Ber-Akreditasi yaitu pengakuan terhadap puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Rumusan	:	$= (\text{Jumlah Puskesmas Berakreditasi}) / (\text{Jumlah Puskesmas keseluruhan}) \times 100\%$
Kegunaan	:	Nilai persentase puskesmas berakreditasi digunakan untuk mengetahui banyaknya puskesmas yang sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase puskesmas yang berakreditasi menunjukkan bahwa semakin banyak puskesmas yang telah memenuhi standar yang sudah ditetapkan.

Nama Indikator	:	Rata - Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pasuruan dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Rumusan	:	$= \frac{(\text{Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pasuruan dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas})}{(\text{Jumlah pelayanan Kesehatan di Puskesmas})}$



Kegunaan	:	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pasuruan dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan.
Intepretasi	:	Nilai rata-rata IKM ke 14 (empat belas) unsur pelayanan yang telah dinilai oleh responden terdapat tujuh unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata IKM diatas 3.000 dan Tujuh unsur pelayanan dengan nilai rata-rata dibawah 3,000.

Nama Indikator	:	Persentase Pertolongan persalinan oleh nakes
Konsep Definisi	:	Proporsi Pertolongan Kelahiran (PPK) oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (TKT) adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam persentase.
Rumusan	:	$\frac{\text{(Banyaknya persalinan yang ditolong oleh nakes)}}{\text{(Jumlah persalinan seluruhnya pada periode yang sama)}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur kematian ibu secara akurat tergolong sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih.
Intepretasi	:	Hasil Susenas tahun 2009 menunjukkan persalinan yang ditolong nakes sebesar 61,24% artinya bahwa dari seluruh persalinan yang terjadi pada tahun 2009, sebanyak 61,24 persen-nya ditolong oleh nakes. Dengan kata lain sebagian besar persalinan bayi sudah ditolong oleh tenaga kesehatan.

Nama Indikator	:	Persentase Cakupan Pelayanan Balita
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud cakupan pelayanan balita adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada anak balita usia 12-59 bulan.
Rumusan	:	$\frac{\text{(Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan sesuai standar pada waktu tertentu)}}{\text{(Jumlah seluruh anak balita pada waktu tertentu)}} \times 100\%$

Kegunaan	:	Nilai Persentase Cakupan Pelayanan Balita dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak balita yang sudah mendapatkan pelayanan.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai Persentase Cakupan Pelayanan Balita menunjukkan bahwa semakin banyak balita yang sudah mendapatkan pelayanan.

Nama Indikator	:	Persentase Balita Stunting
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan persentase balita stunting adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD
Rumusan	:	$= (\text{Jumlah balita stunting}) / (\text{Jumlah balita yang diukur panjang atau tinggi badan}) \times 100\%$
Kegunaan	:	Nilai persentase balita stunting bermanfaat untuk mengetahui banyaknya balita yang mengalami masalah kurang gizi kronis pada waktu tertentu.
Intepretasi	:	Target prevalensi stunting pada Balita untuk tahun 2020 adalah 24,1% (5.543.000 Balita), sementara laporan ePPGBM SIGIZI (per tanggal 20 Januari 2021) dari 34 provinsi menunjukkan bahwa dari 11.499.041 balita yang diukur status gizinya berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U) terdapat 1.325.298 balita dengan TB/U <-2 SD atau dapat dikatakan 11,6% balita mengalami stunting. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa indikator persentase balita stunting melampaui target yang telah ditetapkan.

Nama Indikator	:	Persentase balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan adalah balita yang ditemukan kekurangan gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi nutrisi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis.
Rumusan	:	$(\text{Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan}) / (\text{Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan}) \times 100\%$



Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur besarnya balita kekurangan gizi yang mendapatkan perawatan. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan menunjukkan bahwa semakin banyak balita yang menderita gizi buruk sudah terawat.

Nama Indikator	:	Persentase Penyakit Menular Wabah yang Dilakukan PE
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan penyakit menular wabah yaitu kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah penyakit menular wabah yang dilakukan PE})}{(\text{Jumlah penyakit menular wabah})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui besarnya penyakit menular wabah yang sudah diselidiki.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase penyakit menular wabah yang dilakukan PE menunjukkan bahwa semakin banyak penyakit menular wabah yang sudah dilakukan penyelidikan epidemiologi.

Nama Indikator	:	Persentase Desa UCI
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Desa UCI adalah desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.
Rumusan	:	$= \frac{(\text{Jumlah Desa UCI})}{(\text{Jumlah desa keseluruhan})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya desa yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase Desa UCI maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak desa yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.



Nama Indikator	:	Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit TBC
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan persentase cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC adalah persentase penderita penyakit TBC yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah penderita TBC yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun})}{(\text{Jumlah perkiraan penderita TBC di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya penderita penyakit TBC yang mendapatkan penanganan.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC menunjukkan bahwa semakin banyak penderita penyakit TBC yang ditangani.

Nama Indikator	:	Persentase Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan persentase cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD adalah persentase penderita penyakit DBD yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun.
Rumusan	:	$= \frac{(\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun})}{(\text{Jumlah perkiraan penderita DBD di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya penderita penyakit DBD yang mendapatkan penanganan.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD menunjukkan bahwa semakin banyak penderita penyakit DBD yang ditangani.

Nama Indikator	:	Persentase Rumah Tangga Sehat
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Rumah tangga Sehat yaitu Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di Rumah Tangga.
Rumusan	:	$= \frac{(\text{Jumlah rumah tangga sehat di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu})}{(\text{Jumlah rumah tangga yang disurvei pada kurun waktu yang sama})} \times 100\%$



Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya rumah tangga yang sudah menerapkan PHBS.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase rumah tangga sehat menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang menerapkan PHBS.

Nama Indikator	:	Persentase kualitas kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan kualitas kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat yaitu kondisi kesehatan di lingkungan wilayah tertentu yang sudah memenuhi standar yang telah disepakati.
Rumusan	:	$= \frac{(\text{Jumlah kualitas kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat})}{(\text{Jumlah kualitas kesehatan lingkungan keseluruhan})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitas kesehatan di lingkungan tertentu.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase kualitas kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat menunjukkan bahwa semakin baik kondisi kualitas kesehatan lingkungan di wilayah tersebut.

Nama Indikator	:	Persentase Screening Usia Lanjut (> 65th) Sesuai Standart
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan screening usia lanjut (>65th) sesuai standart yaitu tindakan pemeriksaan awal yang dilakukan petugas kesehatan terhadap usia lanjut untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan secara klinis sesuai aturan yang sudah disepakati.
Rumusan	:	$= \frac{(\text{Jumlah pengunjung berusia >65th yang mendapat screening kesehatan sesuai standart minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun})}{(\text{Jumlah semua penduduk usia >65th yang ada di wilayah tertentu dalam kurun waktu satu tahun perhitungan})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kondisi screening usia lanjut (>65th) yang sudah memenuhi standart.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase screening usia lanjut (>65th) sesuai standart menunjukkan bahwa semakin banyak pelayanan pemeriksaan screening terhadap usia lanjut (>65th) yang sudah memenuhi standart.



Nama Indikator	:	Persentase Pemeriksaan Kesehatan Penduduk Usia > 15 Tahun yang Diperiksa dalam Satu Tahun
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Pemeriksaan kesehatan Penduduk usia > 15 tahun yg diperiksa dalam satu tahun yaitu kegiatan pemeriksaan kondisi kesehatan terhadap penduduk yang berusia > 15 tahun pada kurun waktu satu tahun.
Rumusan	:	$= \frac{(\text{Jumlah Penduduk usia} > 15 \text{ tahun yang diperiksa dalam satu tahun})}{(\text{Jumlah penduduk usia} > 15 \text{ tahun})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya penduduk usia >15 tahun yang mendapat pemeriksaan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase pemeriksaan kesehatan penduduk usia >15 tahun yang diperiksa dalam satu tahun menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia >15 tahun yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan.

Nama Indikator	:	Persentase Ketersediaan obat dan Perbekalan obat
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Ketersediaan obat dan Perbekalan obat adalah tersedianya obat bagi pelayanan kesehatan.
Rumusan	:	$= \frac{(\text{Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan obat})}{(\text{Jumlah kebutuhan obat})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya ketersediaan obat di suatu wilayah tertentu bagi pelayanan kesehatan.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat menunjukkan bahwa semakin banyak obat yang tersedia untuk pelayanan kesehatan.

Nama Indikator	:	Persentase Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan cakupan pelayanan kesehatan dasar adalah penduduk yang mengunjungi tempat pelayanan kesehatan dasar pada waktu tertentu.
Rumusan	:	$= \frac{(\text{Jumlah penduduk yang mengunjungi tempat pelayanan kesehatan dasar})}{(\text{Jumlah penduduk di wilayah tersebut})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya penduduk yang mengunjungi dan mendapat pelayanan kesehatan dasar di wilayah tertentu.

Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mengunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut.
--------------------	---	---

Nama Indikator	:	Persentase maskin dibiayai jaminan Kesehatan
Konsep Definisi	:	Jaminan Sosial Masyarakat (JAMKESMAS) adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2008 dan merupakan perubahan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin /JPKMM atau lebih dikenal dengan program ASKESKIN yang diselenggarakan pada tahun 2005-2007.
Rumusan	:	$= (\text{Jumlah penduduk miskin yang dibiayai jaminan kesehatan}) / (\text{Jumlah penduduk miskin seluruhnya}) \times 100\%$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya penduduk miskin yang iuran pelayanan kesehatannya dibiayai oleh Pemerintah.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase maskin dibiayai jaminan kesehatan menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk miskin yang iuran jaminan kesehatannya dibiayai oleh Pemerintah.

Nama Indikator	:	Persentase Ketersediaan obat dan Perbekalan obat
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Ketersediaan obat dan Perbekalan obat adalah tersedianya obat bagi pelayanan kesehatan.
Rumusan	:	$= (\text{Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan obat}) / (\text{Jumlah kebutuhan obat}) \times 100\%$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya ketersediaan obat di suatu wilayah tertentu bagi pelayanan kesehatan.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat menunjukkan bahwa semakin banyak obat yang tersedia untuk pelayanan kesehatan.

Nama Indikator	:	Persentase Rumah Tangga / KK yang Menggunakan Jamban Sehat
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan jamban sehat yaitu jamban yang tidak mencemari sumber air minum, letak lubang penampung berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih.



Rumusan	:	$= (\text{Jumlah rumah tangga atau KK yang menggunakan jamban sehat pada waktu tertentu}) / (\text{Jumlah rumah tangga atau KK pada waktu tertentu}) \times 100\%$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya rumah tangga atau KK yang sudah menggunakan jamban sehat.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase rumah tangga atau KK yang menggunakan jamban sehat menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga atau KK yang sudah menggunakan jamban yang tidak mencemari sumber air minum.

Nama Indikator	:	Persentase sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan sesuai standart
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standart yaitu peralatan dalam pelayanan kesehatan di tempat tertentu sudah memenuhi aturan yang sudah ditetapkan.
Rumusan	:	$= (\text{Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standart}) / (\text{Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada}) \times 100\%$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sudah memenuhi standart yang sudah ditentukan.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standart menunjukkan bahwa semakin banyak sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sudah memenuhi standart yang berlaku.

Nama Indikator	:	Rata rata Nilai hasil Kinerja Puskesmas
Konsep Definisi	:	Penilaian kinerja puskesmas yaitu suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja atau prestasi puskesmas.
Rumusan	:	$= (\text{Jumlah nilai hasil kinerja puskesmas}) / (\text{Jumlah puskesmas})$
Kegunaan	:	Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui rata-rata penilaian hasil kerja puskesmas.
Intepretasi	:	Semakin tinggi rata-rata nilai hasil kinerja puskesmas menunjukkan bahwa semakin baik kinerja puskesmas.



Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Bangil
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Rumusan	:	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
Kegunaan	:	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat. Artinya pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik semakin baik.

Nama Indikator	:	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan dan anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan.
Rumusan	:	$= \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun sesuai standart}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar dapat digunakan untuk mengetahui dokumen yang sudah tersusun dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai Persentase dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar, maka semakin banyak dokumen yang sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan.

METADATA INDIKATOR

DINAS PENDIDIKAN





Nama Indikator	:	Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI
Konsep Definisi	:	Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah siswa yang duduk di bangku SD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
Intepretasi	:	APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nama Indikator	:	Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMP/MTs
Konsep Definisi	:	Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah siswa yang duduk di bangku SMP}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13 sampai 15 tahun}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan
Intepretasi	:	APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nama Indikator	:	Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs
Konsep Definisi	:	Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.
Rumusan	:	$APM\ SD = \frac{\text{Jumlah murid SD usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$



Kegunaan	:	Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah
Intepretasi	:	APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

Nama Indikator	:	Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs
Konsep Definisi	:	Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah murid SMP usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah
Intepretasi	:	APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

Nama Indikator	:	Jumlah Ruang Kelas SD/MI
Konsep Definisi	:	Ruang Kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
Rumusan	:	$\text{Jumlah ruang kelas}_t$ Keterangan: t = tahun ke-t
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah ruangan kelas
Intepretasi	:	Makin tinggi rasio berarti makin padat siswa yang berada di kelas atau makin kurang jumlah ruang kelas.

Nama Indikator	:	Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs
Konsep Definisi	:	Ruang Kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
Rumusan		
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah ruangan kelas
Intepretasi	:	Makin tinggi rasio berarti makin padat siswa yang berada di kelas atau makin kurang jumlah ruang kelas.

Nama Indikator	:	Rata - Rata Lama Sekolah
Konsep Definisi	:	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijazah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki
Rumusan	:	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{lama sekolah penduduk ke } - i)$ Ket. MYS (Rata-Rata Lama Sekolah) P15+ = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i = a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 c. Masih sekolah di S2/S3 = konersi ijazah terakhir + 1 d. Tidak bersekolah lagi da tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Kegunaan	:	Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.
Intepretasi	:	Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Nama Indikator	:	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah/pendidikan dasar
Konsep Definisi	:	Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar}}{\text{Jumlah penduduk usia pendidikan dasar}} \times 10000$
Kegunaan	:	Untuk menampung semua penduduk usia pendidikan sekolah dasar.
Intepretasi	:	Rasio ketersediaan sekolah SD sederajat tahun 2009-2013 menunjukkan peningkatan, pada tahun 2009 setiap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun tersedia 15 sekolah sedangkan pada tahun 2013 tersedia 31 sekolah ini berarti pada tahun 2009 setiap sekolah menampung sekitar 657 murid dan pada tahun 2013 menampung sekitar 324 murid. Hal ini berarti untuk rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar juga meningkat.

Nama Indikator	:	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah
Konsep Definisi	:	Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah}}{\text{Jumlah penduduk usia pendidikan menengah}} \times 10000$
Kegunaan	:	Untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah
Intepretasi	:	Rasio ketersediaan sekolah SMP sederajat tahun 2009-2013 menunjukkan peningkatan, pada tahun 2009 setiap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun tersedia 15 sekolah sedangkan pada tahun 2013 tersedia 31 sekolah ini berarti pada tahun 2009 setiap sekolah menampung sekitar 657 murid dan pada tahun 2013 menampung sekitar 324 murid. Hal ini berarti untuk rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah juga meningkat.

Nama Indikator	:	Rasio Murid Per Guru Jenjang SD/MI
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dasar dengan jumlah guru sekolah dasar
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah Murid Sekolah Dasar}}{\text{Jumlah Guru Sekolah Dasar}}$
Kegunaan	:	Menggambarkan beban kerja guru SD/MI dalam mengajar dan melihat mutu pengajaran di kelas.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru SD/MI terhadap murid sekolah dasar sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Nama Indikator	:	Rasio Murid Per Guru Jenjang SMP/MTs
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah menengah dengan jumlah guru sekolah menengah
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah Murid Sekolah Menengah}}{\text{Jumlah Guru Sekolah Menengah}}$
Kegunaan	:	Menggambarkan beban kerja guru SMP/MTS dalam mengajar dan melihat mutu pengajaran di kelas.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru SMP/MTS terhadap murid sekolah menengah sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Nama Indikator	:	Harapan Lama Sekolah
Konsep Definisi	:	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
Rumusan	:	$HLS^t_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan HLS_t_a = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_t_i = Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t i = Usia 9a, a=1, ..., n) FK =Faktor koreksi pesantren
Kegunaan	:	HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Intepretasi	:	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I.
--------------------	---	---

Nama Indikator	:	Indeks Pendidikan
Konsep Definisi	:	Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah.
Rumusan	:	$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Keterangan HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata-Rata Lama Sekolah
Kegunaan	:	Untuk memberikan informasi mengenai pendidikan di suatu daerah
Intepretasi	:	Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis. Indeks pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (literacy rate) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama sekolah (means-years of schooling) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah



Nama Indikator	:	Angka Putus Sekolah
Konsep Definisi	:	persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama.
Rumusan	:	$Y = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan Y = Angka Putus Sekolah a = Jumlah siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan pendidikan sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu b = Jumlah siswa pada tahun ajaran lalu yang masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama
Kegunaan	:	Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun).
Intepretasi	:	Menggambarkan seberapa banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu

Nama Indikator	:	Angka Lulusan SD/MI
Konsep Definisi	:	Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut.
Rumusan	:	$Y1 = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan : Y1 : Tingkat Kelulusan Sekolah SD a. Jumlah penduduk usia 15-17 tahun yang minimal tamat SD b. Jumlah penduduk usia 15-17 tahun
Kegunaan	:	Untuk mengetahui banyaknya siswa yang tidak lulus sehingga dapat direncanakan program remedial.
Intepretasi	:	Menggambarkan seberapa banyaksiswa yang minimal telah menamatkan pendidikan hingga suatu jenjang tertentu pada kelompok tertentu



Nama Indikator	:	Angka Lulusan SMP/Mts
Konsep Definisi	:	Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut.
Rumusan	:	$Y2 = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan : Y2 : Tingkat Kelulusan Sekolah SMP a. Jumlah penduduk usia 18-20 tahun yang minimal tamat SD b. Jumlah penduduk usia 18-20 tahun
Kegunaan	:	Untuk mengetahui banyaknya siswa yang tidak lulus sehingga dapat direncanakan program remedial.
Intepretasi	:	Menggambarkan seberapa banyaksiswa yang minimal telah menamatkan pendidikan hingga suatu jenjang tertentu pada kelompok tertentu

Nama Indikator	:	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Konsep Definisi	:	Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu
Rumusan	:	Keterangan : Y1 : Angka melanjutkan pada jenjang SD ke SMP a : Jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 SMP pada tahun ajaran sekarang b : Jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun ajaran lalu $Y1 = \frac{a}{b} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui banyaknya lulusan yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat dilakukan penanganan lebih lanjut
Intepretasi	:	Menggambarkan seberapa banyak siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang dan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ini



Nama Indikator	:	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA /SMK
Konsep Definisi	:	Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu
Rumusan	:	Keterangan : Y1 : Angka melanjutkan pada jenjang SMP ke SMA/SMK a : Jumlah siswa yang duduk di kelas 3 SMP pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 SMA/SMK pada tahun ajaran sekarang b : Jumlah siswa yang duduk di kelas 3 SD pada tahun ajaran lalu $Y1 = \frac{a}{b} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui banyaknya lulusan yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat dilakukan penanganan lebih lanjut
Intepretasi	:	Menggambarkan seberapa banyak siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang dan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ini

Nama Indikator	:	APK PAUD
Konsep Definisi	:	Proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.) terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu (3-5 tahun atau 3-6 tahun).
Rumusan	:	Keterangan : a = Jumlah murid PAUD b = Jumlah Penduduk Usia 3-5 Tahun / 3-6 Tahun $APK\ PAUD_{3-5\ tahun} = \frac{a}{b} \times 100\%$ $APK\ PAUD_{3-6\ tahun} = \frac{a}{b} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan
Intepretasi	:	Menggambarkan tinggi/rendahnya tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan



Nama Indikator	:	Persentase peningkatan jumlah ruang kelas pendidikan anak usia dini dan RPL berkondisi baik
Konsep Definisi	:	Bertambahnya ruang kelas pendidikan anak usia dini dan RPL berkondisi baik
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas sebelumnya}}{\text{Jumlah ruang kelas setelah peningkatan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah ruang kelas
Intepretasi	:	Jumlah ruang kelas bertambah 30% artinya dari 100 ruang kelas bertambah 30 jumlah ruang kelas

Nama Indikator	:	Persentase Guru Paud yang Bersertifikat Dan Terlatih Untuk Mengajar
Konsep Definisi	:	Guru paud yang bersertifikat adalah seorang guru mendapatkan pengakuan telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.
Rumusan	:	$\frac{\text{Guru Paud yang Bersertifikat}}{\text{Guru Paud}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui perbedaan antara guru paud yang telah bersertifikat dengan guru paud yang tidak berertifikat
Intepretasi	:	Terdapat 55% Guru Paud yang bersertifikat, artinya dari 100 guru paud terdapat 55 guru paud yang telah bersertifikat



Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Jumlah Ruang Kelas Pendidikan Dasar dan RPL Berkondisi Baik
Konsep Definisi	:	Bertambahnya ruang kelas pendidikan anak usia dini dan RPL berkondisi baik
Rumusan		$\frac{\text{Jumlah ruang kelas sebelumnya}}{\text{Jumlah ruang kelas setelah peningkatan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui peningkatan jumlah ruang kelas
Intepretasi	:	Jumlah ruang kelas bertambah 30% artinya dari 100 ruang kelas bertambah 30 jumlah ruang kelas

Nama Indikator	:	Persentase Guru SD/SMP yang Bersertifikat dan Terlatih untuk Mengajar
Konsep Definisi	:	Guru yang bersertifikat adalah seorang guru mendapatkan pengakuan telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.
Rumusan	:	$\frac{\text{Guru SD/SMP yang Bersertifikat}}{\text{Guru SD/SMP}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui perbedaan antara guru yang telah bersertifikat dengan guru yang tidak berertifikat
Intepretasi	:	Terdapat 90% Guru SD/SMP yang bersertifikat, artinya dari 100 guru paud terdapat 90 guru yang telah bersertifikat

Nama Indikator	:	Angka pendidikan yang ditamatkan SD
Konsep Definisi	:	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tamat SD/Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas}} \times 100\%$



Kegunaan	:	Mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya dan Sebagai bahan analisis pasar kerja
Intepretasi	:	Nilai angka tamat berkisar antara 0-100. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut. Contoh: Di Kabupaten Bekasi tahun 2013, angka tamat SD sebesar 20,27 persen, angka tamat SMP sebesar 19,96 persen, angka tamat SM sebesar 34,81 persen, dan angka tamat PT sebesar 6,41 persen, artinya sebagian besar penduduk di Kabupaten Bekasi telah menamatkan jenjang pendidikan SM.

Nama Indikator	:	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP
Konsep Definisi	:	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.
Rumusan	:	$Tamat\ SMP = \frac{Jumlah\ penduduk\ umur\ 15\ tahun\ ke\ atas\ yang\ tamat\ SMP/Sederajat}{Jumlah\ penduduk\ umur\ 15\ tahun\ ke\ atas} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya dan Sebagai bahan analisis pasar kerja
Intepretasi	:	Nilai angka tamat berkisar antara 0-100. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut. Contoh: Di Kabupaten Bekasi tahun 2013, angka tamat SD sebesar 20,27 persen, angka tamat SMP sebesar 19,96 persen, angka tamat SM sebesar 34,81 persen, dan angka tamat PT sebesar 6,41 persen, artinya sebagian besar penduduk di Kabupaten Bekasi telah menamatkan jenjang pendidikan SM.

Nama Indikator	:	Persentase Tutor dan Penyelenggara/Pengelola PNF yang Bersertifikat
Konsep Definisi	:	Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
	:	



Rumusan		$P = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan : P = Persentase Tutor dan penyelenggara/pengelola PNF yang bersertifikat a = Jumlah Tutor dan penyelenggara/pengelola PNF yang bersertifikat b = Jumlah keseluruhan Tutor dan penyelenggara/pengelola PNF yang bersertifikat
Kegunaan	:	Untuk mengukur seberapa banyak Tutor dan penyelenggara/pengelola PNF yang bersertifikat
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa semakin banyak tutor dan penyelenggara/pengelola PNF yang bersertifikat

Nama Indikator	:	Jumlah Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjadi Rujukan TUK Meningkat
Konsep Definisi	:	Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan program pembelajaran dengan orientasi vokasional tertentu dalam waktu yang singkat.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kepada masyarakat yang membutuhkan.
Intepretasi	:	

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Guru Berpendidikan S1/D.IV Pada Jenjang Pendidikan PAUD
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara guru berpendidikan S1/D.IV dengan jumlah keseluruhan guru pada pendidikan PAUD
Rumusan	:	$\frac{\text{Guru berpendidikan S1 atau D. IV}}{\text{Jumlah Keseluruhan guru pada jenjang pendidikan PAUD}}$

Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang pendidikan PAUD
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa jumlah guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang pendidikan PAUD semakin banyak
Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Guru Berpendidikan S1/D.IV Pada Jenjang Pendidikan SD/MI
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara guru berpendidikan S1/D.IV dengan jumlah keseluruhan guru pada pendidikan SD/MI
Rumusan	:	$\frac{\text{Guru berpendidikan S1 atau D. IV}}{\text{Jumlah Keseluruhan guru pada jenjang pendidikan SD/MI}}$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang pendidikan SD/MI
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa jumlah guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang pendidikan SD/MI semakin banyak

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Guru Berpendidikan S1/D.IV Pada Jenjang Pendidikan SMP/Mts
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara guru berpendidikan S1/D.IV dengan jumlah keseluruhan guru pada pendidikan SMP/MTs
Rumusan	:	$\frac{\text{Guru berpendidikan S1 atau D. IV}}{\text{Jumlah Keseluruhan guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs}}$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang pendidikan SMP/MTs
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa jumlah guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang pendidikan SMP/MTs semakin banyak



Nama Indikator	:	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang Bersertifikat dan Terlatih untuk Meningkatkan Kompetensi
Konsep Definisi	:	Guru (pendidik) meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: * Kompetensi pedagogik; * Kompetensi kepribadian; * Kompetensi profesional; dan * Kompetensi sosial.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah guru dan GTK yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Keseluruhan guru dan GTK}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengukur seberapa banyak Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang bersertifikat dan terlatih untuk meningkatkan kompetensi

Nama Indikator	:	Rasio kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) terhadap jenjang pendidikan Paud Formal
Konsep Definisi	:	Guru (pendidik) meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah guru dan GTK Paud Formal}}{\text{Jumlah lembaga Paud Formal}}$
Kegunaan	:	Untuk mengukur apakah persebaran jumlah guru pada jenjang pendidikan Paud Formal sudah merata
Intepretasi	:	Nilai rasio sebesar 2:1 artinya 2 guru mengampu di 1 lembaga pendidikan PAUD



Nama Indikator	:	Rasio Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Terhadap Jenjang Pendidikan SD
Konsep Definisi	:	Guru (pendidik) meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah guru dan GTK SD}}{\text{Jumlah lembaga SD}}$
Kegunaan	:	Untuk mengukur apakah persebaran jumlah guru pada jenjang pendidikan SD sudah merata
Intepretasi	:	Nilai rasio sebesar 2:1 artinya 2 guru mengampu di 1 lembaga pendidikan SD

Nama Indikator	:	Rasio kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) terhadap jenjang pendidikan SMP
Konsep Definisi	:	Guru (pendidik) meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah guru dan GTK SMP}}{\text{Jumlah lembaga SMP}}$
Kegunaan	:	Untuk mengukur apakah persebaran jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP sudah merata
Intepretasi	:	Nilai rasio sebesar 2:1 artinya 2 guru mengampu di 1 lembaga pendidikan SMP



Nama Indikator	:	APM TPQ
Konsep Definisi	:	Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan TPQ terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.
Rumusan	:	$APM\ TPQ = \frac{Jumlah\ murid\ TPQ}{Jumlah\ penduduk}$
Kegunaan	:	Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk
Intepretasi	:	APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

Nama Indikator	:	APM Madin
Konsep Definisi	:	Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan Madin terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.
Rumusan	:	$APM\ Madin = \frac{Jumlah\ murid\ Madin}{Jumlah\ penduduk}$
Kegunaan	:	Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk
Intepretasi	:	APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

Nama Indikator	:	Persentase Guru TPQ/Madin yang Bersertifikat
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara guru TPQ/Madin yang bersertifikat terhadap jumlah guru TPQ/Madin.
Rumusan	:	$\frac{\text{Guru TPQ atau Madin yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Guru TPQ atau Madin}}$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui guru TPQ/Madin yang bersertifikat
Intepretasi	:	Guru TPQ 50% bersertifikat artinya dari 100 guru TPQ terdapat 50 yang sudah bersertifikat

Nama Indikator	:	Rasio TPQ yang Berstandar
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara jumlah TPQ yang yang berstandar terhadap jumlah TPQ keseluruhan
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah TPQ berstandar}}{\text{Jumlah keseluruhan TPQ}}$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah TPQ yang berstandar
Intepretasi	:	Semakin mendekati nilai rasio artinya semakin banyak jumlah TPQ yang berstandar

Nama Indikator	:	Rasio Madin yang berstandar
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara jumlah Madin yang yang berstandar terhadap jumlah Madin keseluruhan
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah Madin berstandar}}{\text{Jumlah keseluruhan Madin}}$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah Madin yang berstandar
Intepretasi	:	Semakin mendekati nilai rasio artinya semakin banyak jumlah Madin yang berstandar

METADATA INDIKATOR

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



Nama Indikator	:	Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP
Konsep Definisi	:	Penduduk Wajib KTP adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah nikah secara sah
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP})}{(\text{Jumlah seluruh Penduduk Wajib E-KTP})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP
Intepretasi	:	Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP adalah 50%. Ini berarti setengah dari jumlah seluruh Penduduk Wajib KTP telah memiliki E-KTP

Nama Indikator	:	Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran
Konsep Definisi	:	Kutipan Akte Kelahiran adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akte dan pada bagian bawah kutipan Akte tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan". Akte yang diserahkan kepada warga merupakan kutipan akte kelahiran sedangkan akte kelahiran yang asli ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah penduduk yang memiliki Akte Kelahiran})}{(\text{Jumlah seluruh penduduk})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio Penduduk yang memiliki Akte Kelahiran
Intepretasi	:	Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran adalah 50%. Ini berarti setengaht dari jumlah seluruh Penduduk telah memiliki Akte Kelahiran



Nama Indikator	:	Persentase Penerbitan Akte Perkawinan
Konsep Definisi	:	Akte Perkawinan merupakan dokumen penting sebagai bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Fungsi dari adanya Akte Perkawinan adalah memberikan keabsahan atas adanya pernikahan, memudahkan birokrasi, menjamin hak istri, dan mempermudah pengurusan hak asuh anak
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah penduduk yang memiliki Akte Perkawinan})}{(\text{Jumlah seluruh penduduk yang berstatus kawin})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio Penduduk yang memiliki Akte Perkawinan
Intepretasi	:	Persentase Penerbitan Akte Perkawinan adalah 50%. Ini berarti setengah dari jumlah seluruh penduduk yang berstatus kawin telah memiliki Akte Perkawinan

Nama Indikator	:	Kepemilikan KTP
Konsep Definisi	:	Kepemilikan KTP adalah perbandingan antara jumlah penduduk wajib ber-KTP terhadap jumlah penduduk memiliki KTP
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah penduduk yang memiliki E KTP})}{(\text{Jumlah penduduk wajib E KTP})} \times 100\%$ Keterangan : A = Persentase Kepemilikan KTP
Kegunaan	:	Mengukur kepemilikan KTP disuatu daerah

Nama Indikator	:	Persentase Kepemilikan KK
Konsep Definisi	:	Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. KK menjadi dasar untuk penerbitan KTP dan menjadi dasar bagi pemenuhan hak warga negara yang lainnya dan bagi pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga})}{(\text{Jumlah Kepala Keluarga})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa semakin banyak kepala keluarga yang mempunyai Kartu Keluarga

Nama Indikator	:	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk
Rumusan	:	$A = \frac{(\text{Jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran})}{(\text{Jumlah penduduk})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengukur seberapa besar kepemilikan dokumen kependudukan akta kelahiran
Intepretasi	:	semakin besar persentasenya menunjukkan semakin tinggi kepemilikan dokumen akta kelahiran



Nama Indikator	:	Persentase Kepemilikan Akte Kematian
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki akta kematian terhadap jumlah kematian yang dilaporkan
Rumusan	:	$B = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki akta kematian}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengukur seberapa besar kepemilikan dokumen kependudukan akta kematian
Intepretasi	:	semakin besar persentasenya menunjukkan semakin tinggi kepemilikan akta kematian

Nama Indikator	:	Persentase Kepemilikan Akte perkawinan
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan terhadap jumlah perkawinan
Rumusan	:	$C = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki akta perkawinan}}{\text{Jumlah perkawinan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengukur seberapa besar kepemilikan dokumen kependudukan akta perkawinan
Intepretasi	:	semakin besar persentasenya menunjukkan semakin tinggi kepemilikan dokumen akta perkawinan



Nama Indikator	:	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Konsep Definisi	:	Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap
Rumusan	:	$A = \sum penduduk laki - laki + \sum penduduk perempuan$
Kegunaan	:	Mengukur jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Intepretasi	:	Semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin banyak jumlah penduduknya



Nama Indikator	:	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin dan Kelompok Usia
Konsep Definisi	:	Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk menurut kelompok umur adalah penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur 5 tahunan
Rumusan	:	$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{14} penduduk_{ij}$
		Keterangan :
		i = jenis kelamin, dimana 1 = laki-laki dan 2 = perempuan
		j = kelompok usia, dimana
		1=0-4 Tahun
		2=5-9 Tahun
		3=10-14 Tahun
		4=15-19 Tahun
		5=20-24 Tahun
		6=25-29 Tahun
		7=30-34 Tahun
		8=35-39 Tahun
		9=40-44 Tahun
		10=45-49 Tahun
		11=50-54 Tahun
		12=55-59 Tahun
		13=60-64 Tahun
		14=65+ Tahun
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia
Intepretasi	:	1. Mengetahui variasi jumlah penduduk 2. Mengetahui besaran dan komposisi penduduk

Nama Indikator	:	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Konsep Definisi	:	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah. SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat. SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat. SMA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat. PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan sederajat.
Rumusan	:	Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
Kegunaan	:	Untuk mengukur sebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
Intepretasi	:	1. Mengetahui variasi jumlah penduduk 2. Mengetahui besaran dan komposisi penduduk

Nama Indikator	:	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Konsep Definisi	:	Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, majikan, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga/tak bayar
Rumusan	:	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Kegunaan	:	Untuk mengukur sebaran penduduk berdasarkan status pekerjaan
Intepretasi	:	1. Mengetahui variasi jumlah penduduk 2. Mengetahui besaran dan komposisi penduduk

Nama Indikator	:	Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga
Konsep Definisi	:	Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam suatu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.
Rumusan	:	$\text{Rata - rata Jumlah Anggota Keluarga} = \frac{\text{Total jumlah anggota keluarga}}{\text{jumlah keluarga}}$
Kegunaan	:	Untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam suatu keluarga dan melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil
Intepretasi	:	Semakin besar nilainya menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga semakin banyak dalam keluarga

Nama Indikator	:	Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
Konsep Definisi	:	Hubungan dengan KRT yaitu istri/pasangan KRT, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu/sopir/tukang kebun, lainnya
Rumusan	:	Jumlah penduduk berdasarkan status hubungan dengan kepala keluarga
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan status hubungan dengan kepala keluarga
Intepretasi	:	Hubungan dengan kepala keluarga paling banyak adalah sebagai anak yakni sebanyak 372.924 jiwa

Nama Indikator	:	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur
Konsep Definisi	:	Kepala keluarga adalah seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala keluarga
Rumusan	:	Jumlah kepala keluarga berdasarkan kelompok umur
Kegunaan	:	Untuk mengetahui Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur
Intepretasi	:	Jumlah kepala keluarga paling banyak berada pada kelompok umur 50 tahun keatas

Nama Indikator	:	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin
Konsep Definisi	:	Kepala keluarga adalah seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala keluarga
Rumusan	:	Jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin
Kegunaan	:	Untuk mengetahui karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan gender
Intepretasi	:	Kepala Keluarga berjenis kelamin laki-laki sebanyak 239.164 jiwa sementara berjenis kelamin perempuan sebanyak 61.369 jiwa artinya Kepala Keluarga didominasi berjenis kelamin laki-laki

Nama Indikator	:	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin
Konsep Definisi	:	Kode 1: Belum Kawin Kode 2: Kawin Kawin adalah seseorang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri. Kode 3: Cerai Hidup Cerai hidup adalah seseorang yang telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup. Kode 4: Cerai Mati Cerai mati adalah seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.
Rumusan	:	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin
Kegunaan	:	Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia dini serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan menangkap informasi status perkawinan atau hidup bersama maka dapat diperoleh informasi indikasi awal kemungkinan untuk hamil dan tingkatan risiko menjadi hamil, sebagai contoh usia pertama kali melakukan hubungan seksual, dan frekuensi hubungan seksual yang terakhir serta untuk mempelajari perubahan pola fertilitas di Indonesia. Perkawinan dini selain memiliki risiko dalam kesehatan perempuan, juga memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertolak belakang dengan undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 6.
Intepretasi	:	Jumlah kepala keluarga yang berstatus kawin sebanyak 222.220 jiwa. Dimana kepala keluarga yang berstatus kawin lebih banyak dibandingkan lainnya



Nama Indikator	:	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan
Konsep Definisi	:	Tingkat pendidikan diklasifikasikan antara lain Tidak Sekolah, Belum Tamat SD/ Sederajat, Tamat SD/ Sederajat, SLTP/ Sederajat, SLTA/ Sederajat, Diploma 1 / 2, Akademi/ Diploma 3/ Sarjana Muda, Diploma 4/ Strata 1, Strata 2, Strata 3
Rumusan	:	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan
Kegunaan	:	Untuk mengetahui tingkat pendidikan dari kepala keluarga
Intepretasi	:	Tingkat pendidikan dari kepala keluarga didominasi oleh SLTA/Sederajat yakni sebanyak 100.000 jiwa

Nama Indikator	:	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan
Konsep Definisi	:	Status Pekerjaan adalah Jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
Rumusan	:	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan
Kegunaan	:	Untuk mengetahui status pekerjaan dari kepala keluarga
Intepretasi	:	Mayoritas kepala keluarga bekerja sebagai karyawan swasta/BUMN/BUMD/Honorer

Nama Indikator	:	Jumlah Penduduk Menurut Agama Dan Aliran Kepercayaan
Konsep Definisi	:	Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya. Sedangkan aliran kepercayaan adalah paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk dalam lima agama yang resmi (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha
Rumusan	:	Jumlah penduduk berdasarkan agama dan aliran kepercayaan

Kegunaan	:	Untuk mengetahui sebaran agama dan aliran kepercayaan yang dianut oleh penduduk suatu daerah
Intepretasi	:	Sebagian besar penduduk di daerah A menganut agama islam

Nama Indikator	:	Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan
Konsep Definisi	:	Kecacatan adalah adanya disfungsi atau berkurangnya suatu fungsi yang secara objektif dapat diukur atau dilihat karena adanya kehilangan atau kelainan dari bagian tubuh atau organ seseorang
Rumusan	:	Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah penduduk yang mengalami kecacatan
Intepretasi	:	Semakin kecil angkanya menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang cacat semakin rendah

Nama Indikator	:	Jumlah Kelahiran
Konsep Definisi	:	Jumlah kelahiran yang terjadi suatu daerah pada tahun tertentu
Rumusan	:	Jumlah kelahirant
Kegunaan	:	Mengukur jumlah kelahiran
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa jumlah kelahiran pada tahun tertentu tinggi

Nama Indikator	:	Jumlah Kematian
Konsep Definisi	:	Jumlah penduduk yang meninggal pada tahun tertentu
Rumusan	:	Jumlah kematiant



Kegunaan	:	Mengukur jumlah kematian
Intepretasi	:	Semakin kecil angkanya menunjukkan bahwa jumlah kematian pada tahun tertentu rendah

Nama Indikator	:	Jumlah Pindah Datang
Konsep Definisi	:	Jumlah penduduk yang pindah datang pada tahun tertentu
Rumusan	:	Jumlah Pindah Datangt
Kegunaan	:	Mengukur jumlah penduduk yang datang ke suatu wilayah
Intepretasi	:	Jumlah pindah datang penduduk di suatu Kabupaten adalah 90 orang

Nama Indikator	:	Jumlah Pindah Keluar
Konsep Definisi	:	Jumlah penduduk yang pindah keluar pada tahun tertentu
Rumusan	:	Jumlah Pindah Keluar t
Kegunaan	:	Mengukur jumlah penduduk yang keluar dari suatu wilayah
Intepretasi	:	Jumlah pindah keluar penduduk di suatu Kabupaten adalah 80 orang

METADATA INDIKATOR

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Nama Indikator	:	Jumlah Usaha Mikro
Konsep Definisi	:	Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
Rumusan	:	Jumlah usaha mikro
Kegunaan	:	Untuk mengetahui persebaran jumlah usaha mikro di suatu daerah
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan jumlah usaha mikro semakin banyak

Nama Indikator	:	Jumlah Usaha Menengah
Konsep Definisi	:	Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Rumusan	:	jumlah usaha menengah
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah usaha menengah disuatu daerah
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut banyak berkembang usaha menengah



Nama Indikator	:	Jumlah Usaha Kecil
Konsep Definisi	:	Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
Rumusan	:	Jumlah usaha kecil
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah usaha kecil disuatu daerah
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut banyak berkembang usaha kecil

Nama Indikator	:	Persentase Koperasi Berkualitas
Konsep Definisi	:	Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki peringkat klasifikasi Sangat Baik dengan jumlah 85 sampai 100 Baik jumlah nilai 70 sampai 84
Rumusan	:	Jumlah koperasi berkualitas
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah koperasi berkualitas
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa jumlah koperasi yang berkualitas semakin banyak

Nama Indikator	:	Jumlah Koperasi Aktif
Konsep Definisi	:	Koperasi Aktif adalah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota tiga tahun berturut-turut dan atau melaksanakan kegiatan usaha.
Rumusan	:	Jumlah Koperasi Aktif
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah koperasi aktif suatu daerah
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa jumlah koperasi yang aktif semakin banyak

Nama Indikator	:	Jumlah KOPPONTREN Aktif
Konsep Definisi	:	KOPONTREN aktif adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga yang berada di dalamnya.
Rumusan	:	Jumlah KOPPONTREN Aktif
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah koppontren yang aktif
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa jumlah KOPPONTREN Aktif semakin banyak

Nama Indikator	:	Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan
Konsep Definisi	:	Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
Rumusan	:	Jumlah Ijin Usaha Simpan Pinjam Yang Diterbitkan
Kegunaan	:	Untuk membuat izin usaha simpan pinjam
Intepretasi	:	Total Jumlah Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan

Nama Indikator	:	Pengawasan Pelaksanaan Kinerja Tugas KPKS
Konsep Definisi	:	Pengawasan pelaksanaan kinerja tugas KPKS adalah kegiatan pengawasan terhadap petugas KPKS kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah UUS.
Rumusan	:	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Kinerja Tugas KPKS
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah pengawasan pelaksanaan kinerja tugas KPKS
Intepretasi	:	Total jumlah pengawasan pelaksanaan kinerja tugas KPKS



Nama Indikator	:	Penilaian Kesehatan KSP/USP
Konsep Definisi	:	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi adalah wajib dan dilaksanakan minimal setahun sekali, dan merupakan kewajiban sesuai dengan Perdekop dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
Rumusan	:	Jumlah penilaian kesehatan KSP/USP
Kegunaan	:	Untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSP dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.
Intepretasi	:	Total jumlah penilaian kesehatan KSP/USP

Nama Indikator	:	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM dan Koperasi
Konsep Definisi	:	
Rumusan	:	Jumlah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM dan Koperasi
Kegunaan	:	Untuk mengetahui Jumlah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM dan Koperasi
Intepretasi	:	Total jumlah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM dan Koperasi

Nama Indikator	:	Frekuensi Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Konsep Definisi	:	Kegiatan emberdayaan dan pengembangan Koperasi adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan UMKM secara berkelanjutan
Rumusan	:	Jumlah Frekuensi Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Kegunaan	:	Untuk mengetahui frekuensi kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
Intepretasi	:	Total frekuensi kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.



Nama Indikator	:	Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi
Konsep Definisi	:	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi adalah program pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dengan jati dirinya.
Rumusan	:	Keterangan N : Tahun ini Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi (N)- Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi (N-1)
Kegunaan	:	Untuk mengetahui Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi dari tahun sebelumnya
Intepretasi	:	Sebanyak 78% peningkatan kualitas usaha dan kelembagaan koperasi artinya kualitas usaha dan kelembagaan koperasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

Nama Indikator	:	Fasilitasi Permodalan Bagi Koperasi
Konsep Definisi	:	Permodalan bagi Koperasi adalah Setiap perkumpulan atau organisasi dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuannya memerlukan sejumlah dana. Sebagai badan usaha, koperasi memerlukan dana sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya.
Rumusan	:	Jumlah Fasilitas permodalan bagi koperasi
Kegunaan	:	Untuk meningkatkan usaha dan pendapatannya sekaligus mengembangkan koperasi.
Intepretasi	:	Total jumlah fasilitas permodalan bagi koperasi

Nama Indikator	:	Pelatihan Kewirausahaan
Konsep Definisi	:	Pelatihan Kewirausahaan adalah serangkaian upaya yang dilaksanakan dengan sengaja yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan usaha sehingga tujuan usaha dapat tercapai.
Rumusan	:	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah pelatihan kewirausahaan
Intepretasi	:	Total jumlah pelatihan kewirausahaan



Nama Indikator	:	Fasilitasi Promosi
Konsep Definisi	:	Promosi adalah kegiatan untuk menginformasikan produk atau jasa, membujuk konsumen untuk membeli serta mengingatkan para konsumen untuk tidak melupakan produk.
Rumusan	:	Jumlah Fasilitas Promosi
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah fasilitas promosi
Intepretasi	:	Total jumlah fasilitas promosi

Nama Indikator	:	Peningkatan Kapasitas SDM UKM
Konsep Definisi	:	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui strategi penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi.
Rumusan	:	Keterangan N : Tahun ini Kapasitas SDM UKM (N)-Kapasitas SDM UKM (N-1)
Kegunaan	:	Untuk mengetahui peningkatan Kapasitas SDM UKM dari tahun sebelumnya
Intepretasi	:	25% mengalami peningkatan SDM UKM, artinya SDM UKM mengalami 25% dari tahun sebelumnya

Nama Indikator	:	Bantuan Sarana Prasarana
Konsep Definisi	:	Sarana dan prasarana adalah segala jenis perlengkapan, peralatan kerja juga fasilitas yang memiliki fungsi sebagai pembantu atau alat utama untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
Rumusan	:	Jumlah bantuan sarana prasarana
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah bantuan sarana prasarana
Intepretasi	:	Total jumlah bantuan sarana prasarana

Nama Indikator	:	Fasilitasi Dukungan Permodalan (SHAT)
Konsep Definisi	:	Jumlah fasilitas dukungan permodalan sertifikat hak atas tanah
Rumusan	:	Jumlah fasilitas dukungan permodalan (SHAT)
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah fasilitas dukungan permodalan (SHAT)
Intepretasi	:	Total jumlah fasilitas dukungan permodalan (SHAT)

Nama Indikator	:	Fasilitasi Pendampingan
Konsep Definisi	:	Fasilitas Pendamping adalah seorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus yang telah lulus sebagai Fasilitator Pendamping.
Rumusan	:	Jumlah fasilitas pendampingan
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah fasilitas pendampingan
Intepretasi	:	Total jumlah fasilitas pendampingan

Nama Indikator	:	Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi (Rp.)
Konsep Definisi	:	Omset Usaha Mikro dan koperasi adalah pendapatan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Untuk mengetahui omset usaha mikro dan koperasi
Intepretasi	:	Jumlah Omset Usaha mikro dan koperasi

Nama Indikator	:	Persentase Masyarakat yang Berkoperasi
Konsep Definisi	:	Perbandingan masyarakat dengan total masyarakat yang berkoperasi.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Masyarakat yang berkoperasi})}{(\text{Total Masyarakat})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui presentase masyarakat yang berkoperasi

Intepretasi	:	35% masyarakat berkoperasi, artinya dari 100 masyarakat terdapat 35 masyarakat yang berkoperasi.
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Jumlah Peningkatan Omset Usaha Mikro dan Koperasi (Rp.)
Konsep Definisi	:	Peningkatan Omset Usaha Mikro dan koprasi adalah pendapatan yang mengalami peningkatan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Untuk mengetahui umlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi.
Intepretasi	:	25% mengalami peningkatan omset usaha mikro dan koperasi, artinya terdapat peningkatan omset usaha mikro dari tahun sebelumnya.

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
Konsep Definisi	:	Volume Usaha usaha Koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu peiode atau tahun buku tertentu.
Rumusan	:	Keterangan N : Tahun ini $\frac{(\text{Peningkatan Volume Usaha Koperasi (N)})}{(\text{Peninkatan Volume Usaha Koperasi (N-1)})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui peningkatan volume usaha koperasi
Intepretasi	:	15% peningkatan volume usaha koperasi, artinya

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro
Konsep Definisi	:	Peningkatan Omset Usaha Mikro adalah pendapatan yang mengalami peningkatan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Rumusan	:	Peningkatan Omset Usaha Mikro (N)-Peningkatan Usaha Mikro (N-1) Keterangan N : Tahun ini
Kegunaan	:	Untuk mengetahui peningkatan omset usaha mikro

Intepretasi	:	25% peningkatan omset usaha mikro, artinya dari tahun sebelumnya omset usaha mikro mengalami peningkatan 25% pada tahun ini
--------------------	---	---

Nama Indikator	:	Persentase Koperasi yang bersertifikat NIK
Konsep Definisi	:	Koperasi NIK adalah kode unik untuk mengidentifikasi data Koperasi yang pernah tercatat sebagai koperasi aktif pada ODS.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Koperasi yang bersertifikat NIK})}{(\text{Total Koperasi})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui presentase koperasi yang bersertifikat NIK
Intepretasi	:	45% koperasi yang bersertifikat NIK, artinya dari 100 koperasi terdapat 45 koperasi yang bersertifikat NIK.

Nama Indikator	:	Persentase KSP/USP yang Sehat
Konsep Definisi	:	Kesehatan KSP dan USP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Persentase KSP atau USP yang sehat})}{(\text{KSP atau USP})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui persentase KSP/USP yang sehat.
Intepretasi	:	40% KSP/USP, artinya dari 100 KSP/USP terdapat 40 KSP/USP yang sehat

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Koperasi yang Memperoleh Permodalan
Konsep Definisi	:	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Rumusan	:	$\frac{(\text{Peningkatan Usaha Mikro dan Koperasi yang memperoleh permodalan})}{(\text{Peningkatan Usaha Mikro})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui persentase peningkatan usaha mikro dan koperasi yang memperoleh permodalan
Intepretasi	:	45% peningkatan usaha mikro dan koperasi yang memperoleh permodalan, artinya dari 100 terdapat 45 peningkatan usaha mikro.

Nama Indikator	:	Persentase Penumbuhan Wirausaha Baru
Konsep Definisi	:	Wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengombinasikan sumber daya seperti keuangan, material, tenaga kerja, dan keterampilan untuk menghasilkan produk, proses produksi, bisnis, dan organisasi usaha baru.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Penumbuhan Wirausaha Baru})}{(\text{Total Wirausaha})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui penumbuhan wirausaha baru
Intepretasi	:	35% Penumbuhan Wirausaha Baru artinya dari 100 Wirausaha terdapat 35 penumbuhan wirausaha baru.

Nama Indikator	:	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Mengajukan Pembiayaan
Konsep Definisi	:	Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah yang selanjutnya disebut Program, adalah rangkaian kegiatan Pemerintah, yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Kasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) untuk pengembangan usaha mikro anggota koperasi
Rumusan	:	$\frac{(\text{Koperasi dan Usaha Mikro yang mengajukan pembiayaan})}{(\text{Total Koperasi dan Usaha Mikro})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui persentase koperasi dan usaha mikro yang mengajukan pembiayaan
Intepretasi	:	35% koperasi dan usaha mikro yang mengajukan pembiayaan, artinya dari 100 koperasi dan usaha mikro terdapat 35 yang mengajukan pembiayaan.

METADATA INDIKATOR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Nama Indikator	:	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pasuruan
Konsep Definisi	:	Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/ kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau.
Rumusan	:	Jumlah DAS
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah DAS yang ada di kabupaten Pasuruan
Intepretasi	:	9 DAS yang ada di Kabupaten Pasuruan, artinya terdapat 9 jumlah DAS di Kabupaten Pasuruan

Nama Indikator	:	Jumlah Sumber Air yang Dapat Dimanfaatkan Di Wilayah Kabupaten Pasuruan
Konsep Definisi	:	Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia.
Rumusan	:	Jumlah Sumber Air
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah sumber air dan debit yang dapat di manfaatkan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Intepretasi	:	80% Total jumlah sumber air artinya dari 100 sumber air terdapat 80 sumber air dan debit yang dapat dimanfaatkan di wilayah kabupaten pasuruan

Nama Indikator	:	Persentase Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Konsep Definisi	:	Penurunan Pencemaran lingkungan adalah menurunnya masuk makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam.
Rumusan	:	Keterangan N : Tahun ini $\frac{(\text{Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (N)})}{(\text{Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (N-1)})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui presentase penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan

Intepretasi	:	25% mengalami penurunan dan kerusakan lingkungan, artinya tahun ini pencemaran dan kerusakan lingkungan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Luas RTH yang dikelola
Konsep Definisi	:	Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Rumusan	:	$\% \text{ luas RTH} = \frac{\text{Luas RTH eksisting}}{\text{Luas RTH Total Kab. Pasuruan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola.
Intepretasi	:	Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat dari total luas wilayah perkotaan Kab. Pasuruan.

Nama Indikator	:	Persentase Kinerja Pengelolaan Persampahan
Konsep Definisi	:	Kinerja pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak mejadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Kinerja Pengelolaan Persampahan})}{(\text{Total Kinerja Pengelolaan})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui presentase kinerja pengelolaan persampahan
Intepretasi	:	85% kinerja pengelolaaan persampahan, artinya semakin tinggi presentase kinerja pengelolaan maka semakin bagus pengelolaan persampahan.

Nama Indikator	:	Jumlah Instrumen-Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Konsep Definisi	:	Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas :
		a. KLHS;
		b. Tata ruang;
		c. Baku mutu lingkungan hidup;
		d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
		e. Amdal;
		f. UKL- UPL;



		g. Perizinan;
		h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
		i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
		j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
		k. Analisis resiko lingkungan hidup;
		l. Audit lingkungan hidup;
		m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan terutama mengatur kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan menuangkan kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan.
Intepretasi	:	13 Jumlah adalah total Instrumen-Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Nama Indikator	:	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Diawasi yang Telah Memiliki Ijin Lingkungan
Konsep Definisi	:	Izin Lingkungan adalah izin yang di berikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Pelaku Usaha yang diawasi yang telah memiliki ijin lingkungan})}{(\text{Total Pelaku Usaha yang telah memiliki ijin lingkungan})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui presentase pelaku usaha/kegiatan yang diawasi yang telah memiliki ijin lingkungan
Intepretasi	:	Terdapat 65% pelaku usaha yang telah memiliki ijin lingkungan yang diawasi, artinya dari 100 total pelaku usaha yang memiliki ijin lingkungan, terdapat 65 pelaku usaha yang telah diawasi.

Nama Indikator	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Konsep Definisi	:	Indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Rumusan	:	Keterangan : IKLH Provinsi = Indeks Kualitas Lingkungan tingkat Provinsi $IKLH\ Provinsi = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kegunaan	:	Memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, maka semakin bagus kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	:	Indeks Kualitas Air (IKA)
Konsep Definisi	:	Indeks kualitas air merupakan suatu upaya menyajikan data kualitas air yang kompleks menjadi mudah dipahami terutama untuk konsumsi masyarakat awam.
Rumusan	:	Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air I dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air I yang di cantumkan dalam buku peruntukan air Keterangan : (Ci/Lij) M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij) R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij $Pl_j = \sqrt{\frac{(C_i L_{ij})_m^2 + (C_i L_{ij})_m^2}{2}}$
Kegunaan	:	Untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut.
Intepretasi	:	Indeks Kualitas Air dikembangkan dengan konsep bahwa nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan kualitas air yang semakin baik.

Nama Indikator	:	Indeks Kualitas Udara (IKU)
Konsep Definisi	:	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupa-kan gambaran atau nilai hasil transfor-masi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhu-bungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.



Rumusan	Keterangan (Menghitung Kekuatan Emisi) : Q = Kekuatan Emisi K = Konsumsi Bahan Bakar FE = Faktor Emisi (Kompilasi dari IPPC) $C_{(x,y,z)} = \frac{Q}{\pi \cdot \mu \cdot \sigma_x \cdot \sigma_y} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{H}{\sigma_x} \right)^2 \right]$ Keterangan Menghitung SUB IKU untuk CO dan Nox ai : Bobot untuk kelas ke-i, untuk CO (ai = 0,0003; 0,0006; 0,0009; 0,0012), Nox (ai = 0,025; 0,05; 0,075; 0,01) xi = Rentang C di kelas ke-i i = Klasifikasi C $IKU_{CO} = 100 - \sum_{i=1}^3 a_i \times x_i$ $IKU_{NOx} = 100 - \sum_{i=1}^3 a_i \times x_i$ $IKU = \frac{IKU_{CO} + 16 IKU_{NOx}}{27}$
Kegunaan	- Merupakan suatu nilai yang menjelaskan dan menginformasikan kondisi dan perubahan kualitas udara suatu daerah dengan cara yang lebih informatif dan mudah dipahami. - Menjadi masukan bagi pemerintah untuk perencanaan tentang udara bersih di suatu daerah
Interpretasi	Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk.

Nama Indikator	: Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Konsep Definisi	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.
Rumusan	Keterangan : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan ITH = Indeks Tutupan Hutan IPH = Indeks Performance Hutan IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah IKBA = Indeks Konservasi Badan Air IKH = Indeks Kondisi Habitat

		$IKTL=0,23 ITH+0,24 IPH+0,30 IKT+0,15 IKBA+0,08 IKH$
Kegunaan	:	Memberikan informasi tentang indeks Kualitas Tutupan Lahan IKTL)
Intepretasi	:	Semakin bertambahnya tutupan lahan yang berupa hutan, semakin baik juga indeks fungsi lindung DAS Jlantah Hulu.

Nama Indikator	:	Nilai TPA (Program Adipura)
Konsep Definisi	:	Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlingkup nasional untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Rumusan	:	Sertifikat adipura diberikan kepada kab kota yg memenuhi syarat peningkatan kinerja pengelolaan sampah yg signifikan. Nilai hasil pemantauan <73 (lebih kecil dari tujuh puluh tiga) dan ≥ 71 (lebih besar atau sama dengan dari tujuh puluh satu).
Kegunaan	:	Untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat melalui penghargaan Adipura untuk mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai Program Adipura, maka semakin bagus Program Adipura tersebut.

Nama Indikator	:	Persentase Luas Cakupan Permukiman yang Dilayani Pengangkutan Sampah
Konsep Definisi	:	Permukiman adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Cakupan Permukiman Yang dilayani Pengangkutan Sampah})}{(\text{Luas Cakupan Permukiman})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui presentase Luas Cakupan Permukiman yang dilayani pengangkutan sampah
Intepretasi	:	30% Luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah, artinya dari 100 Luas permukiman terdapat 30 cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah.

Nama Indikator	:	Persentase Terbangunnya TPA Baru
Konsep Definisi	:	Tahapan rencana pembangunan TPA terbagi atas tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan tahap pasca konstruksi/ operasional.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Untuk mengetahui tahapan pembangunan TPA Baru
Intepretasi	:	65% terbangunnya TPA baru, artinya proses pembangunan TPA baru sudah mencapai 65%

Nama Indikator	:	Jumlah TPS
Konsep Definisi	:	TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). TPS harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut: - Luas TPS sampai dengan 200 m²; - Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah (sampah organik, non-organik, kertas, B3, dan residu) - Jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen; - Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan; - Lokasinya mudah diakses; - Tidak mencemari lingkungan; - Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan - Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
Rumusan	:	Jumlah TPS
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah Tempat Pembuangan Sementara yang ada disuatu daerah
Intepretasi	:	Semakin besar angka menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah TPS yang ada disuatu daerah



Nama Indikator	:	Jumlah TPST
Konsep Definisi	:	TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Persyaratan TPST yang disebutkan dalam Permen No. 2 tahun 2013 pasal 32 harus memenuhi persyaratan teknis seperti: - Luas TPST lebih besar dari 20.000 m²; - Penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA; - Jarak TPST ke pemukiman terdekat paling sedikit 500 m; - Pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3); dan - Fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga
Rumusan	:	Jumlah TPST
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang ada disuatu daerah
Intepretasi	:	Semakin besar angka menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah TPS yang ada disuatu daerah

Nama Indikator	:	Persentase Kepemilikan Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan Sesuai Peraturan Perundangan Penegakan Hukum Lingkungan
Konsep Definisi	:	Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan
Rumusan	:	$\frac{\text{Kepemilikan dokumen dan ijin lingkungan sesuai peraturan perundangan penegakan hukum lingkungan}}{\text{Kepemilikan dokumen dan ijin lingkungan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui presentase kepemilikan dokumen lingkungan dan ijin lingkungan sesuai peraturan perundangan hukum lingkungan

Intepretasi	:	55% kepemilikan dokumen lingkungan dan ijin lingkungan sesuai undang-undang tentang lingkungan, artinya dari 100 kepemilikan dokumen lingkungan dan ijin lingkungan terdapat 55 kepemilikan dokumen lingkungan dan ijin lingkungan sesuai peraturan perundangan penegakan hukum lingkungan
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Ruang Luas Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan
Konsep Definisi	:	Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
Rumusan	:	$\text{Luas RTH (Ha)} = P \text{ area lokasi RTH} \times L \text{ area lokasi RTH}$
Kegunaan	:	untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
Intepretasi	:	Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Nama Indikator	:	Penurunan Tingkat Pencemaran
Konsep Definisi	:	Penurunan Pencemaran lingkungan adalah menurunnya masuk makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam.
Rumusan	:	Keterangan N : Tahun ini $\frac{(\text{Penurunan tigtat pencemaran (N)})}{(\text{Penurunan tingkat pencemaran (N-1)})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui tingkat penurunan pencemaran tahun ini dari tahun sebelumnya.
Intepretasi	:	25% mengalami penurunan dan kerusakan lingkungan, artinya tahun ini pencemaran dan kerusakan lingkungan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

METADATA INDIKATOR

DINAS TENAGA KERJA





Nama Indikator	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Konsep Definisi	:	Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas}} \times 100$
Kegunaan	:	Untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.
Intepretasi	:	Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Nama Indikator	:	Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK)
Konsep Definisi	:	Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Rumusan	:	$\text{Angkatan Kerja} = \text{Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja} + \text{Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang pengangguran}$
Kegunaan	:	Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.
Intepretasi	:	Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Nama Indikator	:	Rasio Penduduk yang Bekerja
Konsep Definisi	:	Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.
Rumusan	:	$\text{Rasio Penduduk Yang Bekerja} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 tahun yang Bekerja}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
Kegunaan	:	Untuk mengidentifikasi jumlah penduduk usia yang bekerja dengan angkatan kerja agar mengetahui gambaran permintaan tenaga kerja



Intepretasi	:	95% rasio penduduk yang bekerja di daerah A yang artinya 100 penduduk terdapat 95 yang bekerja.
Nama Indikator	:	Rasio Kesempatan Kerja
Konsep Definisi	:	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas).
Rumusan	:	$RKJ = \frac{\text{Jumlah penduduk usia kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas)}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengidentifikasi jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia
Intepretasi	:	Semakin tinggi persentasenya mengindikasikan kesempatan kerja semakin tinggi

Nama Indikator	:	Pelatihan Berbasis Masyarakat
Konsep Definisi	:	Jumlah tenaga yang mendapat pelatihan kerja berbasis masyarakat
Rumusan	:	$\frac{\text{Usaha yang pekerjanya pernah atau sedang mengikuti Pelatihan berbasis Masyarakat}}{\text{Seluruh Pelatihan}}$
Kegunaan	:	Untuk mengukur jumlah tenaga pelatihan kerja berbasis masyarakat
Intepretasi	:	Semakin tinggi jumlah tenaga pelatihan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Nama Indikator	:	Pelatihan Berbasis Kewirausahaan
Konsep Definisi	:	Hasil bagi antara Usaha yang tenaga kerjanya Pernah/Sedang Mengikuti Pelatihan/Penyuluhan dibagi dengan seluruh Usaha
Rumusan	:	$\frac{\text{Usaha yang pekerjanya pernah atau sedang mengikuti Pelatihan}}{\text{Seluruh Usaha}}$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui Persentase Usaha/Perusahaan yang tenaga kerjanya Pernah/ Sedang Mengikuti Pelatihan/Penyuluhan
Intepretasi	:	Semakin tinggi persentase pekerja yang pernah/sedang mengikuti pelatihan/penyuluhan menunjukkan semakin besar pekerjanya yang terampil.



Nama Indikator	:	Pelatihan di UPT LKD Dinas Tenaga Kerja
Konsep Definisi	:	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan di UPT LKD Dinas Tenaga Kerja meliputi Teknologi Mekanik, Listrik, Otomotif, Tata Niaga, Bangunan, Pertanian, Aneka Kejuruan, Produktivitas.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah orang yang mengikuti pelatihan di UPT LKD Dinas Tenaga Kerja}}{t}$ Keterangan : t = tahun ke-t
Kegunaan	:	Terwujudnya tenaga kerja yang terampil/kompeten untuk meningkatkan produktivitas kerja dan perluasan kesempatan kerja
Intepretasi	:	Semakin tinggi yang mengikuti pelatihan untuk mengukur potensi, maka semakin banyak peserta yang banyak berpotensi untuk siap bekerja.

Nama Indikator	:	Pencari Kerja yang Ditempatkan
Konsep Definisi	:	Pencari Kerja yang Ditempatkan adalah Angkatan kerja yang terdaftar dan Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan yang dihasilkan dari perhitungan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar kali 100.
Rumusan	:	$A = \frac{\text{Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100$
Kegunaan	:	Dapat menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan yang dimilikinya dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.
Intepretasi	:	Mempermudah penempatan kerja sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan yang dimilikinya

Nama Indikator	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
Konsep Definisi	:	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumusan	:	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran (Orang)}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja (Orang)}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.
Intepretasi	:	Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Nama Indikator	:	Persentase Penduduk yang Bekerja
Konsep Definisi	:	Penduduk yang bekerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan
Rumusan	:	$\frac{\text{Penduduk yang Bekerja}}{\text{Total Penduduk}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.
Intepretasi	:	Semakin tinggi persentasenya menunjukkan semakin banyak penduduk yang bekerja



Nama Indikator	:	Persentase Kenaikan Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi
Konsep Definisi	:	Presentase pelatihan yang memperhatikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan di tempat kerja standar Kompetensi dijelaskan oleh Kriteria Unjuk Kerja.
Rumusan	:	$\frac{\text{Kenaikan Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi}}{\text{Total Pencari Kerja}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Agar dapat melakukan pekerjaan dengan kompeten.
Intepretasi	:	Semakin naik pencari kerja yang mengikuti pelatihan tenaga kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.
Nama Indikator	:	Persentase Penanganan Kasus Hubungan Industrial yang Diselesaikan/Anjuran
Konsep Definisi	:	Hubungan Industrial adalah Suatu sistem atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, unsur Karyawan dan Pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia
Rumusan	:	$\frac{\text{Kasus yang terlayani}}{\text{Total Kasus}} \times 100\%$
Kegunaan	:	untuk menghitung persentase penanganan kasus hubungan industrial yang meliputi unsur pengusaha, unsur karyawan dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia
Intepretasi	:	Persentase penanganan kasus hubungan industrial yang diselesaikan/anjuran 45% artinya dari 100 keseluruhan kasus terdapat 45 kasus yang terlayani

Nama Indikator	:	Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Baru
Konsep Definisi	:	Proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya.
Rumusan	:	$\frac{\text{Peserta Pelatihan yang menjadi wirausaha baru}}{\text{Total Peserta Pelatihan}} \times 100\%$

Kegunaan	:	Untuk mengembangkan keterampilan yang unik dan berpikir di luar kebiasaan. Selain itu, menciptakan peluang, dan merangsang ekonomi.
Intepretasi	:	Persentase Peserta Pelatihan yang menjadi wirausaha baru 30% artinya dari 100 peserta yang mengikuti pelatihan, terdapat 30 yang menjadi wirausaha baru.

Nama Indikator	:	Jumlah Peserta Pelatihan yang Lulus Uji Kompetensi
Konsep Definisi	:	Peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi adalah peserta yang telah mengikuti proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu dan apabila peserta yang berhasil mencapai persyaratan kompetisi maka dinyatakan berkompeten atau lulus.
Rumusan	:	<i>= Jumlah Peserta Pelatihan Yang Lulus Uji Kompetensi</i>
Kegunaan	:	Untuk mengetahui apakah kompetensi yang dimiliki peserta telah memenuhi standar kompetensi yang ditentukan dan sebagai upaya peningkatan kompetensi Peserta Pelatihan yang lebih handal dan profesional di bidangnya.
Intepretasi	:	750 dari 1000 peserta yang mengikuti pelatihan artinya 750 peserta pelatihan lulus uji kompetensi dan dinyatakan berkompeten.

Nama Indikator	:	Tercapainya Nilai SAKIP
Konsep Definisi	:	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan
Rumusan	:	<i>Nilai Sakip Pada Tahun Berjalan – Nilai Sakip Pada Tahun Sebelumnya</i>
Kegunaan	:	Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, Meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas organisasi yang lebih baik dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi serta

		Memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada suatu instansi pemerintah.

Nama Indikator	:	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang Bisa Di Selesaikan
Konsep Definisi	:	Kasus-kasus perselisihan yang sering terjadi antara karyawan dengan pihak manajemen perusahaan meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Rumusan	:	<i>Jumlah Kasus Hubungan Industrial Yang Bisa Diselesaikan_t</i> Keterangan : t = tahun ke-t
Kegunaan	:	Membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara karyawan dan pihak manajemen perusahaan
Intepretasi	:	Dari 80% kasus hubungan perindustrian artinya dari 100 kasus terdapat 80 kasus yang dapat terselesaikan.

Nama Indikator	:	Jumlah Calon Transmigrasi yang Di Latih
Konsep Definisi	:	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih yang melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat/daerah yang lain.
Rumusan	:	<i>Jumlah Calon Transmigrasi Yang Dilatih_t</i> Keterangan : t = tahun ke-t
Kegunaan	:	Adanya perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain agar terjadi pemerataan sumber daya tenaga kerja.
Intepretasi	:	dari 65% calon transmigrasi yang dilatih artinya dari 100 peserta calon transmigrasi terdapat 65 calon yang terlatih

METADATA INDIKATOR

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN





Nama Indikator	:	Revitalisasi Pasar Daerah
Konsep Definisi	:	Revitalisasi pasar daerah merupakan bentuk perbaikan kualitas ruang publik sebagai kebijakan pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat daerah.
Rumusan	:	Jumlah pasar yang direvitalisasi
Kegunaan	:	Untuk mempertahankan pedagang kecil dan tradisional ditengah pesatnya perkembangan pasar dan toko-toko modern.
Intepretasi	:	Semakin tinggi Revitalisasi Pasar Daerah untuk membuat pedagang kecil maka semakin sejahtera dengan memerhatikan standar kenyamanan pembeli yang semakin tinggi saat ini.

Nama Indikator	:	Jumlah UTTP (Unit)
Konsep Definisi	:	UTTP adalah Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengujian UTTP serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; 22.
Rumusan	:	Jumlah UTTP yang ditera ulang (Tahun n)
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah UTTP
Intepretasi	:	Semakin banyak Jumlah UTTP maka semakin tinggi fungsi dan kegunaan UTTP

Nama Indikator	:	Restribusi (Rp.)
Konsep Definisi	:	Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (berdasarkan UU No. 34 tahun 2000)
Rumusan	:	Jumlah Retribusi Tera Tera Ulang (Tahun n)
Kegunaan	:	Sebagai sumber pendapatan daerah, Pengatur kegiatan ekonomi daerah, Sarana stabilitas ekonomi daerah dan Pemerataan pembangunan dan pendapatan Masyarakat



Intepretasi	:	Retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Hal itu berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.
--------------------	---	---

Nama Indikator	:	Penerbitan Surat Keterangan Asal
Konsep Definisi	:	Surat Keterangan Asal atau Certificate of Origin) disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).
Rumusan	:	Jumlah Penerbitan SKA (Tahun n)
Kegunaan	:	Untuk mendapatkan preferensi berupa penurunan atau pembebasan tarif bea masuk ke suatu atau kelompok negara.
Intepretasi	:	Surat Keterangan Asal (SKA) adalah dokumen penyerta barang pada saat barang akan diekspor ke negara tertentu yang mana negara penerima barang tersebut sudah menyepakati suatu perjanjian untuk memberikan suatu kemudahan bagi barang dari Indonesia seperti kemudahan berupa keringanan bea masuk atau preferensi berupa pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk impor yang dikenakan oleh negara tertentu.

Nama Indikator	:	Penyelenggaraan Pameran Dagang
Konsep Definisi	:	Pameran dagang adalah suatu jenis pameran yang diselenggarakan untuk beberapa industri tertentu, seperti industri perdagangan dan manufaktur.
Rumusan	:	Jumlah Pameran Dagang (Tahun n)
Kegunaan	:	untuk saling bertukar informasi dan juga melakukan negosiasi perdagangan.
Intepretasi	:	Semakin banyak penyelenggaraan pameran dagang, maka semakin tinggi informasi tentang perdagangan.

Nama Indikator	:	Jumlah Pameran Dagang Nasional
Konsep Definisi	:	Pameran dagang Nasional adalah suatu jenis pameran yang diselenggarakan oleh beberapa wilayah luar provinsi untuk beberapa industri tertentu, seperti industri perdagangan dan manufaktur.
Rumusan	:	Jumlah Pameran Dagang Nasional (Tahun n)
Kegunaan	:	Untuk saling bertukar informasi dan juga melakukan negosiasi perdagangan.
Intepretasi	:	Semakin banyak penyelenggaraan pameran dagang, maka semakin tinggi informasi tentang perdagangan.

Nama Indikator	:	Jumlah Pameran Dagang Lokal
Konsep Definisi	:	Pameran dagang lokal adalah jenis pameran yang dirancang untuk industri tertentu, seperti manufaktur dan perdagangan antara pembeli dan produsen lokal.
Rumusan	:	Jumlah Pameran Dagang Lokal (Tahun n)
Kegunaan	:	Untuk saling bertukar informasi dan juga melakukan negosiasi perdagangan.
Intepretasi	:	Semakin banyak penyelenggaraan pameran dagang, maka semakin tinggi informasi tentang perdagangan.

Nama Indikator	:	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Konsep Definisi	:	Usaha sektor informal yaitu pedagang kaki lima, pedagang kaki lima merupakan pedagang yang memiliki modal relatif kecil, dan juga biasa bekerja dengan waktu yang lama dan kurang teratur.
Rumusan	:	Keterangan : N : Tahun ke-n $\frac{\text{Jumlah Kelompok Pedagang atau Usaha informal yang mendapat binaan pemda pada tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pedagang atau usaha informal}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam membina kelompok pedagang/usaha informal mengingat pentingnya peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan dan pengembangan kelompok pedagang/usaha informal.
Intepretasi	:	Semakin tingginya persaingan antar pedagang dan mengakibatkan semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh setiap usaha di sektor informal.



Nama Indikator	:	Jumlah Pasar Rakyat Berbasis Elektronik
Konsep Definisi	:	Pasar Rakyat Berbasis Elektronik adalah sistem pembayaran retibusi antara pedagang dengan petugas pengelola pasar menggunakan mekanisme elektronik
Rumusan	:	Jumlah Pasar Rakyat Berbasis Elektronik (Tahun n)
Kegunaan	:	Untuk megetahui jumlah pasar rakyat berbasis elektonik
Intepretasi	:	Semakin berkembangnya pasar elektronik maka semakin canggih perkembangan arus teknologi dan informasi digital.

Nama Indikator	:	Rasio Pelayanan Tera/Tera Ulang yang Diterbitkan Terhadap Seluruh Pengajuan
Konsep Definisi	:	Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
Rumusan	:	$\frac{\text{Rasio Jml UTTP Yang Ditera Ulang (Tahun n)}}{\text{Rasio Jml Potensi UTTP}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui rasio pelayanan tera/tera ulang yang diterbitkan terhadap seluruh pengajuan.
Intepretasi	:	Terdapat 30 rasio pelayanan tera/tera ulang yang diterbitkan terhadap seluruh pengajuan dari Jumlah total Peayanan Tera

Nama Indikator	:	Meningkatnya Pengelolaan Pasar (Jumlah Pengelolaan Pasar)
Konsep Definisi	:	Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Pasar.
Rumusan	:	Jumlah Pengelolaan Pasar (Tahun n)
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah pengelolaan pasar
Intepretasi	:	Jika pengelolaan laba efisien maka semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi pengelolaan labanya.

Nama Indikator	:	Peningkatan Ketertiban PKL dan Asongan
Konsep Definisi	:	Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan adalah keteraturan PKL dalam menjaga kebersihan kota dan kesesuaian dengan aturan dan Qanun yang sudah ditetapkan.
Rumusan	:	Keterangan N : Tahun ini $\frac{\text{Jml PKL dan Asongan yang ditertibkan (Tahun } n\text{)}}{\text{Jml PKL dan Asongan yang ditertibkan Tahun } (n - 1)} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui peningkatan ketertiban pedagang kaki lima dan asongan
Intepretasi	:	Semakin tinggi ketertiban pedagang kaki lima dan asongan maka semakin bagus dalam menjaga kebersihan dan kesesuaian aturan

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan IKM yang Terbina
Konsep Definisi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Rumusan	:	Keterangan N : Tahun ini $\frac{\text{Jml IKM yang terbina (tahun } n\text{)}}{\text{Jml keseluruhan IKM yang ada di Kab. Pasuruan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui persentase peningkatan IKM yang terbina dari tahun sebelumnya
Intepretasi	:	35% IKM yang Terbina mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, artinya dari 100 Peningkatan IKM yang terbina mengalami 35 peningkatan.

Nama Indikator	:	Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Konsep Definisi	:	Industri Kecil dan Menengah dalam Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri sebagai berikut: 1) Industri Kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan mempunyai nilai investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tanah dan bangunan yang dimaksud adalah tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha. 2) Industri Menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan mempunyai nilai investasi paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar atau mempekerjakan paling sedikit 20 orang dan mempunyai nilai investasi paling banyak dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar).
Rumusan	:	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (Tahun n)
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah industri kecil menengah suatu daerah
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan semakin banyak jumlah Industri Kecil dan Menengah

Nama Indikator	:	Indeks Daya Beli
Konsep Definisi	:	Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.
Rumusan	:	$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$ Keterangan: PPP_j menyatakan paritas dayabeli penduduk di daerah j; P_{ij} menyatakan harga komoditas i di wilayah referensi; P_{ik} menyatakan harga komoditas i di provinsi/kabupaten/kota ke-j; dan m menyatakan jumlah komoditas.
Kegunaan	:	Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.



Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa pendapatan perkapita masyarakat mengalami peningkatan sehingga kemampuan untuk melakukan konsumsi meningkat
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Nilai Transaksi Perdagangan
Konsep Definisi	:	Nilai transaksi perdagangan diperoleh dari omzet perdagangan melalui kegiatan pameran dan fasilitasi kemitraan
Rumusan	:	Nilai Transaksi Perdagangan (Tahun n)
Kegunaan	:	Untuk mengetahui nilai transaksi jual beli.
Intepretasi	:	Nilai transaksi merupakan total pembayaran atas barang yang diimpor yang telah dibayar atau akan dibayar pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor

Nama Indikator	:	Persentase Alat Ukur yang Terstandarisasi
Konsep Definisi	:	Alat pembanding yang standar ukurannya diakui oleh nasional dan internasional
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah UTPP Betanda Tera Sah Yang Berlaku (Tahun n)}}{\text{target UTPP (Tahun n)}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui presentase alat ukur yang terstandarisasi.
Intepretasi	:	67% alat ukur yang terstandarisasi, artinya dari 100, terdapat 67 alat ukur yang terstandarisasi.

Nama Indikator	:	PDRB Sektor Industri
Konsep Definisi	:	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri adalah indikator yang menggambarkan keadaan perekonomian penduduk di suatu wilayah/daerah berdasarkan sektor industri.
Rumusan	:	Jumlah PDRB Sektor Industri (Tahun n)

Kegunaan	:	Untuk mengetahui pertumbuhan sektor industri suatu daerah dan bahan analisis produktivitas secara sektoral.
Intepretasi	:	Semakin tinggi produk domestik regional bruto sektor industri maka semakin bagus PDRB Sektor Industri.

Nama Indikator	:	Nilai Produksi Sektor Industri
Konsep Definisi	:	Nilai yang menggambarkan perkembangan produksi sektor industri pada periode tertentu dibandingkan dengan periode dasar.
Rumusan	:	Nilai Produksi Sektor Industri (Tahun n)
Kegunaan	:	Mengetahui perkembangan produksi sektor industri dalam level KBLI 2 (dua) digit baik secara nasional maupun provinsi.
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai tambah, maka efisiensi kinerja industri semakin meningkat sehingga keuntungan yang didapat akan semakin besar.

Nama Indikator	:	Perkembangan Industri Kecil Menengah Besar
Konsep Definisi	:	Industri Kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan mempunyai nilai investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tanah dan bangunan yang dimaksud adalah tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha. 2) Industri Menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan mempunyai nilai investasi paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar atau mempekerjakan paling sedikit 20 orang dan mempunyai nilai investasi paling banyak dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar). 3) Industri Besar merupakan Industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
Rumusan	:	Jumlah Industri Kecil Menengah Besar (Tahun n)
Kegunaan	:	Untuk mengetahui perkembangan Industri Kecil Menengah Besar



Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa daerah tersebut banyak berkembang Industri Kecil Menengah Besar
--------------------	---	--

METADATA INDIKATOR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Nama Indikator	:	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Wilayah Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kecamatan
Konsep Definisi	:	Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar yang sukar dikendalikan serta terjadi di tempat yang tidak dikehendaki dan bersifat merugikan
Rumusan	:	Berdasarkan Pendataan
Kegunaan	:	Mengukur jumlah kejadian bencana kebakaran di Wilayah Kabupaten Pasuruan berdasarkan kecamatan
Intepretasi	:	Jumlah kejadian bencana kebakaran di Wilayah Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Bangil adalah satu kali

Nama Indikator	:	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Terhadap Masyarakat dan Badan Usaha
Konsep Definisi	:	Penyuluhan terhadap masyarakat adalah bentuk usaha pendidikan non-formal kepada kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan perbaikan kesejahteraan
Rumusan	:	Berdasarkan pendataan
Kegunaan	:	Mengukur Jumlah kegiatan pembinaan dan penyuluhan Trantibum terhadap masyarakat dan badan usaha
Intepretasi	:	Jumlah kegiatan pembinaan dan penyuluhan Trantibum terhadap masyarakat dan badan usaha adalah 20 kegiatan



Nama Indikator	:	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Narkoba/Minuman Keras (kali)
Konsep Definisi	:	Penyuluhan narkoba/minuman keras adalah suatu kegiatan mendidik kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan dan informasi-informasi mengenai narkoba/minuman keras agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya
Rumusan	:	Berdasarkan pendataan
Kegunaan	:	Mengukur jumlah kegiatan penyuluhan narkoba/minuman keras
Intepretasi	:	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Narkoba/Minuman Keras adalah 17 kali

Nama Indikator	:	Persentase Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
Konsep Definisi	:	Penindakan pelanggaran peraturan daerah adalah tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegakan dan/atau penyegelan yang dilakukan oleh petugas kepada pelanggar dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa banyak pelanggaran perda yang ditindaklanjuti
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan semakin banyak pelanggaran perda yang ditindaklanjuti

Nama Indikator	:	Persentase Gangguan Tibumtranmas yang Ditangani
Konsep Definisi	:	Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah gangguan terhadap situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah gangguan tibumtranmas yang ditangani}}{\text{Jumlah seluruh gangguan tibumtranmas}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio gangguan tibumtranmas yang ditangani
Intepretasi	:	Persentase gangguan tibumtranmas yang ditangani adalah 50%. Ini berarti setengah dari seluruh gangguan tibumtranmas telah ditangani



Nama Indikator	:	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat
Konsep Definisi	:	Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial untuk membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Perlindungan masyarakat suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah potensi anggota linmas yang diberdayakan}}{\text{Jumlah satu RT satu Linmas se – Kabupaten Pasuruan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur Rasio Anggota Linmas yang aktif dalam mengendalikan Keamanan Lingkungan di daerahnya
Intepretasi	:	Persentase Anggota Linmas yang aktif dalam mengendalikan Keamanan Lingkungan di daerahnya

Nama Indikator	:	Persentase Anggota Linmas yang Teregister KTA
Konsep Definisi	:	KTA Linmas adalah tanda khusus sebagai identitas diri anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah anggota linmas yang teregister KTA}}{\text{Jumlah seluruh anggota linmas}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio anggota linmas yang teregister KTA
Intepretasi	:	Persentase anggota linmas yang teregister KTA adalah 50%. Ini berarti setengah dari seluruh anggota linmas telah teregister KTA

Nama Indikator	:	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran
Konsep Definisi	:	Penanganan kebakaran adalah penangan terhadap suatu nyala api, baik kecil atau besar yang sukar dikendalikan serta terjadi di tempat yang tidak dikehendaki dan bersifat merugikan
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah penanganan kejadian kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$



Kegunaan	:	Mengukur tingkat penanganan kejadian kebakaran
Intepretasi	:	Persentase penanganan kejadian kebakaran adalah 50%. Artinya setengah dari seluruh kejadian kebakaran telah mendapat penanganan

Nama Indikator	:	Persentase Penanganan Peristiwa Kebakaran
Konsep Definisi	:	Penanganan kebakaran adalah penangan terhadap suatu nyala api, baik kecil atau besar yang sukar dikendalikan serta terjadi di tempat yang tidak dikehendaki dan bersifat merugikan
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah penanganan peristiwa kebakaran}}{\text{Jumlah peristiwa kebakaran}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat penanganan peristiwa kebakaran
Intepretasi	:	Persentase penanganan peristiwa kebakaran adalah 50%. Artinya setengah dari seluruh peristiwa kebakaran telah mendapat penanganan

Nama Indikator	:	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Konsep Definisi	:	Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial untuk membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Perlindungan masyarakat suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah siskamling yang diberdayakan}}{\text{Jumlah Pos Kamling}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio siskamling yang diberdayakan
Intepretasi	:	Persentase siskamling yang diberdayakan



Nama Indikator	:	Persentase Penegakan Perda
Konsep Definisi	:	Penegakan Perda dimaksudkan untuk membantu kepala daerah menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang ditindak}}{\text{Jumlah sasaran penegakan Perda}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat penegakan Perda
Intepretasi	:	Persentase penegakan Perda adalah 50%. Ini berarti setengah dari seluruh sasaran penegakan Perda telah ditindak

Nama Indikator	:	Persentase Pelanggaran Perda
Konsep Definisi	:	Pelanggaran perda adalah perbuatan yang bersifat melawan, melanggar dan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kesadaran
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda}}{\text{Jumlah pelanggaran perda}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat pelanggaran Perda
Intepretasi	:	Jumlah pelanggaran perda tahun 2020 sebanyak 801 sedangkan jumlah pelanggaran tahun 2019 sebanyak 1.085. Untuk Persentase Pelanggaran Perda pada tahun 2020 mencapai 73,82 %

Nama Indikator	:	Persentase Pelanggaran Perda yang Diselesaikan
Konsep Definisi	:	Pelanggaran perda yang diselesaikan adalah perbuatan yang bersifat melawan, melanggar dan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kesadaran dan telah mendapat tindakan penyelesaian dari petugas yang berwenang
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan}}{\text{Jumlah penindakan pelanggaran Perda}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio pelanggaran Perda yang telah diselesaikan



Intepretasi	:	Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan adalah 25%. Artinya seperempat dari seluruh pelanggaran Perda telah mendapat tindakan penyelesaian dari petugas
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Persentase Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang Dilatih
Konsep Definisi	:	Pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah personil SatPol PP yang dilatih}}{\text{Jumlah seluruh personil SatPol PP}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang dilatih
Intepretasi	:	Persentase personil Satuan Polisi Pamong Praja yang dilatih adalah 50%. Artinya setengah dari seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan pelatihan

Nama Indikator	:	Persentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi di Bidang Cukai
Konsep Definisi	:	Sosialisasi di bidang cukai adalah sebuah proses memperkenalkan sistem cukai pada seseorang atau sekelompok orang
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah penjual rokok / pengedar rokok yang mengikuti sos}}{\text{Jumlah penjual rokok / pengedar rokok yang akan diberikan s}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio masyarakat yang mengikuti sosialisasi di bidang cukai
Intepretasi	:	Persentase penduduk yang mengikuti sosialisasi di bidang cukai adalah 25%. Ini berarti 25 dari 100 penduduk mengikuti sosialisasi di bidang cukai

Nama Indikator	:	Persentase Pengumpulan Terhadap Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Konsep Definisi	:	Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah penjual / pengedar rokok palsu yang ditemukan}}{\text{Jumlah penjual rokok / pengedar rokok yang menjadi target operasi}} \times 100\%$



Kegunaan	:	Mengukur rasio jumlah penjual/pengedar rokok ilegal
Intepretasi	:	Persentase jumlah pengumpulan barang kena cukai ilegal

Nama Indikator	:	Persentase Penanganan Keamanan Lingkungan
Konsep Definisi	:	Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah gangguan terhadap situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah Obyek vital yang diamankan}}{\text{Jumlah obyek vital}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur penanganan keamanan pada obyek vital pemerintah kabupaten pasuruan
Intepretasi	:	Persentase penanganan keamanan lingkungan pada obyek vital Pemkab Pasuruan

METADATA INDIKATOR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA
AIR DAN TATA RUANG

The background of the page features a dark green upper section and a white lower section. A large, flowing, wavy shape in a medium green color separates the two, starting from the left edge and curving towards the right. This shape is bordered by thin white lines, creating a layered, wave-like effect.



Nama Indikator	:	Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan
Konsep Definisi	:	Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Membantu menyuburkan tanah melalui bahan – bahan pangan kandungan yang di bawa oleh air.
Intepretasi	:	Semakin tinggi kondisi jaringan irigasi, maka semakin baik saluran bangunan yang di perlukan untuk pengaturan air irigasi.

Nama Indikator	:	Rasio Jaringan Irigasi
Konsep Definisi	:	Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya.
Rumusan	:	Panjang saluran irigasi / Luas lahan budidaya pertanian
Kegunaan	:	Untuk mengetahui rasio jaringan irigasi
Intepretasi	:	

Nama Indikator	:	Luas Daerah Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
Konsep Definisi	:	Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi dalam kondisi baik.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Untuk mengetahui luas daerah irigasi di suatu kabupaten dalam kondisi baik
Intepretasi	:	Semakin banyak luas daerah irigasi disuatu kabupaten dalam kondisi baik, maka dalam suatu wilayah kabupaten tersebut terdapat hamparan tanah yang mendapat air dari satu jaringan tersebut dalam kondisi baik.



Nama Indikator	:	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
Konsep Definisi	:	Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
Rumusan	:	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Jaringan Irigasi}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik.
Intepretasi	:	76% panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik, artinya dari 100 jaringan irigasi, terdapat 76 panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik.

Nama Indikator	:	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
Konsep Definisi	:	Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama alokasi Air di atas semua kebutuhan.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Air irigasi untuk pertanian adalah sebagai pengaliran air yang ada di lahan persawahan.
Intepretasi	:	dapat memudahkan lahan pertanian untuk memperoleh air agar pada saat musim kemarau lahan tidak mengalami kekeringan karena pasokan air tetap terjaga.

Nama Indikator	:	Persentase Penanganan Darurat Banjir
Konsep Definisi	:	Penanganan darurat banjir adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana banjir untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan
Rumusan	:	$\frac{\text{Penanganan darurat banjir}}{\text{Penanganan darurat bencana alam}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Masyarakat korban banjir dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, korban banjir yang mengalami psikososial dapat didampingi aktifitasnya, wilayah bencana alam/sosial banjir dapat diidentifikasi, sehingga dapat dilakukan mitigasi bencana



Intepretasi	:	80% penanganan darurat banjir, artinya dari 100 penanganan darurat bencana alam terdapat 80 penanganan darurat banjir.
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Ketersediaan Lahan untuk Pembangunan Embung
Konsep Definisi	:	Embung adalah bangunan konservasi berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air hujan, air limpasan, mata air dan/atau sumber air lainnya, yang terbuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal atau geomembran untuk dipergunakan mendukung usaha pertanian, peternakan maupun perikanan.
Rumusan	:	JUMLAH LAHAN UNTUK PENGADAAN TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG (OLEH BBWS)
Kegunaan	:	Untuk mengetahui ketersediaan lahan untuk pembangunan embung.
Intepretasi	:	Semakin banyak lahan untuk pembangunan embung maka semakin bagus untuk menmpung air hujan, air limpasan, mata air, dan sumber air lainnya.

Nama Indikator	:	Jumlah Volume Ketersediaan Air Baku
Konsep Definisi	:	Air baku adalah adalah air bersih yang dipakai untuk keperluan air minum, rumah tangga dan industri.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah volume ketersediaan air baku
Intepretasi	:	Semakin banyak volume ketersediaan air baku, maka semakin bagus untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan industri.

Nama Indikator	:	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang yang Dibutuhkan
Konsep Definisi	:	Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal.
Rumusan	:	$\frac{\text{Penyusunan dokumen rencana tata ruang yang dibutuhkan}}{\text{Penyusunan dokumen rencana tata ruang}} \times 100\%$



Kegunaan	:	Agar fungsi yang ditetapkan antar-dokumen tata ruang tetap sinergis dan tidak saling bertentangan karena dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan penjabaran dan pendetilan dari rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro.
Intepretasi	:	80% penyusunan dokumen rencana tata ruang yang dibutuhkan, artinya dari 100 penyusunan dokumen rencana tata ruang terdapat 80 penyusunan dokumen rencana tata ruang yang dibutuhkan.

Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
Konsep Definisi	:	Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi pengendalian dan pemanfaatan ruang}}{\text{Total jumlah pengendalian dan pemanfaatan ruang}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui persentase pengendalian Dn pemanfaatan ruang.
Intepretasi	:	50% rekomendasi pengendalian dan pemanfaatan ruang, artinya dari 100 pengendalian dan pemanfaatan ruang terdapat 50 yang direkomendasikan.

Nama Indikator	:	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
Konsep Definisi	:	Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah jaringan irigasi}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik.
Intepretasi	:	65% panjang irigasi dalam kondisi baik, artinya dari 100 panjang jaringan irigasi terdapat 65 panjang irigasi dalam kondisi baik.

Nama Indikator	:	Jumlah Volume Ketersediaan Air Baku Sawah
Konsep Definisi	:	Air baku adalah air yang menjadi bahan baku utama air olahan untuk kegunaan tertentu.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah volume ketersediaan air baku sawah
Intepretasi	:	Semakin banyak jumlah volume ketersediaan air baku sawah, maka semakin bagus air yang menjadi bahan baku utama air olahan untuk kegunaan tertentu.

Nama Indikator	:	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang
Konsep Definisi	:	Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal.
Rumusan	:	$\frac{\text{Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang}}{\text{Rencana tata ruang}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui presentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.
Intepretasi	:	75% kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, artinya dari 100 rencana tata ruang terdapat 75 kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.

Nama Indikator	:	Menurunnya Luas Daerah Genangan Banjir
Konsep Definisi	:	Daerah genangan banjir adalah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Nilai ini digunakan untuk mengetahui seberapa luas penurunan daerah genangan banjir.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai luas penurunan daerah genangan banjir, maka semakin luas daerah yang mengalami penurunan geangan banjir.



Nama Indikator	:	Indeks Ketahanan Air
Konsep Definisi	:	Ketahanan air adalah kemampuan masyarakat (penduduk) untuk menjaga.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Untuk mengetahui indeks ketahanan air
Intepretasi	:	Semakin tinggi ketahanan air berarti semakin tinggi kemampuan masyarakat untuk menjaga.

Nama Indikator	:	Persentase Ketersediaan & Pemenuhan Air Baku
Konsep Definisi	:	Air baku adalah air yang menjadi bahan baku utama air olahan untuk kegunaan tertentu.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan \& Pemenuhan air baku}}{\text{Jumlah total air baku}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui persentase ketersediaan & pemenuhan air baku.
Intepretasi	:	60% ketersediaan & pemenuhan air baku, artinya dari 100 jumlah total air baku terdapat 60 ketersediaan & pemenuhan air baku.



METADATA INDIKATOR

DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN



Nama Indikator	:	Jumlah Produksi Peternakan
Konsep Definisi	:	Produksi peternakan yang menunjukkan perbandingan dalam dua waktu yang berbeda dan telah ditentukan waktunya.
Rumusan	:	Keterangan : t= tahun ke-t $A = \text{Jumlah Produksi Peternakan}_t$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa besar produksi peternakan setiap tahunnya
Intepretasi	:	Jumlah menunjukkan banyaknya produksi yang dihasilkan dalam produksi peternakan

Nama Indikator	:	Jumlah Populasi Ternak
Konsep Definisi	:	Kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu
Rumusan	:	Jumlah keseluruhan hewan ternak
Kegunaan	:	Dapat memberikan informasi tentang perkembangan jumlah ternak setiap tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Intepretasi	:	Semakin besar angka nya menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah hewan ternak

Nama Indikator	:	Rasio Ketersediaan Pangan Dibanding dengan Kebutuhan Bahan Pangan
Konsep Definisi	:	Ketersediaan pangan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga baik jumlah, mutu, dan keamanannya. Ketersediaan pangan mencakup kualitas dan kuantitas bahan pangan untuk memenuhi standart energi bagi individu agar mampu menjalankan aktivitas sehari-hari
Rumusan	:	Keterangan : R_{Pi} = Rasio pangan di wilayah i KTSP = ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun) KBM = Konsumsi untuk bahan makanan (ton/tahun) $R_{Pi} = \frac{KTSP}{KBM}$
Kegunaan	:	Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana
Intepretasi	:	

Nama Indikator	:	Persentase Angka Kematian Ternak: (Ternak Besar, Ternak Kecil Unggas) (Ekor)
Konsep Definisi	:	Parameter mutasi pada dasarnya merupakan persentase atau proporsi dari suatu komponen mutasi ternak terhadap stok awal. Komponen mutasi ternak terdiri dari stok awal, penjualan, pemotongan, kematian, pengurangan lain, pembelian, kelahiran atau penetasan, penambahan lain, dan stok akhir. Komoditas ternak yang dicakup adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila.
Rumusan	:	$\frac{\text{Kematian Ternak}}{\text{Total Ternak}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mendapatkan estimasi populasi ternak di suatu wilayah.
Intepretasi	:	Jika 35% angka kematian ternak, artinya dari 100 total ternak, terdapat 35 ternak yang mengalami kematian

METADATA INDIKATOR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





Nama Indikator	:	IKM Terhadap Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi
Konsep Definisi	:	Hasil pengukuran (berupa angka) dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi
Rumusan		IKM = jumlah total nilai rata-rata unsur tertimbang Konversi IKM = IKM × 2,5
Kegunaan	:	Mengukur kualitas pelayanan publik
Intepretasi	:	Nilai IKM terhadap Pelayanan sebesar 3,8 dari skala 4 yang termasuk pada kategori sangat baik. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh semua unsur yang memiliki kategori sangat baik

Nama Indikator	:	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - (Penilaian KemenPAN-RB)
Konsep Definisi	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE
Rumusan		Indeks SPBE = penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut
Kegunaan	:	Mengukur tingkat penyelenggaraan SPBE
Intepretasi	:	Indeks SPBE nasional mencapai 2,26 dari skala 5. ini berarti tingkat pemanfaatan TIK pada penyelenggaraan pemerintahan dikategorikan pada predikat cukup

Nama Indikator	:	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan Penyebarluasan Informasi
Konsep Definisi	:	Program pelayanan dan penyebarluasan informasi dimaksudkan untuk memberikan, menyampaikan informasi yang sehat, akurat kepada masyarakat agar dapat diketahui dengan jelas tentang arah dan tujuan pembangunan yang akan ditempuh serta hasil yang telah dicapai
Rumusan		$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang puas terhadap pelayanan}}{\text{Jumlah keseluruhan masyarakat yang mendapatkan pelayanan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan penyebarluasan informasi



Intepretasi	:	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan Penyebarluasan Informasi adalah 80%. Ini berarti 80 dari 100 masyarakat yang mendapatkan pelayanan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Persentase OPD yang Menerapkan e-Gov
Konsep Definisi	:	e-Government (e-Gov) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan e - Gov}}{\text{Jumlah keseluruhan OPD}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio jumlah OPD yang menerapkan e-Gov
Intepretasi	:	Persentase OPD yang menerapkan e-Gov adalah 50%. Ini berarti setengah dari total keseluruhan OPD telah menerapkan e-Gov

Nama Indikator	:	Persentase peningkatan kerjasama dengan media berkualitas
Konsep Definisi	:	Kriteria dari media berkualitas adalah media yang bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Rumusan	:	$\frac{JK_t - JK_{t-1}}{JK_{t-1}} \times 100\%$ Ket : JKt = Jumlah Kerjasama dengan media berkualitas pada waktu ke t JKt-1 = Jumlah Kerjasama dengan media berkualitas pada waktu ke t-1
Kegunaan	:	Mengukur peningkatan kerjasama dengan media berkualitas
Intepretasi	:	Persentase peningkatan kerjasama dengan media berkualitas adalah 10%. Ini berarti tingkat kerja sama dengan media berkualitas meningkat sebesar 10% dari waktu sebelumnya

Nama Indikator	:	Persentase Pemanfaatan Saluran Media Komunikasi Publik
Konsep Definisi	:	Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Beberapa contoh tentang media



		komunikasi publik adalah media massa, situs jejaring sosial, E-mail, dan SMS.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang memanfaatkan media komunikasi publik}}{\text{Jumlah keseluruhan kegiatan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat pemanfaatan saluran media komunikasi publik
Intepretasi	:	Persentase pemanfaatan saluran media komunikasi publik adalah 50%. Artinya setengah dari seluruh kegiatan yang dilakukan telah memanfaatkan saluran media komunikasi publik

Nama Indikator	:	Persentase aplikasi informatika OPD yang terintegrasi
Konsep Definisi	:	Aplikasi informatika OPD yang terintegrasi merupakan aplikasi yang mengacu dan terkoordinir melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini bertujuan untuk mendukung penggunaan teknologi yang efektif, cepat, dan efisien.
Rumusan		$\frac{\text{Jumlah aplikasi OPD yang terintegrasi}}{\text{Jumlah keseluruhan aplikasi OPD}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio aplikasi informatika OPD yang terintegrasi
Intepretasi	:	Persentase aplikasi informatika OPD yang terintegrasi adalah 25%. Ini berarti seperempat dari total keseluruhan aplikasi informatika yang dimiliki OPD telah terintegrasi

Nama Indikator	:	Persentase Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berbasis TIK
Konsep Definisi	:	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis TIK adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE
Rumusan		$\frac{\text{Jumlah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berb}}{\text{Jumlah seluruh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publ}} \times 100\%$

Kegunaan	:	Mengukur tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis TIK
Intepretasi	:	Persentase Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis TIK adalah 50%. Artinya setengah dari total keseluruhan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik telah berbasis TIK

Nama Indikator	:	Persentase Pemenuhan Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Konsep Definisi	:	Cukai merupakan salah satu bentuk pungutan negara atas barang yang berkarakteristik khusus. kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dilakukan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal
Rumusan		
Kegunaan	:	
Intepretasi	:	

Nama Indikator	:	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral
Konsep Definisi	:	Data statistik sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan
Rumusan		$\frac{\text{Jumlah data statistik sektoral yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh data statistik sektoral yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat ketersediaan data statistik sektoral
Intepretasi	:	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral adalah 100%. Ini berarti seluruh data yang dibutuhkan tersedia dalam data statistik sektoral

Nama Indikator	:	Persentase Pemenuhan Data Statistik Daerah
Konsep Definisi	:	Data statistik adalah kumpulan data baik berupa bilangan maupun bukan bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan
Rumusan		$\frac{\text{Jumlah data statistik daerah yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh data statistik daerah yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat pemenuhan Data Statistik Daerah
Intepretasi	:	Persentase Pemenuhan Data Statistik Daerah adalah 50%. Artinya setengah dari data yang dibutuhkan telah terpenuhi

Nama Indikator	:	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
Konsep Definisi	:	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan dan mengukur tingkat keamanan informasi sebuah tata kelola di suatu instansi pemerintah
Rumusan	:	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) diperoleh dengan cara menjumlahkan skor yang diperoleh pada setiap aspek
Kegunaan	:	Untuk mengukur tingkat keamanan informasi sebuah tata kelola di suatu instansi pemerintah
Intepretasi	:	Skor peran dan tingkat kepentingan TIK di suatu instansi adalah 28. Artinya tingkat kepentingan TIK di suatu instansi tergolong tinggi

Nama Indikator	:	Persentase Tersediannya Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran
Konsep Definisi	:	Sarana dan prasarana merupakan elemen penting untuk menunjang keberhasilan suatu kegiatan. Dalam KBBI, sarana diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh data statistik daerah yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Administrasi Perkantoran
Intepretasi	:	Persentase tersediannya sarana dan prasarana Administrasi Perkantoran adalah 50%. Artinya setengah dari seluruh sarana dan prasarana Administrasi Perkantoran yang dibutuhkan telah tersedia

Nama Indikator	:	Persentase Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur
Konsep Definisi	:	Sarana dan prasarana merupakan elemen penting untuk menunjang keberhasilan suatu kegiatan. Dalam KBBI, sarana diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses



Rumusan		$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh data statistik daerah yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Intepretasi	:	Persentase tersediannya sarana dan prasarana aparatur adalah 50%. Artinya setengah dari seluruh sarana dan prasarana aparatur yang dibutuhkan telah tersedia

Nama Indikator	:	Persentase Ketersediaan Fasilitas Terhadap Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Konsep Definisi	:	Laporan kinerja dan keuangan adalah sebuah laporan mengenai kaji kinerja dan keuangan suatu instansi yang didapatkan dalam sebuah periode tertentu dengan maksud untuk mengetahui alur keuangan sebuah perusahaan
Rumusan		$\frac{\text{Jumlah fasilitas yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh fasilitas yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat ketersediaan fasilitas terhadap pelaporan kinerja dan keuangan
Intepretasi	:	Persentase ketersediaan fasilitas terhadap pelaporan kinerja dan keuangan adalah 100%. Ini berarti seluruh fasilitas yang dibutuhkan telah tersedia



METADATA INDIKATOR

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN



Nama Indikator	:	Tersedia dan Terpeliharanya Jalan Lingkungan Perkotaan
Konsep Definisi	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel
Rumusan	:	Berdasarkan Survei
Kegunaan	:	Mengukur ketersediaan dan terpeliharanya jalan lingkungan perkotaan
Intepretasi	:	Jalan lingkungan perkotaan yang tersedia dan terpelihara sepanjang 1000 m

Nama Indikator	:	Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Konsep Definisi	:	Rumah tidak layak huni didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio rumah tidak layak huni
Intepretasi	:	Persentase rumah tidak layak huni adalah 25%. Artinya seperempat dari jumlah keseluruhan rumah adalah rumah tidak layak huni

Nama Indikator	:	Persentase RT yang Terlayani Air Bersih
Konsep Definisi	:	Air bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah RT yang terlayani air bersih}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100\%$



Kegunaan	:	Mengukur rasio RT yang terlayani air bersih
Intepretasi	:	Persentase RT yang terlayani air bersih adalah 50%. Artinya setengah dari seluruh RT telah terlayani air bersih

Nama Indikator	:	Persentase RT yang Terlayani Sanitas
Konsep Definisi	:	Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah RT yang terlayani sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah RT yang terlayani sanitasi. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan
Intepretasi	:	Persentase RT yang terlayani sanitasi adalah 25%. Artinya seperempat dari seluruh RT telah terlayani sanitasi

Nama Indikator	:	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh
Konsep Definisi	:	Kawasan kumuh adalah daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai
Rumusan	:	$\frac{X_{t-1} - X_t}{X_{t-1}} \times 100\%$



		Ket : Xt = Luas kawasan kumuh pada tahun t Xt-1 = Luas kawasan kumuh pada tahun t-1
Kegunaan	:	Mengukur tingkat pengurangan kawasan kumuh
Intepretasi	:	Persentase pengurangan kawasan kumuh adalah 50%. Artinya jumlah kawasan kumuh berkurang setengah kali dari jumlah kawasan kumuh pada tahun sebelumnya

Nama Indikator	:	Persentase Rumah Layak Huni
Konsep Definisi	:	Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio rumah layak huni
Intepretasi	:	Persentase rumah layak huni adalah 25%. Artinya seperempat dari jumlah keseluruhan rumah adalah rumah layak huni



Nama Indikator	:	Persentase Bangunan Gedung yang Terstandarisasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi)
Konsep Definisi	:	SLF atau Sertifikat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan dari instansi maupun konsultan SLF terkait
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah gedung yang terstandarisasi SLF}}{\text{Jumlah seluruh gedung}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio bangunan gedung yang terstandarisasi SLF
Intepretasi	:	Persentase Bangunan Gedung yang terstandarisasi SLF adalah 10%. Ini berarti 10 dari 100 gedung telah terstandarisasi SLF

Nama Indikator	:	Persentase Jalan lingkungan perkotaan yang ditangani
Konsep Definisi	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel
Rumusan	:	$\frac{\text{Panjang jalan lingkungan perkotaan yang ditangani}}{\text{Panjang seluruh jalan lingkungan perkotaan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio panjang jalan lingkungan perkotaan yang ditangani
Intepretasi	:	Persentase Jalan lingkungan perkotaan yang ditangani adalah 50%. Artinya setengah dari seluruh jalan lingkungan perkotaan telah ditangani



Nama Indikator	:	Persentase Penanganan Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial
Konsep Definisi	:	Penanganan rumah akibat bencana alam/ sosial adalah tindakan yang dilakukan untuk mengevakuasi rumah yang tertimpa bencana alam/sosial
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah penanganan rumah akibat bencana alam/sosial}}{\text{Jumlah seluruh rumah yang tertimpa bencana alam/sosial}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat penanganan rumah akibat bencana alam/sosial
Intepretasi	:	Persentase penanganan rumah akibat bencana alam/sosial adalah 90%. Artinya tingkat penanganan rumah akibat bencana alam/sosial tergolong tinggi

Nama Indikator	:	Persentase Pengembangan Rumah Swadaya
Konsep Definisi	:	Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Rumah swadaya diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah rumah swadaya yang telah dikembangkan}}{\text{Jumlah seluruh rumah swadaya}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat pengembangan rumah swadaya
Intepretasi	:	Persentase pengembangan rumah swadaya adalah 50%. Artinya pengembangan telah dilakukan pada setengah dari total seseluruhan rumah swadaya

Nama Indikator	:	Persentase Tersedianya Infrastruktur Permukiman
Konsep Definisi	:	Infrastruktur permukiman adalah segala fasilitas, termasuk dalam bentuk fisik dan non-fisik yang dibangun pemerintah atau pun perorangan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor permukiman



Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah infrastruktur permukiman yang tersedia}}{\text{Jumlah infrastruktur permukiman yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat ketersediaan infrastruktur permukiman
Intepretasi	:	Persentase tersedianya infrastruktur permukiman adalah 50%. Ini berarti setengah dari seluruh infrastruktur permukiman yang dibutuhkan telah tersedia

Nama Indikator	:	Persentase Bangunan Gedung Yang Dibangun/Direhab
Konsep Definisi	:	Rehabilitasi bangunan yaitu memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah gedung yang dibangun/direhab}}{\text{Jumlah seluruh gedung}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio bangunan gedung yang dibangun/direhab
Intepretasi	:	Persentase bangunan gedung yang dibangun/direhab adalah 25%. Artinya seperempat dari jumlah keseluruhan gedung termasuk kedalam gedung yang direhab

Nama Indikator	:	Persentase Capaian Lingkungan Permukiman yang Layak Huni
Konsep Definisi	:	Permukiman yang layak huni didefinisikan sebagai permukiman yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah lingkungan permukiman yang layak huni}}{\text{Jumlah seluruh lingkungan permukiman}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur capaian lingkungan permukiman yang layak huni



Intepretasi	:	Persentase capaian lingkungan permukiman yang layak huni adalah 50%. Artinya setengah dari seluruh lingkungan permukiman merupakan lingkungan permukiman yang layak huni
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman
Konsep Definisi	:	
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana dasar permukiman yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana prasarana dasar permukiman yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman
Intepretasi	:	Persentase ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman adalah 50%. Ini berarti setengah dari seluruh sarana prasarana dasar permukiman yang dibutuhkan telah tersedia

METADATA INDIKATOR

DINAS PERTANIAN





Nama Indikator	:	PDRB Subsektor Pertanian
Konsep Definisi	:	Nilai PDRB pada sub sektor perikanan
Rumusan	:	<i>Nilai PDRB pada sub sektor pertanian t</i> Dimana : t = tahun ke t
Kegunaan	:	Untuk mengetahui kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB
Intepretasi	:	Semakin besar nilai PDRB sub sektor pertanian artinya semakin besar kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB suatu daerah

Nama Indikator	:	PDRB Subsektor Perkebunan
Konsep Definisi	:	Nilai PDRB pada sub sektor perkebunan
Rumusan	:	<i>Nilai PDRB pada sub sektor perkebunan t</i> Dimana : t = tahun ke t
Kegunaan	:	Untuk mengetahui kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB
Intepretasi	:	Semakin besar nilai PDRB sub sektor perkebunan artinya semakin besar kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB suatu daerah

Nama Indikator	:	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Konsep Definisi	:	Suatu angka yang menunjukkan persentase kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman pangan pada periode berjalan/periode bersangkutan terhadap nilai produksi tanaman pangan pada periode sebelumnya
Rumusan	:	$PPP = \frac{P_t - P_{(t-1)}}{P_{(t-1)}} \times 100\%$ Dimana : PPP = Peningkatan Produksi Tanaman Pangan P_t = Produksi Tanaman Pangan tahun ke t P_{t-1} = Produksi Tanaman Pangan tahun ke $t-1$



Kegunaan	:	Mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman pangan dan seberapa besar kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman pangan pada periode bersangkutan dibandingkan dengan periode sebelumnya
Intepretasi	:	Jika angka ini bernilai nol (0) maka nilai produksi tanaman pangan pada periode yang bersangkutan sama dengan sebelumnya. Jika angka ini bernilai positif (+) maka nilai produksi tanaman pangan pada periode yang bersangkutan lebih besar atau mengalami peningkatan dibanding produksi tanaman pangan pada periode sebelumnya. Jika angka ini bernilai negatif (-) maka nilai produksi tanaman pangan pada periode yang bersangkutan lebih kecil atau mengalami penurunan dibanding produksi tanaman pangan pada periode sebelumnya. Besarnya kenaikan/penurunan yang ditunjukkan oleh angka ini adalah dalam bentuk persentase.

Nama Indikator	:	Peningkatan Produksi Tanaman Buah Tahunan
Konsep Definisi	:	Suatu angka yang menunjukkan persentase kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman buah tahunan pada periode berjalan/periode bersangkutan terhadap nilai produksi tanaman buah tahunan pada periode sebelumnya
Rumusan	:	$PPB = \frac{P_t - P_{(t-1)}}{P_{(t-1)}} \times 100\%$ Dimana : PPB = Peningkatan Produksi tanaman buah tahunan P_t = Produksi tanaman buah tahunan tahun ke t P_{t-1} = Produksi tanaman buah tahunan tahun ke t-1
Kegunaan	:	Mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman buah tahunan dan seberapa besar kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman buah tahunan pada periode bersangkutan dibandingkan dengan periode sebelumnya
Intepretasi	:	Jika angka ini bernilai nol (0) maka nilai produksi tanaman buah tahunan pada periode yang bersangkutan sama dengan sebelumnya. Jika angka ini bernilai positif (+) maka nilai produksi tanaman buah tahunan pada periode yang bersangkutan lebih besar atau mengalami peningkatan dibanding produksi tanaman buah tahunan pada periode sebelumnya. Jika angka ini bernilai negatif (-) maka nilai produksi tanaman buah tahunan pada periode yang bersangkutan lebih kecil atau mengalami penurunan dibanding produksi tanaman buah tahunan pada periode sebelumnya. Besarnya kenaikan/penurunan yang ditunjukkan oleh angka ini adalah dalam bentuk persentase.

Nama Indikator	:	Peningkatan produksi tanaman sayur
Konsep Definisi	:	Suatu angka yang menunjukkan persentase kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman sayur pada periode berjalan/periode bersangkutan terhadap nilai produksi tanaman sayur pada periode sebelumnya
Rumusan	:	$PPS = \frac{P_t - P_{(t-1)}}{P_{(t-1)}} \times 100\%$ Dimana : PPB = Peningkatan Produksi tanaman sayur Pt = Produksi tanaman sayur tahun ke t Pt-1 = Produksi tanaman sayur tahun ke t-1
Kegunaan	:	Mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman sayur dan seberapa besar kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman sayur pada periode bersangkutan dibandingkan dengan periode sebelumnya
Intepretasi	:	Jika angka ini bernilai nol (0) maka nilai produksi tanaman sayur pada periode yang bersangkutan sama dengan sebelumnya. Jika angka ini bernilai positif (+) maka nilai produksi tanaman sayur pada periode yang bersangkutan lebih besar atau mengalami peningkatan dibanding produksi tanaman sayur pada periode sebelumnya. Jika angka ini bernilai negatif (-) maka nilai produksi tanaman sayur pada periode yang bersangkutan lebih kecil atau mengalami penurunan dibanding produksi tanaman sayur pada periode sebelumnya. Besarnya kenaikan/penurunan yang ditunjukkan oleh angka ini adalah dalam bentuk persentase.

Nama Indikator	:	Peningkatan Produksi Tanaman Hias
Konsep Definisi	:	Suatu angka yang menunjukkan persentase kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman hias pada periode berjalan/periode bersangkutan terhadap nilai produksi tanaman hias pada periode sebelumnya
Rumusan	:	$PPH = \frac{P_t - P_{(t-1)}}{P_{(t-1)}} \times 100\%$ Dimana : PPB = Peningkatan Produksi tanaman hias Pt = Produksi tanaman hias tahun ke t Pt-1 = Produksi tanaman hias tahun ke t-1



Kegunaan	:	Mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman hias dan seberapa besar kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman hias pada periode bersangkutan dibandingkan dengan periode sebelumnya
Intepretasi	:	Jika angka ini bernilai nol (0) maka nilai produksi tanaman hias pada periode yang bersangkutan sama dengan sebelumnya. Jika angka ini bernilai positif (+) maka nilai produksi tanaman hias pada periode yang bersangkutan lebih besar atau mengalami peningkatan dibanding produksi tanaman hias pada periode sebelumnya. Jika angka ini bernilai negatif (-) maka nilai produksi tanaman hias pada periode yang bersangkutan lebih kecil atau mengalami penurunan dibanding produksi tanaman hias pada periode sebelumnya. Besarnya kenaikan/penurunan yang ditunjukkan oleh angka ini adalah dalam bentuk persentase.

Nama Indikator	:	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
Konsep Definisi	:	Suatu angka yang menunjukkan persentase kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman perkebunan pada periode berjalan/periode bersangkutan terhadap nilai produksi tanaman perkebunan pada periode sebelumnya
Rumusan	:	$PPK = \frac{P_t - P_{(t-1)}}{P_{(t-1)}} \times 100\%$ Dimana : PPB = Peningkatan Produksi tanaman perkebunan Pt = Produksi tanaman perkebunan tahun ke t Pt-1 = Produksi tanaman perkebunan tahun ke t-1
Kegunaan	:	Mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman perkebunan dan seberapa besar kenaikan/penurunan nilai produksi tanaman perkebunan pada periode bersangkutan dibandingkan dengan periode sebelumnya
Intepretasi	:	Jika angka ini bernilai nol (0) maka nilai produksi tanaman perkebunan pada periode yang bersangkutan sama dengan sebelumnya. Jika angka ini bernilai positif (+) maka nilai produksi tanaman perkebunan pada periode yang bersangkutan lebih besar atau mengalami peningkatan dibanding produksi tanaman perkebunan pada periode sebelumnya. Jika angka ini bernilai negatif (-) maka nilai produksi tanaman perkebunan pada periode yang bersangkutan lebih kecil atau mengalami penurunan dibanding produksi tanaman perkebunan pada periode sebelumnya. Besarnya kenaikan/penurunan yang ditunjukkan oleh angka ini adalah dalam bentuk persentase.

Nama Indikator	:	Persentase Produk Hasil Pertanian/Agribisnis yang Terstandarisasi
Konsep Definisi	:	Suatu angka yang menunjukkan jumlah produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi terhadap jumlah produk hasil pertanian/agribisnis secara keseluruhan pada periode berjalan/periode bersangkutan
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi}_t}{\text{Jumlah produk hasil pertanian/agribisnis}_t} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa banyak produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin banyak produk hasil pertanian/agribisnis yang sudah terstandarisasi

Nama Indikator	:	Persentase Penurunan Lahan Marginal
Konsep Definisi	:	Lahan marginal adalah lahan yang rendah potensi dan produktivitasnya. Dari sisi kesuburan tanah, baik kesuburan kimia, fisik maupun biologi tanah, juga rendah. Di samping itu, tanah marginal juga mempunyai tersedianya air yang rendah. Tapi bukan berarti lahan marginal tidak bisa dikembangkan untuk budidaya pertanian, khususnya tanaman pangan.
Rumusan	:	$\frac{\text{luas lahan marginal}_t - \text{luas lahan marginal}_{t-1}}{\text{luas lahan marginal}_{t-1}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa besar penurunan lahan marginal
Intepretasi	:	Semakin kecil angkanya menunjukkan bahwa luas lahan marginal semakin kecil

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Petani Tembakau yang Terlatih
Konsep Definisi	:	Suatu angka yang menunjukkan persentase kenaikan/penurunan jumlah petani tembakau yang terlatih pada periode berjalan/periode bersangkutan terhadap jumlah petani tembakau yang terlatih pada periode sebelumnya
Rumusan	:	$b = \frac{a_t - a_{(t-1)}}{a_{(t-1)}} \times 100\%$ Dimana : a = Peningkatan jumlah petani tembakau yang terlatih a_t = jumlah petani tembakau yang terlatih tahun ke t a_{t-1} = jumlah petani tembakau yang terlatih tahun ke t-1



Kegunaan	:	Mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan jumlah petani tembakau yang terlatih dan seberapa besar kenaikan/penurunan jumlah petani tembakau yang terlatih pada periode bersangkutan dibandingkan dengan periode sebelumnya
Intepretasi	:	Jika angka ini bernilai nol (0) maka jumlah petani tembakau yang terlatih pada periode yang bersangkutan sama dengan sebelumnya. Jika angka ini bernilai positif (+) maka jumlah petani tembakau yang terlatih pada periode yang bersangkutan lebih besar atau mengalami peningkatan dibanding jumlah petani tembakau yang terlatih pada periode sebelumnya. Jika angka ini bernilai negatif (-) maka jumlah petani tembakau yang terlatih pada periode yang bersangkutan lebih kecil atau mengalami penurunan dibanding jumlah petani tembakau yang terlatih pada periode sebelumnya. Besarnya kenaikan/penurunan yang ditunjukkan oleh angka ini adalah dalam bentuk persentase.

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Agribisnis
Konsep Definisi	:	Suatu angka yang menunjukkan persentase kenaikan/penurunan jumlah kelompok tani agribisnis pada periode berjalan/periode bersangkutan terhadap jumlah kelompok tani agribisnis pada periode sebelumnya
Rumusan	:	$b = \frac{a_t - a_{(t-1)}}{a_{(t-1)}} \times 100\%$ Dimana : b = Peningkatan jumlah kelompok tani agribisnis a_t = jumlah kelompok tani agribisnis tahun ke t a_{t-1} = jumlah kelompok tani agribisnis tahun ke t-1
Kegunaan	:	Mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan jumlah kelompok tani agribisnis dan seberapa besar kenaikan/penurunan jumlah kelompok tani agribisnis pada periode bersangkutan dibandingkan dengan periode sebelumnya
Intepretasi	:	Jika angka ini bernilai nol (0) maka jumlah kelompok tani agribisnis pada periode yang bersangkutan sama dengan sebelumnya. Jika angka ini bernilai positif (+) maka jumlah kelompok tani agribisnis pada periode yang bersangkutan lebih besar atau mengalami peningkatan dibanding jumlah kelompok tani agribisnis pada periode sebelumnya. Jika angka ini bernilai negatif (-) maka jumlah kelompok tani agribisnis pada periode yang bersangkutan lebih kecil atau mengalami penurunan dibanding jumlah kelompok tani agribisnis pada periode sebelumnya. Besarnya kenaikan/penurunan yang ditunjukkan oleh angka ini adalah dalam bentuk persentase.



Nama Indikator	:	Persentase Kelompok Tani yang Memiliki Jangkauan Pemasaran Tingkat Nasional
Konsep Definisi	:	Suatu angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kelompok tani yang memiliki jangkauan pemasaran tingkat nasional terhadap jumlah kelompok tani keseluruhan
Rumusan	:	$c = \frac{a}{b} \times 100\%$ Dimana : c = Persentase kelompok tani yang memiliki jangkauan pemasaran tingkat nasional a=Jumlah kelompok tani yang memiliki jangkauan pemasaran tingkat nasional b= Jumlah kelompok tani keseluruhan
Kegunaan	:	Mengetahui kelompok tani yang memiliki jangkauan pemasaran tingkat nasional
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kelompok tani yang memiliki jangkauan pemasaran tingkat nasional

METADATA INDIKATOR

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA RAGA



Nama Indikator	:	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap panjang jaringan jalan keseluruhan
Rumusan	:	$P=a/b$ Dimana : P= Persentase panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik dan sedang a = Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik dan sedang b= Panjang jaringan jalan keseluruhan
Kegunaan	:	Untuk mengetahui panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang semakin besar

Nama Indikator	:	Persentase Infrastruktur Pendukung Jalan dalam Kondisi Baik
Konsep Definisi	:	Infrastruktur pendukung jalan meliputi jembatan, drainase/pembuangan air, kondisi turap/talud/bronjong, dan lampu penerangan jalan/fasilitas umum
Rumusan	:	$P=(a+b+c+d)/e$ Dimana : P = Persentase Infrastruktur pendukung jalan dalam kondisi baik a = Panjang Jembatan kondisi baik b= drainase/pembuangan air kondisi baik c = Panjang turap/talud/bronjong kondisi baik d = Panjang Lampu penerangan jalan/fasilitas umum kondisi baik e= Panjang keseluruhan infrastruktur pendukung
Kegunaan	:	Untuk mengetahui infrastruktur pendukung jalan dalam kondisi baik
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa semakin besar infrastruktur pendukung jalan dalam kondisi baik

Nama Indikator	:	Jembatan dalam Kondisi Baik
Konsep Definisi	:	Jembatan merupakan penghubung antar ruas jalan yang berfungsi untuk kelancaran transportasi dan mobilitas masyarakat, jika kondisi jembatan dalam keadaan baik maka mobilitas masyarakat akan lancar yang manfaat bagi masyarakat setempat khususnya dari segi ekonomi maupun social budaya



Rumusan	:	$P=a/e$ Dimana : P = Persentase jembatan dalam kondisi baik a = Jumlah Jembatan kondisi baik e = Jumlah jembatan dalam kondisi baik
Kegunaan	:	Untuk mengetahui persentase jembatan dalam kondisi baik
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa semakin banyak jembatan dalam kondisi baik

Nama Indikator	:	Persentase Drainasi dalam Kondisi Baik /Pembuangan Air Tidak Tersumbat
Konsep Definisi	:	Drainase berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan dari badan jalan. Jika saluran drainase tidak berfungsi dengan baik maka akan terjadi genangan yang mengakibatkan rusak atau turunnya kondisi jalan. Sehingga untuk kondisi drainase perlu diperhatikan secara khusus
Rumusan	:	$P=b/e$ Dimana : P = Persentase Infrastruktur pendukung jalan dalam kondisi baik b = Panjang drainase kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat e = Panjang drainase secara keseluruhan
Kegunaan	:	Untuk mengetahui drainasi dalam kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa semakin panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat

Nama Indikator	:	Kondisi Turap / Talud / Bronjong dalam kondisi Baik
Konsep Definisi	:	Turap dibangun di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor bertujuan untuk memperkuat badan jalan dari bahaya longsor. Turap biasanya dibangun pada daerah-daerah pegunungan atau wilayah dataran tinggi dan ruasjalan yang berbatasan langsung dengan sungai, saluran atau laut. Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh bencana longsor
Rumusan	:	$P=c/e$ Dimana : P = Persentase panjang turap/talud/bronjong dalam kondisi baik c = Panjang turap/talud/bronjong kondisi baik e = Panjang turap/talud/bronjong keseluruhan
Kegunaan	:	Untuk mengetahui panjang turap/talud/bronjong dalam kondisi baik dalam kondisi baik



Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa semakin panjang turap/talud/bronjong dalam kondisi baik dalam kondisi baik
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Persentase panjang jalan yang sudah ada penerangan jalan umum dalam kondisi baik
Konsep Definisi	:	Pemenuhan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu standar pelayanan dan keselamatan transportasi yang harus dipenuhi dalam upaya peningkatan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan
Rumusan	:	$P=d/e$ Dimana : P = Persentase panjang jalan yang sudah ada penerangan jalan umum dalam kondisi baik d = Panjang jalan yang sudah ada lampu penerangan jalan/fasilitas umum kondisi baik e= Panjang jalan keseluruhan yang membutuhkan lampu penerangan jalan/fasilitas umum
Kegunaan	:	Untuk mengetahui panjang jalan yang sudah ada lampu penerangan jalan/fasilitas umum kondisi baik
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa semakin banyak jalan yang sudah ada lampu penerangan jalan umum

Nama Indikator	:	Panjang Jalan Berdasarkan Material
Konsep Definisi	:	Panjang jalan dengan permukaan dilapisi oleh aspal, berbatu, hotmix (aspal beton), cor beton, kerikil, tanah
Rumusan	:	Panjang Jalan Berdasarkan Material
Kegunaan	:	Untuk mengetahui panjang jalan berdasarkan jenis permukaannya
Intepretasi	:	Semakin besar panjang jalan dengan permukaan aspal menunjukkan bahwa daerah tersebut dari segi infrastruktur baik

Nama Indikator	:	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi
Konsep Definisi	:	Panjang jalan dengan kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat
Rumusan	:	Panjang Jalan Berdasarkan kondisi



Kegunaan	:	Untuk mengetahui panjang jalan berdasarkan kondisi jalan
Intepretasi	:	Semakin besar panjang jalan kondisi baik menunjukkan bahwa daerah tersebut dari segi infrastruktur baik

METADATA INDIKATOR

DINAS PERHUBUNGAN





Nama Indikator	:	Persentase Wilayah yang Terkoneksi Angkutan Umum
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara wilayah yang terkoneksi angkutan umum dengan total wilayah di kabupaten/kota.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Wilayah yang terkoneksi angkutan umum})}{(\text{Total wilayah})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui total wilayah yang terkoneksi oleh angkutan umum
Intepretasi	:	Terdapat 65% wilayah yang terkoneksi angkutan umum artinya dari 100 wilayah yang hanya terkoneksi dengan angkutan umum adalah 65 wilayah

Nama Indikator	:	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara angka kecelakaan tahun ini dengan angka kecelakaan tahun lalu
Rumusan	:	$\frac{(\text{Angka kecelakaan tahun lalu} - \text{Angka kecelakaan tahun ini})}{(\text{Angka kecelakaan tahun lalu})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui perbandingan angka kecelakaan tahun lalu dengan angka kecelakaan tahun ini
Intepretasi	:	Terdapat 30% penurunan angka kecelakaan pada tahun 2021 artinya dari 100 kasus kecelakaan pada tahun 2020 mengalami 30 kasus penurunan angka kecelakaan

Nama Indikator	:	Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan untuk jaringan jalan kabupaten/kota dengan total keseluruhan wilayah kabupaten/kota
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah Angkutan umum melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota})}{(\text{Jumlah Total Keseluruhan wilayah Kabupaten/Kota})}$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jalan kabupaten/kota
Intepretasi	:	Terdapat 67% angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jalan kabupaten/kota artinya, dari 100 total wilayah suatu kabupaten/kota terdapat 67 angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota



Nama Indikator	:	Persentase Fasilitas LLAJ yang Terpasang
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara Fasilitas LLAJ yang terpasang dengan total keseluruhan Fasilitas LLAJ
Rumusan	:	$\frac{(Fasilitas\ LLAJ\ yang\ terpasang)}{(Total\ Keseluruhan\ fasilitas\ LLAJ)} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengetahui perbandingan fasilitas LLAJ dengan total keseluruhan fasilitas LLAJ untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas
Intepretasi	:	Dari 80% LLAJ yang terpasang, artinya dari 100 fasilitas LLAJ terdapat 80 fasilitas LLAJ yang terpasang

Nama Indikator	:	Persentase Prasarana Dan Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standart
Konsep Definisi	:	Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
Rumusan	:	$\frac{(Jumlah\ Fasilitas\ LLAJ\ yang\ sesuai\ standart)}{(Total\ Keseluruhan\ Fasilitas\ LLAJ)} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui perbandingan fasilitas LLAJ yang sesuai standart dengan total keseluruhan fasilitas LLAJ
Intepretasi	:	Terdapat 75% Fasilitas LLAJ yang sesuai standart artinya dari 100 Fasilitas LLAJ terdapat 75 fasilitas yang sesuai standart

Nama Indikator	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan
Konsep Definisi	:	Sarana dan Prasarana Lalu Lintas adalah agar dapat membantu Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana lalu lintas dalam menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan pengevaluasian, serta pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Rumusan	:	$Jumlah\ Sarana\ dan\ Prasarana\ Perhubungan_t$



Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah sarana dan prasarana perhubungan
Intepretasi	:	Jumlah total keseluruhan sarana dan prasarana perhubungan

Nama Indikator	:	Persentase Jumlah Kendaraan yang Uji
Konsep Definisi	:	Uji kelayakan kendaraan ini disebut dengan uji kir yang dilakukan secara berkala. Jenis kendaraan terdaftar telah melakukan pengujian kelayakan kendaraan bermotor meliputi bajaj, mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, mobil khusus, dan kereta tempelan.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah kendaraan yang di uji})}{(\text{Total keseluruhan kendaraan})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui perbandingan antara kendaraan yang telah di uji kelayakannya dengan total keseluruhan kendaraan.
Intepretasi	:	Terdapat 80% jumlah kendaraan yang di uji, artinya dari 100 total kendaraan terdapat 80 jumlah kendaraan yang di uji

Nama Indikator	:	Rasio Ijin Trayek
Konsep Definisi	:	Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Kendaraan yang telah melakukan izin trayek})}{(\text{Jumlah total keseluruhan kendaraan})}$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui perbandingan kendaraan yang telah melakukan izin trayek dengan jumlah total keseluruhan kendaraan
Intepretasi	:	Dari 80% Kendaraan yang telah melakukan izin trayek, artinya dari 100 jumlah keseluruhan kendaraan terdapat 80 kendaraan yang telah melakukan izin trayek

Nama Indikator	:	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Konsep Definisi	:	Uji KIR adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan dari kendaraan secara teknis.
Rumusan	:	



		<i>Jumlah uji KIR angkutan umum t</i> Keterangan : t = tahun ke- t
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR
Intepretasi	:	Semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin banyak angkutan umum yang melakukan uji kir

Nama Indikator	:	Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Konsep Definisi	:	KIR adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan dari kendaran secara teknis.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR})}{(\text{jumlah seluruh angkutan umum})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Kepemilikan KIR angkutan umum sebagai syarat layak jalan
Intepretasi	:	Dengan memilik kepemilikan KIR kendaraan tersebut memenuhi syarat layak jalan, sehingga nantinya mobil tersebut tidak menimbulkan masalah di jalan raya seperti misalnya kecelakaan, maupun menimbulkan polusi udara.

Nama Indikator	:	Jumlah Terminal
Konsep Definisi	:	Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang
Rumusan	:	<i>Jumlah Terminal t</i> Keterangan : t = tahun ke- t
Kegunaan	:	Mengetahui jumlah terminal yang berfungsi untuk komponen dari sistem transportasi sebagai tempat pemberhentian kendaraan umum.
Intepretasi	:	Jumlah total keseluruhan terminal di kabupaten/kota

Nama Indikator	:	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum
Konsep Definisi	:	Orang yang terangkut angkutan umum



Rumusan	:	<i>Jumlah orang yang terangkut angkutan umum t</i> Keterangan : t = tahun ke-t
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah orang yang terangkut angkutan umum
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang terangkut angkutan umum
Nama Indikator	:	Persentase Aksesibilitas Transportasi
Konsep Definisi	:	Aksesibilitas transportasi umum adalah kemudahan atau kelancaran dalam menggunakan kendaraan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan aktivitas atau pekerjaan masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Aksesibilitas transportasi untuk kemudahan tercapainya pengguna kendaraan transportasi umum
Intepretasi	:	

METADATA INDIKATOR

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



Nama Indikator	:	Jumlah Klub Olah Raga per 10.000 penduduk
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara Klub Olahraga dengan penduduk
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah Klub Olahraga}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10000$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui perbandingan jumlah klub olah raga dengan penduduk
Intepretasi	:	Rasio Per 10.000 Penduduk Tahun 2017 untuk jumlah klub olahraga sebesar 2,30 artinya dari 10.000 penduduk terdapat 2 klub olahraga

Nama Indikator	:	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk
Konsep Definisi	:	Perbandingan jumlah Gedung Olahraga dengan penduduk.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah Gedung Olahraga}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10000$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui perbandingan jumlah gedung olahraga dengan penduduk.
Intepretasi	:	Rasio Per 10.000 Penduduk Tahun 2017 untuk jumlah gedung olahraga sebesar 0,03 artinya dari 10.000 penduduk terdapat 1 klub olahraga

Nama Indikator	:	Rasio Pemuda Berprestasi
Konsep Definisi	:	Pemuda berprestasi adalah wujud nyata dari kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang untuk upaya yang telah mereka capai
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah Pemuda Prestasi (atlet dan non atlet)}}{\text{Jumlah pemuda usia 16 – 30 tahun}} \times 10000$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui perbandingan jumlah pemuda berprestasi dengan jumlah pemuda usia 16-30 tahun
Intepretasi	:	Rasio Per 10.000 Penduduk Tahun 2017 untuk jumlah pemuda berprestasi sebesar 1,17 artinya dari 10.000 penduduk terdapat 1 pemuda yang berprestasi

Nama Indikator	:	Jumlah Atlet Berprestasi
Konsep Definisi	:	Atlet berprestasi adalah Individu yang memiliki keunikan dan memiliki bakat tersendiri serta keberhasilan usaha yang dicapai seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu.



Rumusan	:	Jumlah Atlet Berprestasi
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa banyak atlet yang berprestasi
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah atlet yang berprestasi

Nama Indikator	:	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi
Konsep Definisi	:	Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
Rumusan	:	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi
Kegunaan	:	Untuk mengetahui jumlah cabang olahraga berprestasi
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah cabang olahraga yang berprestasi

Nama Indikator	:	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Dibina
Konsep Definisi	:	Organisasi kepemudaan adalah lembaga di Indonesia tidak formal yang ada di lingkungan masyarakat. Anggotanya merupakan pemuda-pemudi yang juga berkegiatan sosial sebagai wujud kesadaran untuk membantu masyarakat dan sesama di sekitarnya.
Rumusan	:	$\frac{\text{Organisasi kepemudaan yang dibina}}{\text{Total keseluruhan organisasi kepemudaan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui perbandingan antara organisasi kepemudaan dengan total keseluruhan organisasi.
Intepretasi	:	55% organisasi kepemudaan yang di bina, artinya dari 100 organisasi terdapat 55 organisasi kepemudaan yang di bina

Nama Indikator	:	Persentase Pemuda yang Aktif Berwirausaha
Konsep Definisi	:	Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari padanya dan mengambil tindakanyang tepat guna memastikan sukses.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif berwirausaha}}{\text{Jumlah pemuda usia 16 – 30 Tahun}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui perbandingan antara pemuda yang aktif berwirausaha dengan total keseluruhan pemuda.

Intepretasi	:	45% pemuda yang aktif berwirausaha artinya dari 100 total keseluruhan pemuda terdapat 45 pemuda yang aktif berwirausaha.
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Persentase Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan
Konsep Definisi	:	Pelatihan kewirausahaan adalah serangkaian upaya yang dilaksanakan dengan sengaja yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan usaha sehingga tujuan usaha dapat tercapai.
Rumusan	:	$\frac{\text{Terlaksananya pelatihan kewirausahaan}}{\text{Total keseluruhan pelatihan kewirausahaan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui persentase pelatihan kewirausahaan yang terlaksana dengan tidak terlaksana
Intepretasi	:	78% terlaksananya pelatihan kewirausahaan, artinya dari 100 pelatihan kewirausahaan terdapat 78 pelatihan kewirausahaan yang terlaksana

Nama Indikator	:	Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
Konsep Definisi	:	Sarana dan prasarana olahraga adalah sebagai pendukung pelaksanaan suatu kegiatan terutama dalam pengajaran olahraga.
Rumusan	:	$\frac{\text{Sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas}}{\text{Tota keseluruhan sarana dan prasarana olahraga}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui presentase sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas
Intepretasi	:	75% Sarana olahraga yang berkualitas, artinya dari 100 Total keseluruhan sarana dan prasarana olahraga terdapat 75 sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas

Nama Indikator	:	Persentase Kualitas Organisasi Pemuda
Konsep Definisi	:	Organisasi Pemuda adalah sebuah perkumpulan yang menghimpun para anak muda.
Rumusan	:	$\frac{\text{Kualitas Organisasi Pemuda}}{\text{Total Keseluruhan Organisasi Pemuda}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui presentase kualitas organisasi pemuda



Intepretasi	:	Terapat 79% kualitas organisasi pemuda, artinya dari 100 Organisasi pemuda terdapat 79 kualitas organisasi pemuda.
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Persentase Pemuda Mandiri
Konsep Definisi	:	Pemuda Mandiri adalah sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah Pemuda Mandiri}}{\text{Jumlah pemuda usia 16 – 30 Tahun}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui presentase pemuda mandiri dengan total keseluruhan pemuda usia 16-30 tahun
Intepretasi	:	85% Pemuda mandiri, artinya dari 100 total pemuda terdapat 85 pemuda mandiri

Nama Indikator	:	Persentase Olahraga Pemasalan
Konsep Definisi	:	Suatu upaya untuk menanamkan dasar-dasar ketrampilan gerak dalam usaha mencari bibit-bibit atlet yang berbakat dengan kondisi fisik dan mental yang sehat dan kuat untuk dikembangkan dalam mencapai prestasi yang tinggi.
Rumusan	:	$\frac{\text{Olahraga Pemasalan}}{\text{Total Keseluruhan Olahraga}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui presentase Olahraga Pemasalan
Intepretasi	:	45% Olahraga Pemasalan, artinya dari 100 olahraga terdapat 45 olahraga pemasalan.



METADATA INDIKATOR

DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Nama Indikator	:	Persentase Rasio KDRT
Konsep Definisi	:	Tindak kekerasan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kendali atas pasangan. KDRT tidak memandang jenis kelamin dan bisa menimpa suami, istri, atau anak-anak. Kekerasan yang dialami korban pun bisa mencakup tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi, psikologis, atau ancaman
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio KDRT
Intepretasi	:	Persentase Rasio KDRT di suatu daerah adalah 25%. Artinya seperempat dari total seluruh rumah tangga mengalami KDRT

Nama Indikator	:	Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang Menjadi Peserta KB Aktif (PA)
Konsep Definisi	:	Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang berusia antara 20-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, Pasangan Usia Subur sangat mudah dalam memperoleh keturunan, dikarenakan keadaan kedua pasangan tersebut normal. Hal ini lah yang menjadi masalah bagi Pasangan Usia Subur yaitu perlunya pengaturan tingkat kelahiran, perawatan kehamilan dan persalinan aman
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah PUS yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)}}{\text{Jumlah seluruh Peserta KB Aktif (PA)}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)
Intepretasi	:	Persentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA) adalah 50%. Artinya setengah dari seluruh Peserta KB Aktif (PA) adalah Pasangan Usia Subur (PUS)



Nama Indikator	:	Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I
Konsep Definisi	:	Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (Pra-S) adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator Keluarga Sejahtera I (KS-I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga". Sedangkan Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS-I) adalah keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" keluarga
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah keluarga Pra - S dan KS - I}}{\text{Jumlah seluruh keluarga}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I
Intepretasi	:	Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I adalah 50%. Artinya setengah dari keseluruhan jumlah keluarga adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan pada Tahapan Keluarga Sejahtera Pra-S dan KS-I

Nama Indikator	:	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
Konsep Definisi	:	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah Indeks yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik
Rumusan	:	IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan
Kegunaan	:	Mengetahui capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
Intepretasi	:	Keberhasilan dalam bidang pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari meningkatnya IDG. Peningkatan angka ini menunjukkan tingkat pemberdayaan gender menuju ke arah yang lebih baik



Nama Indikator	:	Peningkatan jumlah anggaran yang responsif gender
Konsep Definisi	:	Anggaran yang responsif gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
Rumusan	:	$\text{Ket: } \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah anggaran yang responsif gender b = Jumlah anggaran belanja langsung
Kegunaan	:	Mengukur peningkatan jumlah anggaran yang responsif gender
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggaran yang responsif gender

Nama Indikator	:	Persentase Kekerasan Perempuan yang terselesaikan
Konsep Definisi	:	Menurut Peraturan Menteri PPPA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan : Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh kasus kekerasan perempuan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat kekerasan perempuan yang terselesaikan
Intepretasi	:	Persentase kekerasan perempuan yang terselesaikan adalah 50%. Ini berarti setengah dari keseluruhan kasus kekerasan perempuan telah terselesaikan



Nama Indikator	:	Persentase Kekerasan Anak Yang terselesaikan
Konsep Definisi	:	Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak (sesuai Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia) dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekerasan terhadap anak menimbulkan dampak kesehatan, pendidikan, maupun sosial yang menghambat berbagai tujuan pembangunan. Suatu tindakan kekerasan emosional dapat menyebabkan kerugian pada aspek fisik dan kesehatan anak, mental, spiritual, moral, atau perkembangan sosial. Memonitor prevalensi kekerasan menjadi dasar untuk merancang dan menilai keberhasilan program perlindungan anak yang merupakan prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan anak yang terselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh kasus kekerasan anak}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat kekerasan perempuan yang terselesaikan
Intepretasi	:	Persentase kekerasan perempuan yang terselesaikan adalah 50%. Ini berarti setengah dari keseluruhan kasus kekerasan perempuan telah terselesaikan

Nama Indikator	:	Jumlah Akseptor KB Baru
Konsep Definisi	:	Akseptor KB Baru adalah akseptor yang baru pertama kali menggunakan alat/obat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus
Rumusan	:	Jumlah Akseptor KB Baru
Kegunaan	:	Mengukur peningkatan jumlah Akseptor KB Baru
Intepretasi	:	Peningkatan Akseptor KB Baru sebesar 50%. Ini berarti jumlah Akseptor KB Baru meningkat setengah kali lebih banyak dari tahun sebelumnya



Nama Indikator	:	Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi
Konsep Definisi	:	Pelayanan kontrasepsi adalah pemberian atau pemasangan kontrasepsi maupun tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan kontrasepsi kepada calon dan peserta
Rumusan	:	$\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$ Ket : Pt = Jumlah pelayanan kontrasepsi pada tahun t Pt-1 = Jumlah pelayanan kontrasepsi pada tahun t-1
Kegunaan	:	Mengukur peningkatan jumlah pelayanan kontrasepsi
Intepretasi	:	Peningkatan pelayanan kontrasepsi sebesar 50%. Ini berarti jumlah pelayanan kontrasepsi meningkat setengah kali lebih banyak dari tahun sebelumnya

Nama Indikator	:	Meningkatnya Dukungan Sarpras Pelayanan KB
Konsep Definisi	:	Program KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara
Rumusan	:	$\frac{S_t - S_{t-1}}{S_{t-1}} \times 100\%$ Ket : St = Jumlah dukungan Sarpras Pelayanan KB pada tahun t St-1 = Jumlah dukungan Sarpras Pelayanan KB pada tahun t-1
Kegunaan	:	Mengukur peningkatan jumlah dukungan Sarpras Pelayanan KB
Intepretasi	:	Peningkatan dukungan Sarpras Pelayanan KB sebesar 50%. Ini berarti jumlah dukungan Sarpras Pelayanan KB meningkat setengah kali lebih banyak dari tahun sebelumnya



Nama Indikator	:	Jumlah Pembinaan KB/KR mandiri
Konsep Definisi	:	Program KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara
Rumusan	:	Jumlah Pembinaan KB/KR mandiri
Kegunaan	:	Mengukur peningkatan jumlah pembinaan KB/KR mandiri
Intepretasi	:	Peningkatan Pembinaan KB/KR mandiri sebesar 50%. Ini berarti jumlah Pembinaan KB/KR mandiri meningkat setengah kali lebih banyak dari tahun sebelumnya

METADATA INDIKATOR

DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN





Nama Indikator	:	Jumlah Kunjungan Wisatawan
Konsep Definisi	:	Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata
Rumusan	:	Jumlah kunjungan wisatawan t Dimana : t = tahun ke t
Kegunaan	:	Mengukur banyak kunjungan wisatawan di obyek wisata
Intepretasi	:	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebesar 2.000.000 orang artinya sebanyak 2 juta wisatawan mengunjungi obyek wisata

Nama Indikator	:	Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Terstandarisasi
Konsep Definisi	:	Banyaknya jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang terstandarisasi
Rumusan	:	Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Terstandarisasi t Dimana : t = tahun ke t
Kegunaan	:	Mengukur banyaknya jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang terstandarisasi
Intepretasi	:	Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang terstandarisasi 100 Obyek Wisata

Nama Indikator	:	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang Tersertifikasi
Konsep Definisi	:	Maksud terverifikasi adalah pelaku usaha pariwisata memiliki sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment)
Rumusan	:	<i>Jumlah pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi t</i> Dimana : t = tahun ke t
Kegunaan	:	Mengukur banyaknya pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment)
Intepretasi	:	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi sebanyak 100 pelaku usaha artinya 100 pelaku usaha tersebut mempunyai sertifikat CHSE



Nama Indikator	:	Jumlah Masyarakat/Pelaku yang Mengikuti Pembinaan Kepariwisata
Konsep Definisi	:	Jumlah Masyarakat/Pelaku yang Mengikuti Pembinaan Kepariwisata
Rumusan	:	<i>Jumlah Masyarakat/Pelaku yang Mengikuti Pembinaan Kepariwisata</i> Dimana : t = tahun ke t
Kegunaan	:	Mengukur banyaknya Jumlah Masyarakat/Pelaku yang Mengikuti Pembinaan Kepariwisata
Intepretasi	:	ada sebanyak 100 masyarakat yang mengikuti pembinaan kepariwisataan

Nama Indikator	:	Jumlah seni dan budaya yang terpelihara
Konsep Definisi	:	Terpeliharanya seni dan budaya ditunjukkan dengan terselenggaranya even seni dan budaya daerah setiap tahunnya
Rumusan	:	<i>Jumlah seni dan budaya yang terpelihara</i> Dimana : t = tahun ke t
Kegunaan	:	Mengukur banyaknya jumlah seni dan budaya yang terpelihara
Intepretasi	:	Pada tahun 2017 ada sebanyak 17 jenis even seni dan budaya yang terpelihara

Nama Indikator	:	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Kelompok Seni Budaya
Konsep Definisi	:	Jumlah kelompok seni dan budaya yang dilestarikan dibandingkan jumlah keseluruhan kelompok seni
Rumusan	:	<i>Jumlah kelompok seni dan budaya yang dilestarikan</i> Dimana <i>Jumlah keseluruhan kelompok seni</i> t = tahun ke t $\times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur seberapa besar persentase pelestarian dan pengembangan Kelompok Seni Budaya
Intepretasi	:	Pada tahun 2017 ada sebanyak 100 % kelompok seni budaya yang dilestarikan



Nama Indikator	:	Jumlah Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya
Konsep Definisi	:	Terpeliharanya seni dan budaya ditunjukkan dengan terselenggaranya even seni dan budaya daerah setiap tahunnya
Rumusan	:	<i>Jumlah penyelenggaraan even seni dan budaya t</i> Dimana : t = tahun ke t
Kegunaan	:	Mengukur seberapa sering diadakan penyelenggaraan even seni dan budaya
Intepretasi	:	Pada tahun 2017 ada sebanyak 17 kali penyelenggaraan seni dan budaya

Nama Indikator	:	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional
Konsep Definisi	:	Hasil karya suatu kelompok manusia di suatu daerah yang timbul dari apa yang dirasakannya. Perasaan tersebut bersifat lokal, oleh karena itu hasilnya hanya digemari oleh kelompok atau masyarakat tertentu saja
Rumusan	:	<i>Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional t</i> Dimana : t = tahun ke t
Kegunaan	:	Mengukur banyaknya kelompok kesenian tradisional di suatu daerah
Intepretasi	:	Pada tahun 2017 tercatat ada sebanyak 20 kelompok kesenian tradisional

Nama Indikator	:	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Konsep Definisi	:	Jumlah semua benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan dan seberapa banyak yang telah ditangani dalam upaya pelestariannya. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meliputi cagar budaya dan permuseuman
Rumusan	:	<i>Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan t</i> Dimana : t = tahun ke t
Kegunaan	:	Mengukur banyaknya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Intepretasi	:	Pada tahun 2017 tercatat ada sebanyak 1 unit Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan



Nama Indikator	:	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi
Konsep Definisi	:	Proses secara sistemik dan metodologi untuk menggiatkan kembali potensi-potensi setempat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang penting menghadapi perubahan zaman
Rumusan	:	$Jumlah\ karya\ budaya\ yang\ direvitalisasi_t$ Dimana : t = tahun ke t
Kegunaan	:	Guna melestarikan karya budaya yang akan diwariskan dari generasi ke generasi
Intepretasi	:	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi pada tahun 2020 sebanyak 16 jenis.

Nama Indikator	:	Jumlah Karya Budaya Yang Diinventarisasi
Konsep Definisi	:	Pencatatan atau pengumpulan data terhadap karya budaya
Rumusan	:	$Jumlah\ karya\ budaya\ yang\ diinventarisasi_t$ Dimana : t = tahun ke t
Kegunaan	:	Untuk mencegah terjadinya kasus-kasus penklaiman budaya oleh negara lain yang tentunya akan merugikan Kabupaten Pasuruan
Intepretasi	:	Jumlah karya budaya yang diinventarisasi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 sebanyak 422 kelompok

METADATA INDIKATOR

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN





Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan
Konsep Definisi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran (berupa angka) dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi
Rumusan	:	IKM = jumlah total nilai rata-rata unsur tertimbang Konversi IKM = IKM × 2,5
Kegunaan	:	Mengukur kualitas pelayanan perpustakaan
Intepretasi	:	Nilai IKM terhadap pelayanan perpustakaan sebesar 3,8 dari skala 4 yang termasuk pada kategori sangat baik. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh semua unsur yang memiliki kategori sangat baik

Nama Indikator	:	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Layanan
Konsep Definisi	:	Berbagai jenis layanan perpustakaan adalah layanan sirkulasi, perpustakaan keliling, rujukan, rujukan cepat, bimbingan pemakaian sumber rujukan, penelusuran literatur, audio visual, penyediaan bahan pustaka, bimbingan membaca, bimbingan pemakai perpustakaan, layanan mendongeng kepada anak, dan foto copy
Rumusan	:	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Layanan
Kegunaan	:	Mengukur Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Layanan
Intepretasi	:	Jumlah pengunjung perpustakaan umum Tosari sebanyak 114 orang pada tahun 2019

Nama Indikator	:	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan
Konsep Definisi	:	Parameter yang diukur dalam audit kearsipan adalah: ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; program kearsipan; pengolahan arsip inaktif dengan retensi sekurang- kurangnya 10 tahun; penyusutan arsip; pengelolaan arsip statis; SDM kearsipan; kelembagaan; prasarana dan sarana kearsipan.
Rumusan	:	Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas: 1. Nilai 90 s/d 100 dengan kategori AA (Sangat memuaskan) 2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A



		(Memuaskan) 3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik) 4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik) 5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup) 6. Nilai Lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang) 7. Nilai 0 s.d 30 dengan Kategori D (Sangat Kurang)
Kegunaan	:	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan
Intepretasi	:	Semakin besar nilai audit arsip menunjukkan bahwa pelayanan kearsipan sangat memuaskan

Nama Indikator	:	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi A
Konsep Definisi	:	Akreditasi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh LAP-PNRI yang menyatakan bahwa suatu lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan minimal untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan yang terakreditasi A}}{\text{Jumlah seluruh perpustakaan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio Perpustakaan yang terakreditasi A
Intepretasi	:	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi A adalah 25%. Ini berarti seperempat dari jumlah seluruh perpustakaan adalah perpustakaan yang terakreditasi A

Nama Indikator	:	Persentase Perpustakaan Yang Memenuhi Standart Minimal
Konsep Definisi	:	Standar minimal perpustakaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan yang memenuhi standart minimal}}{\text{Jumlah seluruh perpustakaan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio Perpustakaan yang memenuhi standart minimal
Intepretasi	:	Persentase perpustakaan yang memenuhi standart minimal adalah 50%. Ini berarti setengah dari jumlah seluruh perpustakaan adalah perpustakaan yang memenuhi standart minimal



Nama Indikator	:	Kategori Pengelolaan Arsip Statis
Konsep Definisi	:	Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan
Rumusan	:	
Kegunaan	:	
Intepretasi	:	

Nama Indikator	:	Persentase Meningkatnya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah
Konsep Definisi	:	Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Rumusan	:	$\frac{A_t - A_{t-1}}{A_{t-1}} \times 100\%$ Ket : At = Jumlah penyelamatan dan pelestarian arsip daerah pada tahun t At-1 = Jumlah penyelamatan dan pelestarian arsip daerah pada tahun t-1
Kegunaan	:	Mengukur peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah
Intepretasi	:	Persentase meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah adalah 50%. Ini berarti jumlah penyelamatan dan pelestarian arsip daerah meningkat setengah kali lebih banyak dari tahun sebelumnya



Nama Indikator	:	Persentase Arsip Daerah Tersimpan dalam Keadaan Baik
Konsep Definisi	:	Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah arsip daerah tersimpan dalam keadaan baik}}{\text{Jumlah seluruh arsip daerah yang tersimpan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio arsip yang daerah yang tersimpan dalam keadaan baik
Intepretasi	:	Persentase arsip daerah tersimpan dalam keadaan baik adalah 25%. Artinya seperempat dari seluruh arsip yang tersimpan telah tersimpan dalam keadaan baik

Nama Indikator	:	Persentase pengelolaan arsip unit kerja secara baku
Konsep Definisi	:	Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah pengelolaan arsip unit kerja secara baku}}{\text{Jumlah seluruh pengelolaan arsip unit kerja}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat pengelolaan arsip unit kerja yang dilakukan secara baku
Intepretasi	:	Persentase pengelolaan arsip unit kerja secara baku adalah 50%. Ini berarti setengah dari seluruh pengelolaan arsip unit kerja telah dilakukan secara baku

METADATA INDIKATOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

The background of the page features a dark green upper section and a white lower section, separated by a series of flowing, wavy lines in a medium green color. These lines create a sense of movement and depth, starting from the left side and curving across the page.



Nama Indikator	:	Tercapainya Target Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsep Definisi	:	Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	
Intepretasi	:	

Nama Indikator	:	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Sesuai Dengan Regulasi
Konsep Definisi	:	Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Perencanaan pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila diawali dengan persiapan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Mengukur tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi
Intepretasi	:	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi adalah 50%. Ini berarti setengah dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi telah tersedia



Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik
Konsep Definisi	:	Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Perencanaan pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila diawali dengan persiapan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya
Rumusan	:	Jumlah OPD lingkup bidang ekonomi yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik/ jumlah seluruh OPD lingkup bidang ekonomi) x 100%
Kegunaan	:	Mengukur rasio Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik
Intepretasi	:	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik adalah 50%. Artinya setengah dari jumlah OPD lingkup bidang ekonomi mempunyai dokumen perencanaan yang baik

Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik
Konsep Definisi	:	Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Perencanaan pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila diawali dengan persiapan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya
Rumusan	:	Jumlah OPD lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik/ jumlah seluruh OPD lingkup bidang sosial budaya) x 100%

Kegunaan	:	Mengukur rasio Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik
Intepretasi	:	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik adalah 50%. Artinya setengah dari jumlah OPD lingkup bidang sosial budaya mempunyai dokumen perencanaan yang baik

Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik
Konsep Definisi	:	Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Perencanaan pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila diawali dengan persiapan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya
Rumusan	:	Jumlah OPD lingkup bidang prasarana yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik/ jumlah seluruh OPD lingkup bidang prasarana) x 100%
Kegunaan	:	Mengukur rasio Perangkat Daerah lingkup bidang prasarana wilayah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik
Intepretasi	:	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang prasarana wilayah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik adalah 50%. Artinya setengah dari jumlah OPD lingkup bidang prasarana wilayah mempunyai dokumen perencanaan yang baik



Nama Indikator	:	Persentase Kesuaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan
Konsep Definisi	:	
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Mengukur tingkat kesuaian penyusunan dokumen perencanaan
Intepretasi	:	Persentase kesuaian penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan adalah 25%. Ini berarti seperempat dari keseluruhan dokumen, penyusunannya telah sesuai dengan ketentuan

Nama Indikator	:	Persentase Kesesuaian Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Peraturan Perundang-Undangan
Konsep Definisi	:	
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Mengukur tingkat kesuaian penyusunan dokumen perencanaan
Intepretasi	:	Persentase kesuaian penyusunan dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan adalah 50%. Ini berarti setengah dari keseluruhan dokumen, penyusunannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Penelitian dan Pengembangan
Konsep Definisi	:	
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Mengukur tingkat peningkatan penelitian dan pengembangan

Intepretasi	:	
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Persentase Hasil Litbang yang Menjadi Dasar Kebijakan Daerah
Konsep Definisi	:	
Rumusan	:	
Kegunaan	:	
Intepretasi	:	

Nama Indikator	:	Nilai SAKIP Perencanaan
Konsep Definisi	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
Rumusan	:	Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100
Kegunaan	:	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya
Intepretasi	:	Nilai SAKIP sebesar 75. Artinya tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil dinilai Sangat Baik



Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik
Konsep Definisi	:	Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Perencanaan pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila diawali dengan persiapan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya
Rumusan	:	$\left(\frac{\text{Jumlah OPD yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik}}{\text{jumlah seluruh OPD}} \right) \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik
Intepretasi	:	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik adalah 50%. Artinya setengah dari jumlah OPD mempunyai dokumen perencanaan yang baik

METADATA INDIKATOR

DINAS SOSIAL



Nama Indikator : Persentase PMKS

Konsep Definisi	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah seluruh penduduk}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio PMKS
Intepretasi	:	Persentase PMKS di suatu daerah adalah 25%. Artinya seperempat dari total keseluruhan penduduk di daerah tersebut merupakan PMKS

Nama Indikator : Persentase Penanganan PMKS

Konsep Definisi	:	Penyelenggaraan Penanganan PMKS bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur tingkat penanganan PMKS
Intepretasi	:	Persentase Penanganan PMKS di suatu daerah adalah 50%. Ini berarti setengah dari total keseluruhan PMKS di daerah tersebut telah mendapatkan penanganan

Nama Indikator : Persentase Penanganan PMKS

Konsep Definisi	:	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Mengukur Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan
Intepretasi	:	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan adalah 20 orang. Artinya terdapat 20 orang PMKS yang mendapatkan pelayanan di wilayah tersebut

Nama Indikator : Jumlah PMKS yang ada

Konsep Definisi	:	Jumlah keseluruhan PMKS
Rumusan	:	<i>Jumlah keseluruhan PMKS_t</i>
Kegunaan	:	Mengukur Jumlah PMKS yang ada
Intepretasi	:	Jumlah PMKS yang ada di suatu wilayah adalah 30 orang. Artinya terdapat 30 orang PMKS di wilayah tersebut

Nama Indikator : Persentase Pilar-Pilar yang aktif dalam penanganan PMKS

Konsep Definisi	:	Pilar-pilar sosial merupakan mitra pemerintah yang terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna dan Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai pelaku penyelenggara kesejahteraan Sosial
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah pilar yang aktif dalam penanganan PMKS}}{\text{Jumlah seluruh pilar}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio Pilar-Pilar yang aktif dalam penanganan PMKS
Intepretasi	:	Persentase Pilar-Pilar yang aktif dalam penanganan PMKS pada suatu daerah adalah 25%. Artinya seperempat dari seluruh pilar di daerah tersebut aktif dalam penanganan PMKS

Nama Indikator : persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Konsep Definisi	:	Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah seluruh PMKS}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengetahui rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin banyak PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Nama Indikator : persentase Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Konsep Definisi	:	sistem kerja sama antar perangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada <i>tingkat lokal</i> dalam pelaksanaan tugas di bidang uks
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah WKSBM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah seluruh WKSBM}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio WKSBM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin banyak WKSBM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Nama Indikator : persentase PMKS yang tertangani

Konsep Definisi	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar
------------------------	---	---



Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh PMKS}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio PMKS yang tertangani
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin banyak PMKS yang tertangani

Nama Indikator	:	persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
Konsep Definisi	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah seluruh PMKS yang memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengetahui rasio PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin banyak PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya

Nama Indikator	:	persentase keluarga penerima manfaat yang graduasi
Konsep Definisi	:	Keluarga penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria kepesertaan dan/atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Mengukur seberapa banyak keluarga penerima manfaat yang graduasi
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai presentase menunjukkan semakin banyak jumlah keluarga penerima manfaat yang graduasi



Nama Indikator : persentase PMKS yang direhabilitasi

Konsep Definisi	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah seluruh PMKS}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur rasio PMKS yang direhabilitasi
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin banyak PMKS yang direhabilitasi

Nama Indikator : persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa darurat

Konsep Definisi	:	
Rumusan	:	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa darurat/Jumlah seluruh PMKS x 100%
Kegunaan	:	Mengukur rasio korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa darurat
Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin banyak korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa darurat



METADATA INDIKATOR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Nama Indikator	:	Persentase Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Konsep Definisi	:	jumlah kelompok binaan lembaga ekonomi pedesaan
Rumusan	:	$\frac{\text{jumlah binaan lembaga ekonomi pedesaan}}{\text{jumlah lembaga ekonomi keseluruhan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur perkembangan jumlah orang yang dibina lembaga ekonomi pedesaan
Intepretasi	:	Persentase jumlah binaan lembaga ekonomi pedesaan sebesar 99,00 persen. Artinya dari 100 orang dimana 99 dibina lembaga ekonomi pedesaan. Sementara sisanya masih belum mendapat pembinaan

Nama Indikator	:	Jumlah Sarana Prasarana Pasar Desa
Konsep Definisi	:	Meningkatnya sarana prasarana pasar desa
Rumusan	:	Jumlah sarana prasarana pasar desa
Kegunaan	:	Untuk mengukur peningkatan sarana prasarana pasar desa
Intepretasi	:	Jumlah sarana prasarana pasar desa berjumlah 10 unit dengan 3 unit kamar mandi, 1 unit musholah, 6 titik parkir.

Nama Indikator	:	Persentase Binaan Lembaga Masyarakat
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara jumlah binaan lembaga masyarakat terhadap jumlah lembaga masyarakat
Rumusan	:	$\frac{\text{jumlah binaan lembaga masyarakat}}{\text{jumlah lembaga masyarakat}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur persentase lembaga masyarakat yang dibina
Intepretasi	:	Persentase binaan lembaga masyarakat sebesar 99,00 persen. Artinya dari 100 orang dimana 99 dibina lembaga masyarakat. Sementara sisanya belum mendapat pembinaan

Nama Indikator	:	Persentase Binaan Kelompok Masyarakat
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara jumlah binaan kelompok masyarakat terhadap jumlah kelompok masyarakat
Rumusan	:	$\frac{\text{jumlah binaan kelompok masyarakat}}{\text{jumlah kelompok masyarakat}} \times 100\%$



Kegunaan	:	Mengukur ada berapa persen kelompok masyarakat yang dibina
Intepretasi	:	Persentase binaan kelompok masyarakat sebesar 99,00 persen. Artinya dari 100 orang dimana 99 dibina kelompok masyarakat. Sementara sisanya belum mendapat pembinaan

Nama Indikator	:	Persentase Kemasyarakatan Desa yang Aktif
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara kelembagaan masyarakat desa yang aktif terhadap jumlah lembaga masyarakat
Rumusan	:	$\frac{\text{jumlah kelembagaan masyarakat desa yang aktif}}{\text{jumlah kelembagaan masyarakat desa}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur lembaga kemasyarakatan desa yang aktif
Intepretasi	:	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif 99,00 persen. Artinya dari 100 orang dimana 99 lembaga kemasyarakatn desa yang aktif. Sementara sisanya belum mendapat pembinaan

Nama Indikator	:	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif
Konsep Definisi	:	Perbandingan
Rumusan	:	$\frac{\text{jumlah BUMDes yang aktif}}{\text{jumlah BUMDes}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur seberapa banyak lembaga ekonomi desa yang aktif
Intepretasi	:	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif 99,00 persen. Artinya dari 100 orang dimana 99 lembaga ekonomi desa yang aktif. Sementara sisanya belum mendapat pembinaan

Nama Indikator	:	Persentase Kinerja Desa yang Baik (Persentase Pemerintah Desa yang Berkualitas)
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara Jumlah Desa yang memiliki Kinerja Pemerintahan Desa yang baik terhadap jumlah keseluruhan desa
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah Desa yang memiliki Kinerja Pemerintahan Desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengukur jumlah Desa yang memiliki Kinerja Pemerintahan Desa yang baik



Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa jumlah desa yang mempunyai kinerja baik semakin banyak
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Persentase Partisipasi masyarakat
Konsep Definisi	:	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi
Rumusan	:	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa (yang hadir)/jumlah masyarakat yang terundang dalam perencanaan pembangunan desa x 100%
Kegunaan	:	Untuk mengukur besarnya partisipasi masyarakat
Intepretasi	:	Persentase partisipasi masyarakat sebesar 99,00 persen. Artinya dari 100 total penduduk dimana 99 penduduk

Nama Indikator	:	Persentase Desa Mandiri
Konsep Definisi	:	Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa.
Intepretasi	:	Persentase Desa Mandiri sebesar 99,00 persen. Artinya dari 100 jumlah desa berkembang dimana 99 desa memenuhi kriteria desa mandiri. Sementara sisanya masih belum memenuhi kriteria

METADATA INDIKATOR

BADAN KEUANGAN DAERAH





Nama Indikator	:	Aset
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan aset adalah seluruh kekayaan milik individu atau kelompok (badan usaha).
Rumusan	:	$= hutang + modal$
Kegunaan	:	Nilai aset digunakan untuk mengetahui perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai aset biasanya mendorong manajemen untuk menambah pendanaan baru.

Nama Indikator	:	Aset Lancar
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan aset lancar adalah kekayaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai.
Rumusan	:	$= Kas + Piutang + Persediaan + Beban$
Kegunaan	:	Nilai aset digunakan dalam pengerjaan operasional perusahaan. Salah satu manfaatnya adalah untuk membayar biaya-biaya yang muncul, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membayar utang, membayar sewa gedung, dan sebagainya.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai aset lancar menunjukkan bahwa semakin kuat posisi keuangan atau semakin stabil kondisi keuangan.

Nama Indikator	:	Kas
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan.
Rumusan	:	$= seluruh\ alat\ pembayaran\ yang\ bisa\ digunakan\ untuk\ melakukan\ transaksi$
Kegunaan	:	Nilai kas dapat digunakan untuk menghitung cash ratio.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai kas artinya semakin besar uang tunai yang dimiliki.



Nama Indikator	:	Piutang (Netto)
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan piutang adalah klaim yang dimiliki seseorang atau badan usaha terhadap orang lain atau badan usaha lain yang berhutang atau memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang terhadapnya dalam jangka waktu tertentu.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Nilai piutang digunakan sebagai salah satu aktiva lancar dalam neraca perusahaan.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai piutangnya, maka akan menjadi semakin panjang pula waktu yang dibutuhkan oleh para debitur untuk melunasinya serta membuat nilai terminnya semakin tinggi.

Nama Indikator	:	Beban Dibayar Dimuka
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan beban dibayar dimuka adalah semua biaya yang sudah dibayar tetapi belum dibebankan pada periode akuntansi yang berjalan.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Nilai beban dibayar dimuka digunakan untuk mengetahui semua biaya yang sudah dibayar tetapi belum dibebankan pada periode akuntansi yang berjalan.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai beban yang dibayar dimuka artinya semakin banyak beban yang sudah dibayar tapi belum dibebankan pada periode yang berjalan.

Nama Indikator	:	Persediaan
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Nilai persediaan digunakan untuk mengetahui jumlah perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah.

Intepretasi	:	Semakin besar nilai persediaan menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah.
--------------------	---	--

Nama Indikator	:	Investasi Jangka Panjang
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan investasi jangka panjang merupakan investasi dimana daya yang digunakan akan dijalankan terus menerus dan baru bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo (minimal satu tahun).
Rumusan	:	
Kegunaan	:	Nilai investasi jangka panjang digunakan untuk tabungan keuangan pribadi atau keluarga yang butuh biaya sangat besar seperti dana pendidikan, biaya ibadah umrah atau haji, biaya pernikahan, biaya beli rumah, biaya pensiun, dan lain sebagainya.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai investasi jangka panjang maka semakin banyak tabungan keuangan pribadi atau keluarga.

Nama Indikator	:	Rasio Lancar (Curent Ratio)
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan rasio lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang lancar-nya yang akan jatuh tempo ketika ditagih secara keseluruhan.
Rumusan	:	$= \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$
Kegunaan	:	Nilai rasio lancar juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat keamanan margin (margin of safety) suatu perusahaan.
Intepretasi	:	Jika rasio lancar suatu perusahaan rendah atau dibawah standar industry, maka perusahaan tersebut sedang mengalami masalah likuidasi. Apabila suatu perusahaan mempunyai rasio lancar yang terlalu tinggi juga kurang bagus.

Nama Indikator	:	Rasio Quick (Quick Ratio)
Konsep Definisi	:	Rasio cepat adalah rasio yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan (inventory).
Rumusan	:	$= \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$
Kegunaan	:	Nilai rasio cepat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
Intepretasi	:	Nilai Quick Ratio yang baik adalah bernilai 1. Jika nilai yang dihasilkan berada di bawah 1, maka perusahaan dianggap tidak mampu menunaikan atau membayar utang lancar dalam satu siklus operasional tertentu.

Nama Indikator	:	Rasio Solvabilitas
Konsep Definisi	:	Rasio solvabilitas adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis.
Rumusan	:	$= \frac{\text{Pendapatan Bersih} + \text{Depresiasi}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek} + \text{Kewajiban Jangka Panjang}}$
Kegunaan	:	Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui apakah arus kas perusahaan cukup untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan dengan demikian merupakan ukuran kesehatan keuangannya.
Intepretasi	:	Semakin tinggi rasio solvabilitas maka akan semakin tinggi resiko kerugian yang akan terjadi, namun terdapat kesempatan memperoleh profit yang besar pula. Sebaliknya jika perusahaan mempunyai rasio solvabilitas yang rendah tentunya perusahaan tersebut memiliki resiko kerugian yang lebih kecil.



Nama Indikator	:	Rasio Aktivitas
Konsep Definisi	:	Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva.
Rumusan	:	$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$ $\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.
Intepretasi	:	Secara umum, semakin tinggi nilai rasio aktivitas, maka semakin baik kinerja perputaran (turnover) aset perusahaan, baik untuk aset lancar, aset tetap, maupun total aset secara keseluruhan. Dengan kata lain, perusahaan mampu memanfaatkan aset untuk meraih pendapatan.

Nama Indikator	:	Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal
Konsep Definisi	:	Derajat desentralisasi fiskal adalah nilai dari perbandingan antara nilai realisasi pendapatan asli daerah dengan nilai realisasi total penerimaan daerah yang diukur dalam satuan persentase.
Rumusan	:	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$
Kegunaan	:	Derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri.
Intepretasi	:	Semakin tinggi derajat desentralisasi maka menunjukkan bahwa semakin baik dalam melaksanakan otonomi daerah karena tingkat ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat semakin kecil.



Nama Indikator	:	IKM Layanan Pajak Daerah
Konsep Definisi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan konsumen yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat konsumen terhadap kinerja layanan yang diterima dari penyelenggara pelayanan publik. Merujuk pada Permenpan No. 25 Tahun 2004 bahwa IKM wajib dihitung oleh setiap penyelenggara pelayanan publik.
Rumusan	:	$= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur Layanan Pajak Daerah}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$
Kegunaan	:	IKM Layanan Pajak Daerah dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan kualitas pelayanan pajak daerah.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai IKM maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat, artinya pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik semakin baik.

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Pajak Daerah (PAD)
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Rumusan	:	$= \frac{\text{Pajak Daerah terakhir} - \text{Pajak Daerah awal}}{\text{Pajak Daerah awal}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Persentase peningkatan pajak daerah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kenaikan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
Intepretasi	:	Semakin besar persentase peningkatan pajak daerah maka menunjukkan bahwa semakin meningkat pajak daerah di tempat tersebut.



Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).
Rumusan	:	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah terakhir} - \text{Pendapatan Asli Daerah awal}}{\text{Pendapatan Asli Daerah awal}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kenaikan Pendapatan Asli Daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Intepretasi		Semakin besar persentase peningkatan pendapatan asli daerah maka menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah semakin bertambah banyak.

METADATA INDIKATOR

DINAS PERIKANAN





Nama Indikator	:	PDRB Sub Sektor Perikanan
Konsep Definisi	:	Nilai PDRB pada sub sektor perikanan
Rumusan	:	Nilai PDRB pada sub sektor perikanan_t Dimana : t = tahun ke t
Kegunaan	:	Untuk mengetahui kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB
Intepretasi	:	Semakin besar nilai PDRB sub sektor perikanan artinya semakin besar kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB suatu daerah

Nama Indikator	:	Persentase Produksi Perikanan
Konsep Definisi	:	Produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.
Rumusan	:	$P_t = \frac{Q_t - Q_a}{Q_a} \times 100\%$ Dimana : P_t = Persentase produksi perikanan pada tahun ke-t Q_t = Jumlah produksi perikanan pada tahun ke-t Q_a = Jumlah produksi perikanan pada tahun awal (2018)
Kegunaan	:	Melihat besaran sumbangan produksi unit pengamatan/komoditi terhadap kelompok unit pengamatan/komoditi perikanan
Intepretasi	:	Nilai persentase besar menunjukkan pengaruh produksi unit pengamatan/komoditi yang besar terhadap terhadap kelompok unit pengamatan/komoditi perikanan.

Nama Indikator	:	Perikanan yang Mandiri
Konsep Definisi	:	
Rumusan	:	
Kegunaan	:	
Intepretasi	:	
Nama Indikator	:	Persentase Produksi Perikanan Tangkap
Konsep Definisi	:	Perbandingan produksi unit pengamatan/komoditi terhadap kelompok unit pengamatan/komoditi perikanan tangkap.
Rumusan	:	$P_t = \frac{Q_t - Q_a}{Q_a} \times 100\%$ Dimana :

	P_t = Persentase produksi perikanan tangkap pada tahun ke-t Q_t = Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun ke-t Q_a = Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun awal (2018)
Kegunaan	: Melihat besaran sumbangan produksi unit pengamatan/komoditi terhadap kelompok unit pengamatan/komoditi perikanan tangkap
Intepretasi	: Nilai persentase besar menunjukkan pengaruh produksi unit pengamatan/komoditi yang besar terhadap terhadap kelompok unit pengamatan/komoditi perikanan tangkap

Nama Indikator	: Persentase Produksi Perikanan Budidaya
Konsep Definisi	: Perbandingan produksi unit pengamatan/komoditi terhadap kelompok unit pengamatan/komoditi perikanan budidaya
Rumusan	: $P_t = \frac{Q_t - Q_a}{Q_a} \times 100\%$ Dimana : P_t = Persentase produksi perikanan budidaya pada tahun ke-t Q_t = Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun ke-t Q_a = Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun awal (2018)
Kegunaan	: Melihat besaran sumbangan produksi unit pengamatan/komoditi terhadap kelompok unit pengamatan/komoditi perikanan budidaya
Intepretasi	: Nilai persentase besar menunjukkan pengaruh produksi unit pengamatan/komoditi yang besar terhadap terhadap kelompok unit pengamatan/komoditi perikanan budidaya

Nama Indikator	: Nilai Omzet Pelaku Usaha Perikanan (Rp.)
Konsep Definisi	: Omzet adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu.
Rumusan	:
Kegunaan	: Untuk mengetahui nilai omzet yang dihasilkan dari proses usaha perikanan
Intepretasi	: Semakin tinggi produk yang terjual mencerminkan nilai omzet yang semakin tinggi.



Nama Indikator	:	Persentase Peserta Pelatihan Perikanan yang Menjadi Wirausaha Baru
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara jumlah peserta pelatihan perikanan yang menjadi wirausaha baru dengan jumlah total peserta pelatihan perikanan
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan perikanan yang menjadi wirausaha baru}}{\text{Jumlah peserta pelatihan perikanan}} \times 100$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui persentase pelatihan perikanan yang menjadi wirausaha baru
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya berarti semakin tinggi peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru

METADATA INDIKATOR

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH**

The lower half of the page features a large, abstract graphic consisting of several overlapping, wavy, organic shapes. The colors are a vibrant green and a clean white, creating a modern, flowing design that contrasts with the dark green background.



Nama Indikator	:	Persentase ASN yang Lulus Mengikuti Ujian UD TK I
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan ujian UD TK I yaitu Ujian Dinas yang merupakan syarat bagi PNS yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I (II/d) menjadi ke Penata Muda (III/a).
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK I}}{\text{Jumlah ASN yang mengikuti ujian UD TK I}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Persentase ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK I digunakan untuk mengetahui besarnya persentase ASN yang berhasil lulus ujian kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai Persentase ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK I menunjukkan bahwa semakin banyak ASN yang lulus dalam ujian UD TK I.

Nama Indikator	:	Persentase ASN yang Lulus Mengikuti Ujian UD TK II
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan ujian UD TK II yaitu Ujian Dinas yang merupakan syarat bagi PNS yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I (III/d) menjadi Pembina (IV/a).
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK II}}{\text{Jumlah ASN yang mengikuti ujian UD TK II}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Persentase ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK II digunakan untuk mengetahui besarnya persentase ASN yang berhasil lulus ujian kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai Persentase ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK II menunjukkan bahwa semakin banyak ASN yang lulus dalam ujian UD TK II.



Nama Indikator	:	Persentase ASN yang Lulus Mengikuti Ujian PI
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian untuk Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma yang pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang diperolehnya.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah ASN yang lulus mengikuti ujian PI})}{(\text{Jumlah ASN yang mengikuti ujian PI})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Persentase ASN yang lulus mengikuti ujian PI digunakan untuk mengetahui besarnya persentase ASN yang berhasil lulus ujian kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai Persentase ASN yang lulus mengikuti ujian PI menunjukkan bahwa semakin banyak ASN yang lulus dalam ujian PI.

Nama Indikator	:	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
Konsep Definisi	:	Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.
	:	



Rumusan	<i>=Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi+Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi+Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja+Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</i> <i>Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi=bobot sub dimensi kualifikasi ke-j x rating jawaban sub dimensi kualifikasi ke-j</i> <i>Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi=bobot sub dimensi kompetensi ke-k x rating jawaban sub dimensi kompetensi ke-k</i> <i>Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja=bobot sub dimensi kinerja ke-l x rating jawaban sub dimensi kinerja ke-l</i> <i>Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin=bobot sub dimensi disiplin ke-m x rating jawaban sub dimensi disiplin ke-m</i>
Kegunaan	: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.
Intepretasi	: Dimensi Kualifikasi bernilai 14,2. Yang diartikan sebagai kondisi dimana sebagian besar PNS provinsi yang menjadi responden memiliki kualifikasi pendidikan formal rata-rata dibawah jenjang S1/D4. Hanya 3 provinsi, Sultra, Kaltara dan Bengkulu yang memiliki PNS berpendidikan di atas S1/D4. Karena itu, direkomendasikan agar segera diupayakan strategi untuk meningkatkan jenjang/tingkat pendidikan.

Nama Indikator	: Persentase Pegawai yang Lulus Diklat
Konsep Definisi	: Yang dimaksud dengan diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
Rumusan	: $= (\text{Jumlah pegawai yang lulus diklat} / \text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat}) \times 100\%$
Kegunaan	: Persentase Pegawai yang lulus Diklat digunakan untuk mengetahui besarnya persentase pegawai yang mengikuti diklat dan lulus.



Intepretasi	:	Semakin besar nilai Persentase Pegawai yang lulus Diklat menunjukkan bahwa semakin banyak pegawai yang berhasil lulus diklat.
--------------------	---	---

Nama Indikator	:	Persentase ASN yang Memiliki Kualifikasi S1/S2/S3
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Persentase ASN yang memiliki kualifikasi S1/S2/S3 yaitu persentase Aparatur Sipil Negara yang memiliki ijazah pendidikan jenjang S1/S2/S3.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah ASN yang memiliki kualifikasi S1 atau S2 atau S3})}{(\text{Jumlah ASN})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi S1/S2/S3 digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase ASN yang memiliki ijazah pendidikan jenjang S1/S2/S3.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai Persentase ASN yang memiliki kualifikasi S1/S2/S3 menunjukkan bahwa semakin banyak ASN yang memiliki ijazah pendidikan jenjang S1/S2/S3.

Nama Indikator	:	Persentase ASN yang Lulus Ujian Tingkat 1,2, dan Penyesuaian Ijazah
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2, dan penyesuaian Ijazah yaitu persentase ASN yang mengikuti dan berhasil lulus ujian tingkat 1,2, dan penyesuaian ijazah.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah ASN yang lulus ujian tingkat 1,2, dan penyesuaian ijazah})}{(\text{Jumlah ASN gol I a s/d III d})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2, dan penyesuaian Ijazah digunakan untuk mengetahui besarnya persentase ASN yang berhasil lulus ujian tingkat 1, 2, dan penyesuaian ijazah.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2, dan penyesuaian Ijazah menunjukkan bahwa semakin banyak ASN yang berhasil lulus ujian tingkat 1,2,dan penyesuaian ijazah.
Nama Indikator	:	Persentase ASN yang Pernah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural



Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) struktural adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur yang sesuai dengan jenjang.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah ASN yang pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural})}{(\text{Jumlah ASN yang menduduki jabatan struktural})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Persentase ASN yang pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural digunakan untuk mengetahui banyaknya ASN yang pernah mengikuti diklat struktural.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai Persentase ASN yang pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural maka semakin banyak ASN yang pernah mengikuti diklat struktural.

Nama Indikator	:	Persentase Peserta Diklat Aparatur Berpredikat Sangat Memuaskan
Konsep Definisi	:	Yang dimaksud dengan diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah peserta diklat aparatur berpredikat sangat memuaskan})}{(\text{Jumlah peserta diklat aparatur})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Persentase Persentase peserta diklat aparatur berpredikat sangat memuaskan digunakan untuk mengetahui banyaknya peserta diklat aparatur yang berhasil mendapatkan predikat sangat memuaskan.
Intepretasi	:	Semakin besar nilai persentase peserta diklat aparatur berpredikat sangat memuaskan maka semakin baik kemampuan peserta diklat.

METADATA INDIKATOR

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU**

The background of the page features a dark green upper section and a white lower section, separated by a series of flowing, wavy lines in a medium green color. These lines create a sense of movement and modern design.



Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sekretariat DPRD
Konsep Definisi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka . Angka ditetapkan dengan skala 1 sampai dengan 4
Rumusan	:	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ $IKM = SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$
Kegunaan	:	Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik
Intepretasi	:	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 80,5. Artinya kinerja unit pelayanan Sekretariat DPRD masuk kinerja unit pelayanan Baik

Nama Indikator	:	Persentase Nilai Investasi yang Terealisasi
Konsep Definisi	:	Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang sudah terlaksana
Rumusan	:	$\frac{\text{Nilai investasi yang terealisasi}}{\text{Jumlah nilai investasi}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur besaran nilai investasi yang terealisasikan
Intepretasi	:	Jumlah nilai investasi yang terealisasi sebesar 10,03% artinya dari keseluruhan nilai investasi hanya 10,03 persen yang terealisasi

Nama Indikator	:	Peningkatan Nilai Investasi yang ditanamkan
Konsep Definisi	:	Adanya pertambahan jumlah nilai investasi yang ditanamkan dari tahun sebelumnya
Rumusan	:	$\text{Jumlah nilai investasi yang ditanamkan}_t - \text{Jumlah nilai investasi yang ditanamkan}_{t-1}$ dimana : t = tahun ke t t-1 = tahun ke t -1
Kegunaan	:	Mengukur peningkatan nilai investasi yang ditanamkan
Intepretasi	:	Jumlah peningkatan nilai investasi yang ditanamkan pada tahun 2017 sebesar 7,64 T artinya ada peningkatan jumlah invesatsi yang ditanamkan sebesar 7,64 T dari tahun 2016



Nama Indikator	:	Jumlah Penyelesaian Ijin
Konsep Definisi	:	Jumlah kepengurusan terkait perizinan yang berhasil diselesaikan hingga terbit surat keputusan
Rumusan	:	$\text{Jumlah penyelesaian ijin}_t$ Dimana : t= tahun ke t
Kegunaan	:	Mengukur jumlah penyelesaian ijin
Intepretasi	:	Jumlah penyelesaian ijin pada tahun 2017 sebanyak 2.999 ijin.

Nama Indikator	:	Jumlah Pengunjung Informasi Tata Ruang di DPMPT Kabupaten Pasuruan.
Konsep Definisi	:	Jumlah informasi tata ruang yang dapat diakses oleh masyarakat baik melalui web, baliho ataupun datang langsung ke petugas pelayanan
Rumusan	:	$\text{Jumlah Pengunjung Informasi Tata Ruang di DPMPT Kabupaten Pasuruan}_t$ Dimana : t= tahun ke t
Kegunaan	:	Mengetahui banyaknya pengunjung informasi tata ruang di DPMPT Kabupaten Pasuruan.
Intepretasi	:	Jumlah pengunjung informasi tata ruang di DPMPT Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebanyak 592 orang.

Nama Indikator	:	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)
Konsep Definisi	:	Besarnya nilai investasi berskala nasional (PMDN)
Rumusan	:	$\text{Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)}_t$ Dimana : t= tahun ke t
Kegunaan	:	Mengukur besarnya nilai investasi berskala nasional (PMDN)
Intepretasi	:	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) tahun 2017 sebesar Rp 5.061.179.101.573,-



Nama Indikator	:	Persentase pengaduan yang tertangani
Konsep Definisi	:	Pengaduan masyarakat yang ditangani dibanding jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur banyaknya pengaduan masyarakat yang tertangani
Intepretasi	:	Persentase pengaduan yang tertangani sebesar 50% artinya dari 100 orang terdapat 50 orang yang pengaduannya ditangani

Nama Indikator	:	Persentase izin yang diterbitkan
Konsep Definisi	:	Jumlah perizinan yang diterbitkan dibagi dengan jumlah permohonan izin
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah perizinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan izin}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur banyaknya perizinan yang diterbitkan
Intepretasi	:	Persentase izin yang diterbitkan sebesar 89% artinya dari 100 permohonan izin terdapat 89 izin yang diterbitkan

Nama Indikator	:	Persentase Izin yang Berhasil Terverifikasi
Konsep Definisi	:	Jumlah perizinan yang dirverifikasi dibagi dengan jumlah permohonan izin
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah perizinan yang terverifikasi}}{\text{Jumlah permohonan izin}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur banyaknya perizinan yang terverifikasi
Intepretasi	:	Persentase izin yang terverifikasi sebesar 89% artinya dari 100 permohonan izin terdapat 89 izin yang terverifikasai

Nama Indikator	:	Persentase Izin yang Berhasil Terverifikasi
-----------------------	---	--



Konsep Definisi	:	Jumlah perizinan yang dirverifikasi dibagi dengan jumlah permohonan izin
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah perizinan yang terverifikasi}}{\text{Jumlah permohonan izin}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur banyaknya perizinan yang terverifikasi
Intepretasi	:	Persentase izin yang terverifikasi sebesar 89% artinya dari 100 permohonan izin terdapat 89 izin yang terverifikasai



METADATA INDIKATOR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH



Nama Indikator	:	Persentase Pengurangan Resiko Bencana
Konsep Definisi	:	Perbandingan jumlah masyarakat yang mendapat informasi rawan bencana dengan jumlah keseluruhan masyarakat di kawasan rawan bencana
Rumusan	:	$\frac{(a)}{(b)} \times 100\%$ Keterangan : a = Jumlah Masyarakat yang dapat Informasi dan Pengetahuan Penanggulangan Bencana b=Jumlah Masyarakat Kabupaten Pasuruan di Daerah Rawan Bencana yang membutuhkan informasi dan Pengetahuan PB
Kegunaan	:	Mengukur seberapa banyak masyarakat di daerah rawan bencana yang memperoleh informasi kebencanaan
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memperoleh informasi kebencanaan semakin besar, sehingga persentase pengurangan resiko bencana juga semakin besar

Nama Indikator	:	Persentase Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara Jumlah Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat terhadap Jumlah Korban Bencana
Rumusan	:	$a/b \times 100\%$ Keterangan : a=Perbandingan antara Jumlah Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat b=Jumlah Korban Bencana
Kegunaan	:	Mengukur banyaknya Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa jumlah Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat semakin banyak

Nama Indikator	:	Indeks Resiko Bencana
Konsep Definisi	:	Indeks Resiko Bencana adalah mengkaji dan memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas.
Rumusan	:	$Bahaya \times Kerentanan / Kemampuan \times 100\%$



Kegunaan	:	Untuk mengetahui tingkat bahaya atau ancaman per jenis bencana, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas atau kemampuan dalam penanggulangan bencana
Intepretasi	:	Semakin rendah skor Indeks Risiko Bencana, mengindikasikan risiko bencana semakin kecil

Nama Indikator	:	Persentase Desa Tangguh Bencana yang dibentuk dikawasan rawan bencana
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara Jumlah desa tangguh bencana terhadap Jumlah desa rawan bencana
Rumusan	:	$\frac{(\text{Jumlah desa tangguh bencana})}{(\text{Jumlah desa rawan bencana})} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur seberapa banyak jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk di Kabupaten Pasuruan
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin banyak desa tangguh bencana yang dibentuk dikawasan rawan bencana

Nama Indikator	:	Persentase korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara korban yang menerima bantuan pemenuhan dasar dengan jumlah korban bencana
Rumusan	:	$a/b \times 100\%$ Keterangan : a = Jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar b = Jumlah korban bencana
Kegunaan	:	Mengukur seberapa besar korban yang menerima bantuan pemenuhan dasar
Intepretasi	:	Semakin besar persentasenya menunjukkan bahwa semakin banyak korban yang menerima bantuan pemenuhan dasar



Nama Indikator	:	Persentase usulan pemulihan daerah terdampak yang ditindaklanjuti
Konsep Definisi	:	Perbandingan antara usulan pemulihan daerah terdampak yang ditindaklanjuti dengan usulan pemulihan daerah daerah terdampak
Rumusan	:	$a/b \times 100\%$ Keterangan : a = Jumlah usulan pemulihan daerah terdampak yang ditindaklanjuti b = Jumlah usulan pemulihan daerah terdampak
Kegunaan	:	Mengukur seberapa banyak usulan pemulihan daerah terdampak yang ditindaklanjuti
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin banyak usulan pemulihan daerah terdampak yang ditindaklanjuti

Nama Indikator	:	Indeks Ketahanan Daerah
Konsep Definisi	:	Kemampuan daerah dalam menghadapi / menanggulangi bencana
Rumusan	:	Perhitungan dari OPD sendiri yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator
Kegunaan	:	Mengukur Kemampuan daerah dalam menghadapi / menanggulangi bencana
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kemampuan daerah dalam menghadapi bencana

METADATA INDIKATOR

INSPEKTORAT DAERAH





Nama Indikator	:	Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan(Tindak Lanjut Tuntas (TS)
Konsep Definisi	:	Tindak lanjut atas rekomendasi temuan adalah langkah - langkah yang harus diambil oleh pemeriksa setelah LHP diserahkan kepada pihak entitas terperiksa
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi dalam LHP}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur penyelesaian masalah atas rekomendasi temuan/tidak lanjut tuntas
Intepretasi	:	Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan(Tindak Lanjut Tuntas (TS) sebesar 98,70 persen. Artinya dari 100 jumlah rekomendasi yang diberikan dimana 99 rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti tuntas. Sementara sisanya masih dalam tahap pembahasan

Nama Indikator	:	Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan(Tindak Lanjut Tuntas (TS)
Konsep Definisi	:	Jumlah Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi dalam LHP}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Mengukur banyaknya rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Intepretasi	:	Jumlah Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebesar 463 . Artinya Jumlah temuan yang direkomendasikan sebanyak 463 rekomendasi

Nama Indikator	:	Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan(Tindak Lanjut Tuntas (TS)
Konsep Definisi	:	Jumlah Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi dalam LHP}} \times 100\%$

Kegunaan	:	Mengukur banyaknya rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti
Intepretasi	:	Jumlah Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti sebesar 457 rekomendasi. Artinya Obrik yang sudah menindaklanjuti sebanyak 457 tuntas selesai.

Nama Indikator	:	Opini BPK
Konsep Definisi	:	Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4. efektivitas sistem pengendalian intern.
Rumusan	:	Nilai Indeks Opini BPK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penilaian dari BPK (WTP=4; WDP=3; Adverse=2; Disclaimer=1)
Kegunaan	:	Mengukur kualitas sistem keuangan daerah
Intepretasi	:	Opini BPK bernilai WTP artinya laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Nama Indikator	:	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Konsep Definisi	:	IPK merepresentasikan pemahaman masyarakat tentang tingkat korupsi dan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerahnya
Rumusan	:	Indeks Persepsi Korupsi = jumlah total nilai rata-rata unsur tertimbang Konversi Indeks Persepsi Korupsi = Indeks persepsi korupsi $\times 2,5$
Kegunaan	:	Mengukur kualitas pelayanan publik
Intepretasi	:	Nilai Indeks Persepsi Korupsi sebesar 8,77 yang termasuk pada kategori sangat bersih dari korupsi. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh semua unsur yang memiliki kategori sangat bersih dari korupsi



Nama Indikator	:	Nilai Sakip OPD (Inspektorat)
Konsep Definisi	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
Rumusan	:	Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.
Kegunaan	:	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya
Intepretasi	:	Nilai SAKIP sebesar 75 . Artinya tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawabkn atas hasil terhadap anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil dinilai Sangat Baik

METADATA INDIKATOR

SEKRETARIAT DPRD





Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sekretariat DPRD
Konsep Definisi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka . Angka ditetapkan dengan skala 1 sampai dengan 4
Rumusan	:	$IKM = Total\ NRR\ Tertimbang \times 25$
Kegunaan	:	Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik
Intepretasi	:	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 80,5. Artinya kinerja unit pelayanan Sekretariat DPRD masuk kinerja unit pelayanan Baik

METADATA INDIKATOR

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



METADATA INDIKATOR

BAGIAN HUKUM





Nama Indikator	:	Persentase Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyebarluasan Informasi Hukum, dan Bantuan Hukum
Konsep Definisi	:	Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi, hak asasi manusia dan publikasi produk hukum.
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah kegiatan fasilitas}}{\text{jumlah terget kegiatan}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa besar fasilitas pembentukan produk hukum dan penyebarluasan informasi hukum
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin besar produk hukum daerah, penyebarluasan informasi hukum, dan bantuan hukum yang difasilitasi

METADATA INDIKATOR

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN





METADATA INDIKATOR

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN





Nama Indikator	:	Persentase hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti
Konsep Definisi	:	Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
Rumusan	:	$\frac{IKK \text{ yang Ditindaklanjuti}}{Jumlah IKK} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa besar hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin besar IKK yang ditindaklanjuti

Nama Indikator	:	Persentase Hasil Evaluasi IKK yang Ditindaklanjuti
Konsep Definisi	:	Jumlah penetapan dan penegasan batas wilayah
Rumusan	:	Jumlah penetapan dan penegasan batas wilayah
Kegunaan	:	Untuk menetapkan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penetapan dan penegasan batas wilayah

METADATA INDIKATOR

BAGIAN PEREKONOMIAN





Nama Indikator	:	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindak Lanjuti
Konsep Definisi	:	Kebijakan perekonomian adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi dengan tujuan untuk memacu roda perekonomian masyarakat
Rumusan	:	$\frac{\text{Jumlah kebijakan perekonomian yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah kebijakan perekonomian}} \times 100\%$
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa besar kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh pemerintah
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin banyak kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti

Nama Indikator	:	Persentase peningkatan capaian kinerja pelaksanaan DBHCHT oleh perangkat daerah
Konsep Definisi	:	DBHCHT digunakan untuk mendanai program atau kegiatan : a. Peningkatan kualitas bahan baku; b. Pembinaan industri; c. Pembinaan lingkungan sosial; d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan / atau e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Rumusan	:	$\frac{a_t - a_{t-1}}{a_{t-1}} \times 100\%$
		a_t = capaian kinerja pelaksanaan DBHCHT oleh perangkat daerah
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa besar capaian kinerja pelaksanaan DBHCHT oleh perangkat daerah
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin besar capaian pelaksanaan DBHCHT oleh perangkat daerah

METADATA INDIKATOR

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA





Nama Indikator	:	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berhasil Ditenderkan
Konsep Definisi	:	-
Rumusan	:	$\frac{a}{b} \times 100\%$ a=Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan b=Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa besar paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin banyak paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan

METADATA INDIKATOR

BAGIAN ORGANISASI





Nama Indikator	:	Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu
Konsep Definisi	:	-
Rumusan	:	$a/b \times 100\%$ <i>a</i>=Jumlah pelaporan kinerja perangkat daerah tepat waktu <i>b</i>=Jumlah keseluruhan pelaporan kinerja perangkat daerah
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa besar persentase pelaporan kinerja perangkat daerah tepat waktu
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin banyak persentase pelaporan kinerja perangkat daerah tepat waktu

Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi Dan Tepat Ukuran
Konsep Definisi	:	-
Rumusan	:	$a/b \times 100\%$ <i>a</i>=Jumlah perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran <i>b</i>=Jumlah keseluruhan perangkat daerah
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa besar persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin banyak persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Standar Pelayanan
Konsep Definisi	:	-
Rumusan	:	$a/b \times 100\%$ <i>a</i>=Jumlah perangkat daerah yang mempunyai standar pelayanan <i>b</i>=Jumlah keseluruhan perangkat daerah
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa besar persentase perangkat daerah yang mempunyai standar pelayanan



Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin banyak perangkat daerah yang mempunyai standar pelayanan
Nama Indikator	:	Persentase LKJIP OPD yang Berkualitas
Konsep Definisi	:	-
Rumusan	:	$a/b \times 100\%$ a=Jumlah LKJIP OPD yang berkualitas b=Jumlah keseluruhan LKJIP OPD
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa besar persentase perangkat daerah LKJIP OPD yang berkualitas
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin banyak LKJIP OPD yang berkualitas

Nama Indikator	:	Persentase Kelembagaan OPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Sesuai dengan Perundang-Undangan
Konsep Definisi	:	-
Rumusan	:	$a/b \times 100\%$ a=Jumlah kelembagaan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan perundang-undangan b=Jumlah keseluruhan OPD
Kegunaan	:	Untuk mengetahui seberapa besar persentase kelembagaan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan perundang-undangan
Intepretasi	:	Semakin besar angkanya menunjukkan bahwa semakin banyak kelembagaan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan perundang-undangan



METADATA INDIKATOR

BAGIAN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN KEUANGAN



METADATA INDIKATOR

BAGIAN UMUM







KABUPATEN PASURUAN

**Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pasuruan**

Jl. Raya Raci Km. 09 Pasuruan
Bangil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan 671115